



PEMERINTAH ACEH

DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN



PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN ACEH TAHUN 2020

Jalan Mr. Mohd Hasan Nomor 102 Banda Aceh 23352



(0651) 7315005, Faks (0651) 7315501



drka@acehprov.go.id





SAMBUTAN GUBERNUR ACEH

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku “Perkembangan Profil Kependudukan Aceh Tahun 2020” dapat terselesaikan dengan baik.

Saya menyambut gembira dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yang telah berupaya mengumpulkan data, menyusun, dan mencetak buku profil ini. Dengan tersedianya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Aceh Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai dasar penentu kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Aceh untuk membantu perencanaan pembangunan yang berlandaskan data kependudukan yang baik dan benar agar perencanaan pembangunan dapat lebih terarah dan tepat sasaran demi terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera.

Harapan Kami dengan tersusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Aceh ini dapat dimanfaatkan oleh segenap kalangan, baik kalangan aparatur pemerintah, mahasiswa, dunia usaha dan masyarakat luas sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Akhir kata Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun dan kepada semua pihak instansi terkait yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Aceh Tahun 2020.

**Banda Aceh, Juni 2020
Plt. GUBERNUR ACEH**

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Aceh Tahun 2020. Shalawat dan Salam kita persembahkan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari Alam Jahiliah ke Alam yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan lembaga pengguna lainnya untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal dalam rangka meningkatkan pengelolaan informasi kependudukan serta mendayagunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Aceh Tahun 2020 ini merupakan buku informasi kependudukan yang disusun berdasarkan atas amanat Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini berisi data dan informasi kependudukan yang dianalisis secara sederhana agar pengguna data dapat memahami kondisi perkembangan kependudukan yang ada di Aceh. Data utama dalam penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini bersumber dari pelayanan KTP-el yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Aceh. Database kependudukan yang terhubung oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) selanjutnya dikonsolidasikan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan per-semester setiap tahunnya. Selain itu digunakan juga



data lintas sektor berupa data non registrasi sebagai data pendukung yang digunakan dengan indikator yang dibutuhkan dalam penulisan buku ini.

Terima kasih kami ucapkan, atas dukungan dari instansi terkait seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Sosial Aceh dan Mahkamah Syar'iah Aceh berupa data pendukung serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan masukan sehingga Buku Profil Perkembangan Kependudukan Aceh Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Demikian Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini disusun agar dapat dipergunakan seperlunya dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terima Kasih.

Banda Aceh, Juni 2020

KEPALA DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

DRS. TEUKU SYARBAINI, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681103 199011 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Manfaat	6
E. Pengertian Umum.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	15
A. Letak Geografis Daerah.....	15
B. Kondisi Demografis Daerah	18
C. Gambaran Perekonomian Daerah	19
D. Potensi Daerah	24
BAB III SUMBER DATA.....	33
A. Data Registrasi	33
B. Data Non Registrasi	33



C.	Pengolahan Data	34
D.	Analisis dan Penyajian Data	34
BAB IV KUANTITAS PENDUDUK.....		36
A.	Jumlah dan Persebaran Penduduk.....	37
1.	Jumlah Penduduk dan Proporsi Menurut Jenis Kelamin/ Kecamatan/ Desa.....	37
2.	Rasio Kepadatan Penduduk	40
3.	Laju Pertumbuhan Penduduk	43
B.	Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	46
1.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	47
a.	Rasio Jenis Kelamin.....	49
b.	Piramida Penduduk.....	54
c.	Rasio Ketergantungan.....	57
2.	Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin	63
a.	Angka Perkawinan Kasar.....	63
b.	Angkat Perwinan Umum.....	65
c.	Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur	67
d.	Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama	72
e.	Angka Perceraian Kasar.....	74
f.	Angka Perceraian Umum	76
3.	Keluarga.....	78



a.	Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga	79
b.	Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan dalam Keluarga dan Jenis Kelamin.....	80
c.	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur	82
d.	Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan	82
e.	Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan	83
1)	Karakteristik Kepala Keluarga Laki-Laki Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan	84
2)	Karakteristik Kepala Keluarga Perempuan Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan	86
f.	Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan...	87
g.	Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan	88
4.	Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	90
a.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	90
b.	Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin	91
c.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan.....	92



BAB V	KUALITAS PENDUDUK	93
A.	Kesehatan	94
1.	Kelahiran	95
2.	Kematian (Mortalitas)	102
B.	Pendidikan	114
1.	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	115
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	117
3.	Angka Partisipasi Murni (APM)	126
4.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	134
C.	Ekonomi	137
1.	Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja	140
2.	Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja	145
3.	Jumlah dan Proporsi Pengangguran	146
4.	Karakteristik Pengangguran	150
5.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	152
6.	Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan	159
D.	Sosial	160
1.	Proporsi Penduduk Penyandang Cacat	160
2.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	163
3.	Jumlah Penduduk Menurut Agama	164
4.	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah	165



BAB VI MOBILITAS PENDUDUK167

1.	Migrasi Masuk (<i>in-migration/M_i</i>).....	168
a.	Angka Migrasi Masuk (<i>in-migration/M_i</i>).....	169
b.	Karakteristik Migran Masuk.....	170
2.	Mirasi Keluar (<i>out-migration/M_o</i>).....	177
a.	Karakteristik Migran Keluar.....	178
1)	Karakteristik Migran Keluar Menurut Status Perkawinan.....	178
2)	Karakteristik Migran Keluar Menurut Status Hubungan dalam Keluarga (SHDK).....	179
3)	Karakteristik Migran Keluar Menurut Kelompok Umur.....	180

BAB VII KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN182

A.	Kepemilikan Kartu Keluarga.....	183
B.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	186
C.	Kepemilikan AKTA.....	189
1.	Kepemilikan Akta Kelahiran.....	189
a.	Kepemilikan Akta Kelahiran Umur 0 s.d. 18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota.....	190
b.	Kepemilikan Akta Kelahiran Menurut Kelompok Umur.....	192
2.	Kepemilikan Akta Perkawinan.....	193



3. Kepemilikan Akta Percerain.....196

BAB VIII KESIMPULAN.....201



DAFTAR GAMBAR

Bab II

Gambaran Umum Daerah

Gambar 2.1 Peta Wilayah Aceh	16
Gambar 2.2 Peta jumlah penduduk Aceh menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019	19
Gambar 2.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Aceh Tahun 2015 – 2019	20
Gambar 2.4 Kontribusi PDRB Migas dan Non-Migas (ADHB), Tahun 2015 - 2019	22
Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Aceh, Tahun 2015 - 2019	24

Bab IV

Kuantitas Penduduk

Gambar 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Aceh, Tahun 2017 s.d 2019	40
Gambar 4.2 Perkembangan Rasio Jenis Kelamin, Tahun 2017 s.d 2019.....	52
Gambar 4.3 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur	53
Gambar 4.4 Perkembangan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur, Tahun 2017 sampai dengan 2019	54
Gambar 4.5 Piramida Penduduk	57
Gambar 4.6 Rasio Ketergantungan Muda	61
Gambar 4.7 Rasio Ketergantungan Tua	62
Gambar 4.8 Rasio Ketergantungan Total	63
Gambar 4.9 Perkembangan Rasio Ketergantungan Total, Tahun 2017 s.d 2019	64
Gambar 4.10 Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Laki-Laki,	



Tahun 2017 s.d 2019.....	74
Gambar 4.11 Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan, Tahun 2017 s.d 2019.....	75
Gambar 4.12 Distribusi Kepala Keluarga (Umur Kepala Keluarga Tidak dibatasi) .	83
Gambar 4.13 Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan	83
Gambar 4.14 Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan	87

Bab V

KUALITAS PENDUDUK

Gambar 5.1 <i>Child Woman Ratio</i> di 23 Kabupaten/Kota Prov. Aceh	98
Gambar 5.2 Angka Kelahiran Umum di 23 Kabupaten/Kota Prov. Aceh	100
Gambar 5.3 Angka Kematian Bayi Laki-Laki di 23 Kabupaten/Kota Prov. Aceh .	104
Gambar 5.4 Angka Kematian Bayi Perempuan di 23 Kabupaten/Kota Prov. Aceh	105
Gambar 5.5 Angka Kematian Bayi Laki-Laki dan Perempuan di 23 Kabupaten/Kota Prov. Aceh.....	106
Gambar 5.6 Angka Kematian Neonatal Laki-Laki dan Perempuan	107
Gambar 5.7 Angka Kematian Bayi (1-<1 tahun).....	109
Gambar 5.8 Angka Kematian Anak Laki-laki.....	110
Gambar 5.9 Angka Kematian Anak Perempuan.....	111
Gambar 5.10 Jumlah Kematian Ibu (Hamil, Bersalin dan Nifas).....	113
Gambar 5.11 Jumlah Penduduk Usia (7 - 12) Tahun	115
Gambar 5.12 Jumlah Penduduk Usia (13 - 15) Tahun	116
Gambar 5.13 Jumlah Penduduk Usia (16 - 18) Tahun	117
Gambar 5.14 Angka Partisipasi Kasar SD/SDLB/MI	119
Gambar 5.15 Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPLB.....	122



Gambar 5.16 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/SMLB	124
Gambar 5.17 Angka Partisipasi Murni SD/SLB	128
Gambar 5.18 Angka Partisipasi Murni SMP/SMPLB	130
Gambar 5.19 Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/SMLB	132
Gambar 5.20 Rata-Rata Lama Sekolah	135
Gambar 5.21 Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki	136
Gambar 5.22 Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan	136
Gambar 5.23 Konsep Penduduk Menurut Ketenagakerjaan Berbasis SIAK	140
Gambar 5.24 Jumlah dan Porsi Tenaga Kerja Laki-laki	142
Gambar 5.25 Jumlah dan Porsi Tenaga Kerja Perempuan	143
Gambar 5.26 Jumlah dan Porsi Tenaga Kerja	144
Gambar 5.27 Jumlah dan Porsi Penduduk Yang Bekerja	145
Gambar 5.28 Presentase Pengangguran Berdasarkan Kabupaten/Kota	147
Gambar 5.29 Presentase Pengangguran Berdasarkan Umur	148
Gambar 5.30 Presentase Pengangguran Berdasarkan Pendidikan	149
Gambar 5.31 Presentase Pengangguran Berdasarkan Pendidikan	150
Gambar 5.32 Karakteristik Pengangguran Menurut Kelompok Umur	151
Gambar 5.38 Karakteristik Pengangguran Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga	152
Gambar 5.39 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki dan Perempuan	155
Gambar 5.40 Angka Partisipasi Angkatan Kerja di 23 Kab/Kota	156
Gambar 5.41 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur	157
Gambar 5.42 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan	158
Gambar 5.43 Distribusi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan	159
Gambar 5.44 Presentase Penyandang Cacat Berdasarkan Jenis Disabilitas	161



Gambar 5.44 Presentase Penyandang Cacat Berdasarkan kab/Kota.....	162
Gambar 5.45 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	163
Gambar 5.46 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	164
Gambar 5.47 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah	166

Bab VI

Mobilitas Penduduk

Gambar 6.1 Karakteristik Migran Masuk Menurut Kelompok Umur.....	171
Gambar 6.2 Karakteristik Migran Masuk Menurut Pendidikan	175
Gambar 6.3 Karakteristik Migran Masuk Menurut Status Perkawinan	176
Gambar 6.4 Karakteristik Migran Masuk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK).....	177
Gambar 6.5 Karakteristik Migran Keluar Menurut Status Perkawinan	179
Gambar 6.6 Karakteristik Migran Keluar Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga	180
Gambar 6.7 Karakteristik Migran Keluar Menurut Kelompok Umur	181

Bab VI

Kepemilikan Dokumen

Gambar 7.1 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Provinsi Aceh	185
Gambar 7.2 Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)	188
Gambar 7.3 Persentase Kepemilikan Akta Lahir Menurut Kabupaten/Kota.....	191
Gambar 7.4 Persentase Kepemilikan Akta Lahir Menurut Kelompok Umur	193
Gambar 7.5 Persentase Kepemilikan Akta Kawin Menurut Kabupaten/Kota.....	194



Gambar 7.6	Persentase Kepemilikan Akta Kawin Menurut Kelompok Umur.....	197
Gambar 7.7	Persentase Kepemilikan Akta Cerai Menurut Kabupaten/Kota	198
Gambar 7.8	Persentase Kepemilikan Akta Cerai Menurut Kelompok Umur.....	200



DAFTAR TABEL

Bab II

Gambaran Umum Daerah

Tabel 2.1	Rincian Pulau yang telah didiami oleh Penduduk di Aceh	16
Tabel 2.2	Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Di Aceh Tahun 2019	17
Tabel 2.3	Distribusi PDRB (ADHB) Aceh Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019	22
Tabel 2.4	Luas Panen Dan Produksi Komoditi Tanaman Pangan Aceh Tahun 2019	26
Tabel 2.5	Luas Panen Dan Produksi Komoditi Perkebunan Di Aceh, Tahun 2019.....	26
Tabel 2.6	Produksi Daging, Telur Dan Susu Komoditi Peternakan Di Aceh, Tahun 2019	26
Tabel 2.7	Poduksi Perikanan Di Aceh Menurut Klasifikasi, Tahun 2019	27
Tabel 2.8	Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis Di Aceh, Tahun 2019	28
Tabel 2.9	Potensi Sumberdaya Mineral Unggulan Aceh	29
Tabel 2.10	Potensi Energi Aceh	30

Bab IV

Kuantitas Penduduk

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Provinsi Aceh	37
Tabel 4.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 s.d. 2019.....	38
Tabel 4.3	Kepadatan Penduduk Tahun 2019	42





Tabel 4.4	Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019	44
Tabel 4.5	Perkembangan Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017 sampai dengan 2019	45
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 4.7	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten 2019	50
Tabel 4.8	Jumlah Penduduk Umur Muda, Umur Tua, Umur Produktif dan Rasio Ketergantungan	59
Tabel 4.9	Angka Perkawinan Kasar Menurut Kabupaten Tahun 2019	65
Tabel 4.10	Angka Perkawinan Umum Menurut Kabupaten Tahun 2019	67
Tabel 4.11	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan.....	68
Tabel 4.12	Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan.....	70
Tabel 4.23	Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan.....	71
Tabel 4.14	Angka Perceraian Kasar Menurut Kabupaten	76
Tabel 4.15	Angka Perceraian Umum Menurut Kabupaten.....	77
Tabel 4.16	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga.....	80
Tabel 4.37	Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK).....	81
Tabel 4.18	Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur Dan Status Perkawinan	84
Tabel 4.19	Karakteristik Kepala Keluarga Laki-Laki Menurut Kelompok Umur Dan Status Perkawinan	85
Tabel 4.20	Karakteristik Kepala Keluarga Perempuan	



	Menurut Kelompok Umur Dan Status Perkawinan	86
Tabel 4.21	Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pekerjaan dan Jenis kelamin	88
Tabel 4.22	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	90
Tabel 4.23	Jumlah Penduduk menurut Agama dan Jenis Kelamin	91
Tabel 4.24	Jumlah Penyandang Cacat Menurut Jenis kelamin.....	92

Bab V

Kualitas Penduduk

Tabel 5.1	Perkembangan Rasio Anak Perempuan, Tahun 2017 s.d 2019	99
Tabel 5.2	Perkembangan Angka Kelahiran Umum, Tahun 2017 s.d 2019	101
Tabel 5.3	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/SLB/MI, Tahun 2017 sampai dengan 2019.....	120
Tabel 5.4	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPLB, Tahun 2017 sampai dengan 2019	122
Tabel 5.5	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/SMLB, Tahun 2017 sampai dengan 2019.	125
Tabel 5.6	Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/SLB, Tahun 2017 s.d. 2019.....	129
Tabel 5.7	Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/SMPLB, Tahun 2017 s.d. 2019.....	131
Tabel 5.8	Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/SMLB, Tahun 2017 s.d 2019.....	133



Bab VI

Mobilitas Penduduk

Tabel 6.1	Angka Migrasi Masuk Aceh.....	170
Tabel 6.2	Karakteristik Migran Masuk Menurut Jenis Pekerjaan.....	172
Tabel 6.3	Angka Migrasi keluar Aceh.....	178

Bab VII

Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Tabel 7.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga Tahun 2017-2019.....	187
Tabel 7.2	Perkembangan Persentase Kepemilikan KTP Elektronik, Tahun 2017-2019.....	189
Tabel 7.3	Perkembangan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Tahun 2017-2019.....	192
Tabel 7.4	Perkembangan Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan, Tahun 2017-2019.....	196
Tabel 7.5	Perkembangan Kepemilikan Akta Perceraian, 2017-2019.....	199



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam aspek pembangunan. Paradigma baru tentang pembangunan sudah bergeser pada pentingnya pembangunan berdimensi pada manusia (*people centered development*). Penduduk bukan hanya sebagai obyek dari pembangunan tapi sekaligus sebagai subjek dari pembangunan. Artinya penduduk berperan penting dalam kesuksesan semua aspek pembangunan. Dalam pelaksanaannya, penduduk tidak saja menjadi pelaksana tetapi juga menjadi sasaran dari pembangunan itu sendiri. Selain itu penduduk juga merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan pembangunan terutama dalam perencanaan seperti: pendidikan, kesehatan, sosial, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

Proses perencanaan pembangunan memerlukan keterkaitan antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam pembangunan berkelanjutan menjadi penting dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Para perencana pembangunan memandang bahwa jumlah penduduk yang besar adalah sebagai aset sekaligus sebagai beban di dalam pembangunan. Sebagai aset, apabila dapat ditingkatkan baik kualitas maupun keahliannya, akan mampu meningkatkan produksi nasional dan pada gilirannya akan meningkatkan pula pendapatan nasional, namun jumlah yang besar tersebut akan menjadi beban jika kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia ini tidak mampu bersaing dan hanya menjadi beban bagi pemerintah.



Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbesar di dunia, yaitu sebesar 267.289.750 jiwa pada tahun 2019 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, jumlah penduduk Aceh pada tahun 2019 tercatat mencapai 5.269.809 jiwa di mana laki-laki berjumlah 2.644.534 jiwa dan perempuan berjumlah 2.625.275 jiwa. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan pengembangan sistem administrasi kependudukan yang terorganisir dari pusat hingga ke daerah. Administrasi kependudukan dimaksud menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Semakin lengkap dan akuratnya data kependudukan yang tersedia, maka semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program berbasis kependudukan.

Selain itu permasalahan serta isu kependudukan adalah merupakan isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor, sehingga mengintegrasikan berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan adalah pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Bagaimana mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaannya dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas penduduk dan penataan



persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan serta peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa “Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala provinsi yang dilakukan oleh Gubernur”, dalam memenuhi kebutuhan informasi kependudukan khususnya di Aceh, diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan menambahkan bahwa “untuk menyusun profil perkembangan kependudukan skala provinsi, Gubernur membentuk “Tim Penyusunan profil Perkembangan Kependudukan”.

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sehingga berkewajiban menyusun profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh. Data dan informasi kependudukan yang digunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan adalah Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dibersihkan dan dikonsolidasi secara nasional oleh



Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta data pendukung dari instansi terkait.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
9. Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2019 tentang Satndar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

C. Maksud Dan Tujuan

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, maksud dan tujuan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan adalah :

1. **Maksud**, untuk mendapatkan gambaran dan informasi tentang kondisi perkembangan kependudukan di Aceh.



2. **Tujuan**, untuk mengetahui perkembangan kependudukan dalam bentuk data dan indikator kependudukan yang meliputi :
 - a. Kuantitas Penduduk;
 - b. Kualitas Penduduk;
 - c. Mobilitas Penduduk;
 - d. Kepemilikan Dokumen.

D. Manfaat

Manfaat yang akan diperoleh dalam penyusunan buku profil perkembangan kependudukan ini adalah :

1. Dalam pembangunan sebagai dasar :
 - a. Perumusan kebijakan kependudukan (kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk);
 - b. Perencanaan kependudukan (kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk);
 - c. Perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pertimbangan penetapan “ekonomi unggulan” daerah;
 - e. Perencanaan tata ruang, penyediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - f. Penentuan segmentasi dan prioritas program-program pembangunan.
2. Dalam pemerintahan untuk :
 - a. Mengetahui besaran jumlah penduduk;
 - b. Penentuan status wilayah administrasi;
 - c. Penentuan alokasi anggaran;
 - d. Dasar penetapan rencana tata ruang;



- e. Mengetahui potensi pembayar pajak;
- f. Menentukan daftar pemilih;
- g. Pelayanan publik (pelayanan perizinan, pelayanan transportasi dan komunikasi, pemberian identitas dan bukti diri, pelayanan social dasar lainnya.

E. Pengertian Umum

Dalam rangka memberikan kesamaan persepsi tentang beberapa istilah yang digunakan maka beberapa pengertian umum yang ada dalam penyusunan buku profil kependudukan ini adalah sebagai berikut :

1. **Penduduk** adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan;
4. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan;
5. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi



kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

6. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
7. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat;
8. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak;
9. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi wilayah;
10. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
11. **Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
12. **Mobilitas Penduduk Non Permanen (*circulation/sirkuler*)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik atau nglaju (*commuting*) dan menginap/mondok;



13. **Angka Migrasi Masuk** adalah banyaknya migrant masuk kedalam suatu wilayah di setiap seribu penduduk dalam satu tahun;
14. **Angka Migrasi Keluar** adalah banyaknya migrant keluar dari suatu wilayah di setiap seribu penduduk dalam satu tahun;
15. **Urbanisasi** adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perkotaan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;
16. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
17. **Penduduk Yang Termasuk Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15–64) tahun yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha;
18. **Penduduk Yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15–64) tahun yang masih sekolah, mengurus rumah tanggadan pensiun;
19. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk dan disampaikan penduduk sebagai pekerjaannya pada saat melaporkan biodatanya kepada petugas registrasi penduduk di kelurahan.
20. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;



21. **Mencari Pekerjaan Atau Penganggur Terbuka** adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha;
22. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah;
23. **Mengurus Rumah Tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu rumah tangga; Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja;
24. **Kegiatan Lainnya** adalah mereka yang melakukan suatu pekerjaan di luar jenis pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SIAK;
25. **Pendidikan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah);
26. **Jenis Pekerjaan** adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh penduduk, berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
27. **Status Pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
28. **Angka Pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;



29. Lahir Hidup adalah :

- a. Suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot;
- b. Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;

30. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;

31. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;

32. Kematian atau Mortalitas menurut WHO adalah suatu peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;

33. Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality rate/IMR*) adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;

34. Angka Kematian Anak adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (0-4 tahun) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;



35. **Angka Kematian Ibu/MMR** adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;
36. **Angka Partisipasi Total** adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur (7-12), (13-15), (16-18) dan (19-24) tahun;
37. **Angka Partisipasi Murni/APM** adalah presentase jumlah peserta didik SD usia (7-12) tahun, jumlah peserta didik SMP usia (13-15) tahun, jumlah peserta didik SMA usia (16-18) tahun dan jumlah peserta didik perguruan tinggi usia (19 - 24) tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;
38. **Angka Partisipasi Kasar/APK** adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu;
39. **Pertumbuhan Penduduk** adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto;
40. **Angka Pertumbuhan Penduduk** adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya;
41. **Proporsi penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokkan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin;



- 42. Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;
- 43. Piramida Penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik;
- 44. Rasio Ketergantungan Atau Rasio Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif;
- 45. Rasio Kepadatan Penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu;
- 46. Angka Perkawinan Kasar** adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu;
- 47. Angka Perkawinan Umum** adalah angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu;



- 48. Angka Perceraian Kasar** adalah angka yang menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu;
- 49. Angka Perceraian Umum** adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.



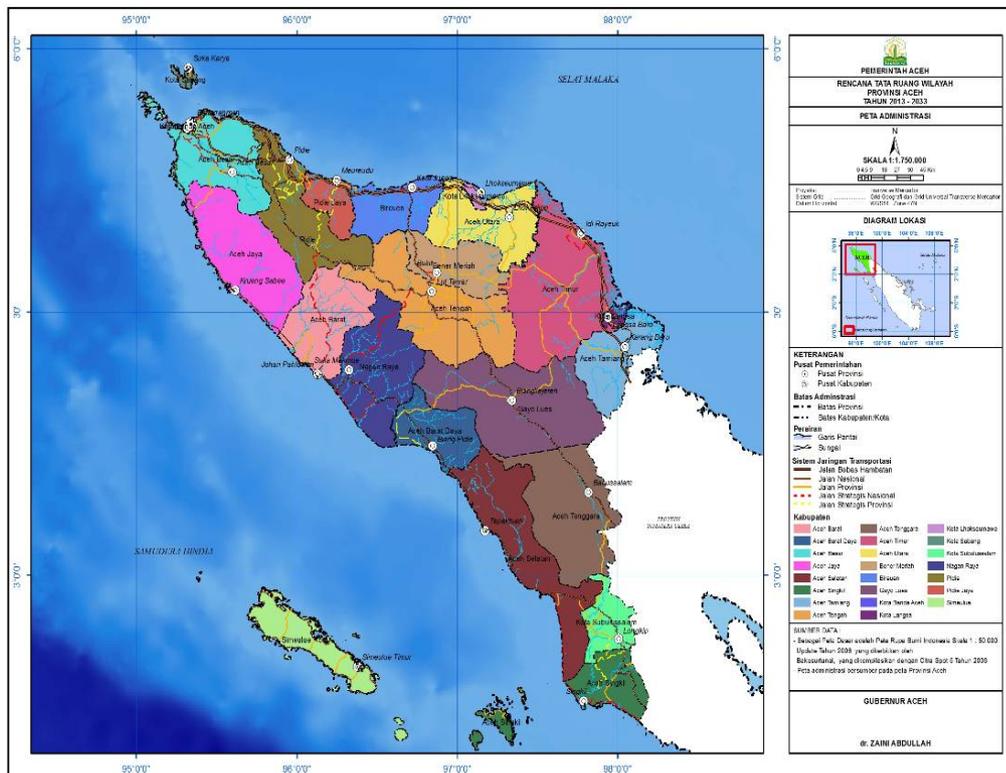
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Letak Geografis Daerah

Wilayah Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan sekaligus merupakan wilayah paling barat di Indonesia. Secara geografis wilayah daratan Aceh terletak pada 020 00' 00" – 060 00' 00" LU dan 950 00' 00" – 980 30' 00" BT. Adapun batas-batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Laut Andaman/Teluk Benggala;
- Sebelah Timur : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia;
- Sebelah Barat : Samudera Hindia.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Aceh



Sumber : Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033



Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2013-2033 wilayah Aceh terdiri dari daratan dan lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 5.675.840.82 Ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh (12 mil laut dari garis pantai), adalah sebesar 74.798.02 Km² atau 7.478.801.59 Ha. Selanjutnya bila ditambah dengan kawasan gugusan karang melati seluas 14.249.86 Km² atau 1.424.986.18 Ha, maka luas laut kewenangan Aceh menjadi 89.047.88 Km² atau 8.904.787.77 Ha.

Aceh memiliki 9 (Sembilan) buah pulau yang termasuk dalam kategori besar dan telah didiami oleh penduduk, diantaranya Pulau Simeulue, Pulau Weh, Pulau Breueh, Pulau Benggala, Pulau Balai, Pulau Raya, Pulau Selaut Besar, Pulau Simeulue Cut, dan Pulau Tuangku. Secara terperinci mengenai masing-masing pulau tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rincian Pulau yang telah Didiami oleh Penduduk

No.	Nama Pulau	Perairan	Kab/Kota	Perbatasan
1	Weh	Selat Malaka	Sabang	Selat Malaka
2	Breueh	Samudera Hindia	Aceh Besar	Selat Malaka
3	Benggala	Samudera Hindia	Aceh Besar	Negara India
4	Balai	Samudera Hindia	Aceh Singkil	Samudera Hindia
5	Raya	Samudera Hindia	Aceh Jaya	Samudera Hindia
6	Salaut Besar	Samudera Hindia	Simeulue	Samudera Hindia
7	Simeulue	Samudera Hindia	Simeulue	Samudera Hindia
8	Tuangku	Samudera Hindia	Simeulue	Samudera Hindia
9	Simeulue Cut	Samudera Hindia	Simeulue	Samudera Hindia

Sumber : Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033

Wilayah administrasi pemerintah Aceh terbagi atas 23 (dua puluh tiga) wilayah kabupaten/kota. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor



11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa pembagian administrasi pemerintahan kabupaten/kota secara berturut-turut terdiri atas : kecamatan, mukim dan gampong. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan di Aceh Tahun 2019

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas (Km ²)*	Jumlah Wilayah Administrasi		
				Kec.*	Mukim	Gampong*
11.01	Aceh Selatan	Tapaktuan	3.841,60	18	43	260
11.02	Aceh Tenggara	Kutacane	4.231,43	16	51	385
11.03	Aceh Timur	Idi	6.286,01	24	53	513
11.04	Aceh Tengah	Takengon	4.318,39	14	20	295
11.05	Aceh Barat	Meulaboh	2.927,95	12	32	322
11.06	Aceh Besar	Janthoe	2.969,00	23	68	604
11.07	Pidie	Sigli	3.086,95	23	94	730
11.08	Aceh Utara	Lhoksukon	3.236,86	27	67	852
11.09	Simeulue	Sinabang	2.051,48	10	29	138
11.10	Aceh Singkil	Singkil	2.185,00	11	16	116
11.11	Bireuen	Bireuen	1.901,20	17	75	609
11.12	Aceh Barat Daya	Blangpidie	1.490,60	9	20	152
11.13	Gayo Lues	Blangkejeren	5.719,58	11	25	136
11.14	Aceh Jaya	Calang	3.812,99	9	21	172
11.15	Nagan Raya	Suka Makmue	3.363,72	10	30	222
11.16	Aceh Tamiang	Kuala Simpang-Karang Baru	1.956,72	12	27	213
11.17	Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong	1.454,09	10	27	232
11.18	Pidie Jaya	Meureudu	1.073,60	9	34	222
11.71	Banda Aceh	Banda Aceh	61,36	9	17	90
11.72	Sabang	Sabang	153,00	2	7	18
11.73	Lhokseumawe	Lhokseumawe	181,06	4	9	68
11.74	Langsa	Langsa	262,41	5	6	66
11.75	Subulussalam	Subulussalam	1.391,00	5	8	82
Jumlah			57.956,00	289	779	6.497

Sumber : - *) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019.



B. Kondisi Demografis Daerah

Jumlah penduduk di Aceh pada akhir Tahun 2019 adalah sebesar 5.269.809 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga atau rumah tangga berdasarkan Kartu Keluarga (KK) adalah 1.474.457 kepala keluarga/rumah tangga. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Aceh Utara sebesar 586.851 jiwa dan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang sebesar 42.191 jiwa. Ditinjau berdasarkan kondisi sebaran penduduk menurut masing-masing bagian wilayah Aceh, dapat dapat dijelaskan sebagai berikut :

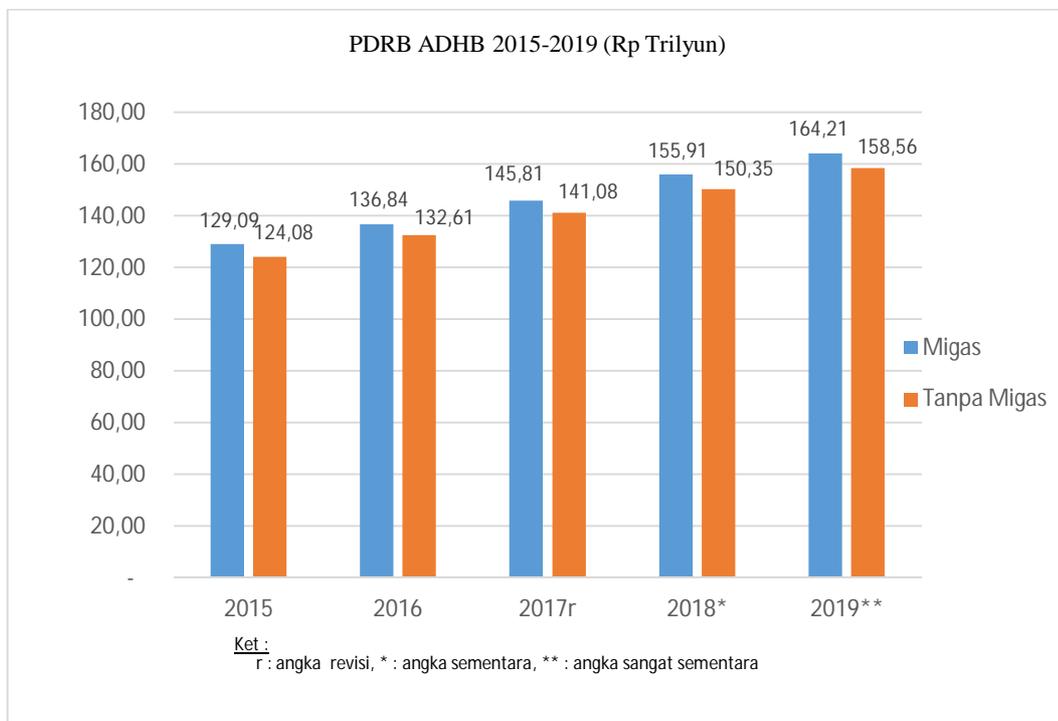
1. Pesisir timur-utara, mulai dari Kabupaten Pidie sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang, jumlah penduduk adalah 2.729.041 jiwa atau 51,79 % dari penduduk Aceh;
2. Sekitar Kota Banda Aceh, yang meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang jumlah penduduk adalah 681.873 jiwa atau 12,94 % dari penduduk Aceh;
3. Pesisir barat-selatan, mulai dari Kabupaten Aceh Jaya sampai dengan Kabupaten Subulussalam Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue, jumlah penduduk adalah 1.156.226 jiwa atau 21,94 % dari jumlah penduduk Aceh;
4. Bagian tengah-tenggara (pegunungan/dataran tinggi), yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara, jumlah penduduk adalah 702.669 jiwa atau 13,33 % dari penduduk Aceh.

Sebaran penduduk seperti dikemukakan di atas menunjukkan adanya kesenjangan jumlah penduduk di antara bagian-bagian wilayah tersebut. Penduduk



2019 mencapai Rp 164,21 Trilyun. Walaupun tanpa sektor migas, kinerja perekonomian Aceh juga tercatat terus mengalami kenaikan. PDRB Aceh Tanpa Migas pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp 124,08 Trilyun, selanjutnya juga mengalami peningkatan sehingga Tahun 2019 mencapai Rp 158,58 Trilyun. Untuk mengetahui secara lebih lengkap mengenai *trend* kenaikan terhadap PDRB Aceh tersebut, dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Aceh, Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020.

Kontribusi sektor migas di Aceh ditopang oleh 2 (dua) sub sektor, yaitu sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi dan sub sektor industri gas alam cair. Jumlah PDRB Aceh menunjukkan trend yang semakin meningkat, namun ditinjau dari kontribusinya terlihat bahwa peranan minyak dan gas bumi terhadap perekonomian Aceh secara keseluruhan (2015-2019) tergolong kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan kontribusi migas salah satu penyebab



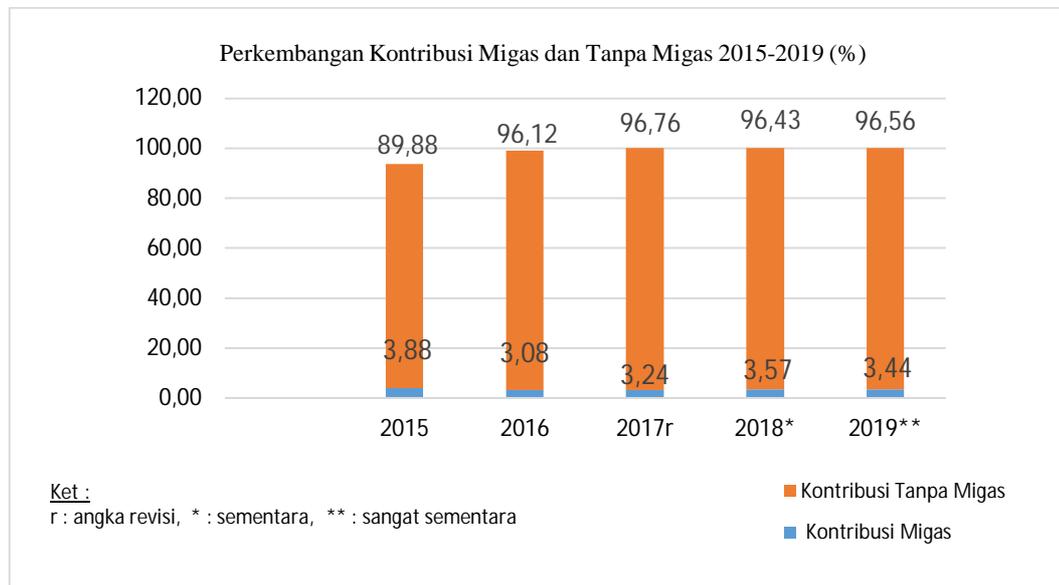
utamanya oleh adanya berkurangnya produksi migas pada kilang-kilang migas utama di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

Sejak Tahun 2015 telah terjadi penurunan kontribusi secara drastis dikarenakan telah berhentinya kontrak PT Arun yang melakukan pengiriman terakhir pada Oktober 2014. Kondisi ini menyebabkan penurunan kontribusi yang cukup drastis 10,12 % (2014) menjadi 3,88 % (2015) dan 3,08 % (2016). Selain itu juga didukung dengan turunnya harga minyak dunia, bahkan penurunan ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Selanjutnya seiring dengan eksplorasi migas baru yang mulai berproduksi di Aceh Timur pada Tahun 2017-2018 mengalami sedikit peningkatan, yaitu 3,24 % dan 3,57 %. Adapun pada Tahun 2019 kembali terjadi sedikit penurunan sehingga menjadi 3,44 %.

Perkembangan kontribusi dari migas dan tanpa migas dapat dilihat secara lebih lengkap pada Gambar 2.4. Secara struktur, ekonomi Aceh sampai dengan Tahun 2019 juga masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan peranan sebesar 29,54 %. Sektor dengan peranan kedua terbesar adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (15,51 %). Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menempati urutan ketiga dengan peranan sebesar 10,92 %. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian yang pernah menjadi andalan pada masa lalu hanya menempati urutan ke enam (4,78 %).



Gambar 2.3 Kontribusi PDRB Migas dan Tanpa Migas (ADHB), Tahun 2015-2019.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020

Untuk mengetahui secara lebih lengkap mengenai kontribusi PDRB (ADHB) dari masing-masing sektor penunjang perekonomian Aceh pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Distribusi PDRB (ADHB) Aceh Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2019

No.	(Kategori) Lapangan Usaha	Distribusi (%)**
1	(A) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29,54
2	(B) Pertambangan dan Penggalian	4,78
3	(C) Industri Pengolahan	4,74
4	(D) Pengadaan Listrik dan Gas	0,14
5	(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05
6	(F) Konstruksi	9,62
7	(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepmor	15,51
8	(H) Transportasi dan Pergudangan	6,45
9	(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,69
10	(J) Informasi dan Komunikasi	2,84
11	(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	2,14
12	(L) Real Estate	4,36



No.	(Kategori) Lapangan Usaha	Distribusi (%)**
13	(M,N) Jasa Perusahaan	0,65
14	(O) Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	10,92
15	(P) Jasa Pendidikan	2,98
16	(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,81
17	(R,S,T,U) Jasa lainnya	1,45
P D R B Migas		100,00
P D R B Tanpa Migas		96,56

Ket :)** Data sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020

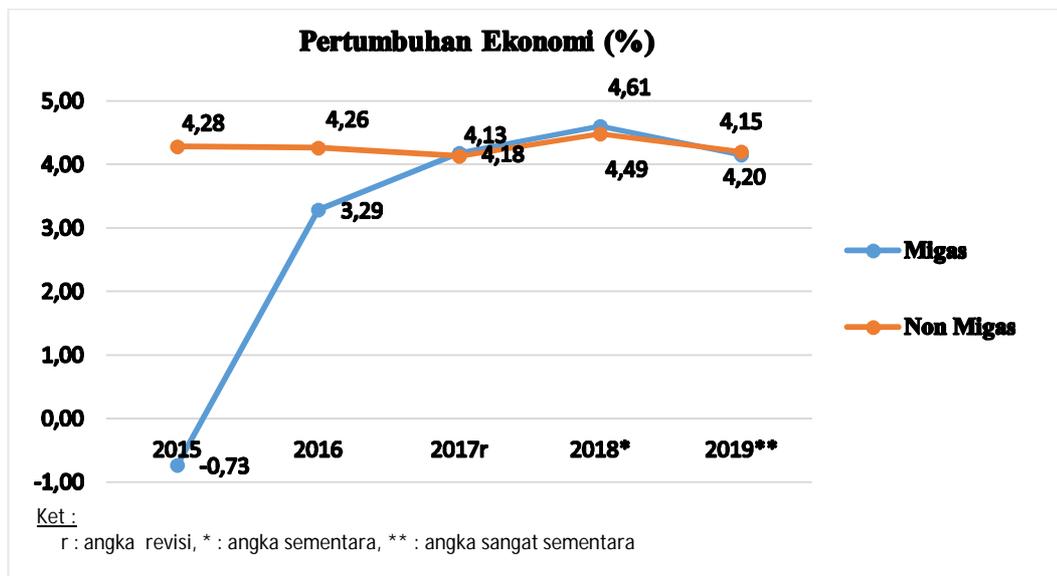
Ditinjau dari pertumbuhan ekonomi tanpa migas terlihat bahwa ekonomi Aceh selama 5 (lima) tahun terakhir tumbuh secara positif dengan nilai yang sedikit fluktuatif. Pada Tahun 2015 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 4,28 %. Sedangkan pada Tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan, yaitu masing-masing menjadi sebesar 4,26 % dan 4,13 %. Sedangkan pada Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi tanpa migas kembali meningkat menjadi 4,49 % dan seterusnya pada Tahun 2019 kembali menurun menjadi 4,20 %.

Pertumbuhan ekonomi dengan migas juga menunjukkan tren peningkatan. Nilai pertumbuhan ekonomi dengan migas pada Tahun 2015 adalah sebesar -0,73 %, menurun dibandingkan dengan Tahun 2014 yang mencapai 1,55 %. Namun pada Tahun 2016-2018 kembali meningkat tinggi dengan nilai berturut-turut, yaitu 3,29 %, 4,18 % dan 4,61 %. Selanjutnya pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 4,15 %. Berdasarkan data tersebut juga dapat dijelaskan bahwa dengan adanya eksplorasi sumber migas baru di Aceh, telah terjadi pertumbuhan ekonomi migas yang melebihi tanpa migas, khususnya Tahun 2017-2018. Untuk mengetahui



secara lebih terperinci mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi Aceh 2015-2019, dapat dilihat Gambar 2.5 berikut.

Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Aceh, Tahun 2015 - 2019.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020

D. Potensi Daerah

Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam dan potensial. Sektor-sektor potensial yang menjadi unggulan perekonomian Aceh, diantaranya, sektor pertanian, sektor pariwisata dan sektor pertambangan dan energi. Sektor pertanian terdiri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Komoditi yang menjadi andalan Aceh pada sub sektor pertanian tanaman pangan adalah padi, jagung, dan kedelai. Sub sektor perkebunan yang menjadi unggulan adalah komoditi kopi, kakao, kelapa sawit, kelapa, karet dan pinang. Sub sektor perikanan, komoditi yang menjadi unggulan adalah kerapu, bandeng, udang, lobster dan kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol, cakalang, kembung, selar, tenggiri dan layang, Komoditi unggulan peternakan, diantaranya



sapi, kerbau dan kambing. Sedangkan pada sektor pariwisata, jenis wisata yang menjadi andalan adalah wisata bahari, agrowisata, wisata sejarah, wisata petualangan, pemburuan (hama babi), Demikian pula halnya untuk sektor pertambangan dan energi, sumber daya alam yang potensial untuk di eksploitasi, seperti mineral dan batubara (minerba), minyak dan gas bumi (migas), panas bumi dan air.

Daerah penghasil padi terbesar sebagai sumber pangan utama adalah Kabupaten Pidie, Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Besar. Daerah penghasil jagung terbesar di Aceh adalah Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Aceh Selatan. Daerah penghasil komoditi perkebunan cukup beragam, sesuai dengan jenis komoditi yang dihasilkan. Untuk jenis komoditi sawit, sangat didominasi oleh perusahaan besar yang pada umumnya berlokasi Kabupaten Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Aceh Tamiang. Sedangkan kopi, khususnya jenis arabica diproduksi oleh Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Khusus untuk perikanan tangkap (laut), produsen utamanya adalah seluruh daerah-daerah yang berlokasi di sepanjang samudera Hindia dan selat Malaka. Adapun penghasil utama perikanan budidaya air tawar adalah Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Tengah dan Gayo Lues. Sedangkan penghasil utama perikanan budidaya air laut adalah daerah-daerah pesisir sepanjang Selat Malaka, yaitu Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Timur.

Untuk mengetahui secara terperinci mengenai potensi produksi dari masing-masing komoditi andalan dari sektor potensial yang terdapat di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.4 s.d. Tabel 2.7.



Tabel 2.4 Luas Panen dan Produksi Komoditi Tanaman Pangan Aceh, Tahun 2018

No	Jenis Tanaman Pangan	Produksi (Ton)
1.	Padi	1.697.756
2.	Jagung	205.127
3.	Kedelai	47.904

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (Aceh Dalam Angka), 2020

Tabel 2.5 Luas Panen dan Produksi Komoditi Perkebunan di Aceh, Tahun 2018

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Kelapa Sawit	237.769	440.087
2.	Karet	129.029	64.925
3.	Kakao	99.342	39.295
4.	Kelapa	102.203	63.500
5.	Kopi	124.237	69.622
6.	Cengkeh	25.091	5.315
7.	Pala	24.898	6.100
8.	Kemiri	16.373	9.065
9.	Tembakau	1.895	1.734
10.	Tebu	4.984	33.304
11.	Pinang	40.681	15.488
12.	Pinang	40.681	15.488
13.	Kapuk Randu	1.293	4316

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (Aceh Dalam Angka), 2020

Tabel 2.6 Produksi Daging, Telur dan Susu Komoditi Peternakan di Aceh, Tahun 2017

No	Komoditi	Produksi (Kg)	
		Daging	Telur / Susu
1.	Sapi	10.546.027	-
2.	Kerbau	4.217.197	-
3.	Kambing	2.841.432	-
4.	Domba	441.417	-
5.	Ayam Buras	11.355.489	2.333.343
6.	Ayam Ras :	-	-
	- Petelur	625.162	7.019.475
	- Pedaging	9.405.312	-



No	Komoditi	Produksi (Kg)	
		Daging	Telur / Susu
7.	Itik	1.429.905	8.745.811
8.	Sapi Perah	-	62.730

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (Aceh Dalam Angka), 2020

Tabel 2.7 Produksi Perikanan di Aceh Menurut Klasifikasi, Tahun 2017

No	Klasifikasi	Jumlah Produksi (Ton)
1	Perikanan Budidaya	99.539
	- Tambak	62.568
	- Kolam	35.092
	- Sawah (Mina Padi)	1
	- Jaring Apung Air Tawar	342
	- Jaring Tancap Air Tawar	843
	- Keramba	21
	- Jaring Apung Air Laut	671
2	Perikanan Tangkap	236.205
	- Laut	236.061
	- Perairan Umum Daratan	144
	T o t a l	335.744

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (Aceh Dalam Angka), 2020

Objek dan daya tarik wisata di Aceh terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus. Wisata minat khusus adalah wisata yang hanya diminati sebagian dari wisatawan seperti berburu, mendaki gunung, gua, tempat-tempat ibadah dan tempat ziarah. Objek wisata menurut jenisnya secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini.



Tabel 2.8 Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis di Aceh

No	Kabupaten/kota	Jumlah, Objek Wisata	Rincian Jumlah Menurut Jenis Objek Wisata		
			Alam	Sejarah Budaya	Minat Khusus
1.	Aceh Selatan	10	3	5	2
2.	Aceh Tenggara	4	4	0	0
3.	Aceh Timur	20	19	1	0
4.	Aceh Tengah	20	15	2	3
5.	Aceh Barat	4	3	1	0
6.	Aceh Besar	13	11	0	2
7.	Pidie	3	3	0	0
8.	Aceh Utara	3	1	2	0
9.	Simeulue	13	12	0	1
10.	Aceh Singkil	8	8	0	0
11.	Bireuen	14	9	2	3
12.	Aceh Barat Daya	13	13	0	0
13.	Gayo Lues	16	15	0	1
14.	Aceh Jaya	51	34	9	8
15.	Nagan Raya	5	5	0	0
16.	Aceh Tamiang	4	4	0	0
17.	Bener Meriah	4	2	2	0
18.	Pidie Jaya	2	2	0	0
19.	Banda Aceh	40	3	30	7
20.	Sabang	7	6	1	0
21.	Lhoksemawe	0	0	0	0
22.	Langsa	12	5	3	4
23.	Subulussalam	6	4	2	0
Total		272	181	60	31

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2020

Terkait dengan sektor pertambangan dan energi, Aceh memiliki sumberdaya mineral seperti mineral dan batubara (minerba), minyak dan gas bumi (migas), panas bumi dan air tanah. Potensi pertambangan yang telah teridentifikasi yang dikenal sebagai bahan tambang strategis (golongan A), bahan tambang vital



(golongan B) dan bahan tambang golongan C (bahan galian). Potensi bahan tambang golongan A dan B berupa migas, panas bumi, batubara, emas (Au), tembaga (Cu), perak (Ag), seng (Zn), timah hitam (Pb), molibdenum (Mo), besi/pasir besi (Fe), kromium (Cr), nikel (Ni), timah putih (Sn), mangan (Mn), platina (Pt), belerang (S) dan air raksa (Hg) menyebar di 10 (sepuluh) kabupaten. Sedangkan potensi mineral galian golongan C menyebar hampir di seluruh Aceh, yaitu : sirtu sungai, sirtu darat, pasir kuarsa, sirtu kerikil, batu pasir, batu gunung, batu apung, tanah urug, tanah liat, mika, lempung, kalsit, batu gamping, serpentinit berurat magnesit, magnesit, serpentinit, tufa gampingan, fosfat, trass dan marmer menyebar di 13 (tiga belas) kabupaten/kota. Potensi batubara terdapat di Kabupaten Aceh Barat, dan sumberdaya mineral ini telah mulai fokus dieksplorasi karena Aceh telah memiliki kesiapan infrastruktur pendukung dan sumberdaya manusia yang handal. Beberapa potensi unggulan pertambangan dan energi tersebut dapat dilihat secara lebih terperinci pada Tabel 2.9 dan 2.10 berikut.



Tabel 2.9 Potensi Sumberdaya Mineral Unggulan Aceh

No	Kab/Kota	Jenis Bahan Galian (Potensi Cadangan)
1.	Aceh Besar	Posfat (140,000 ton), Tras(99,304,000 ton, Diatome (700,000,000 ton),Magnesit/supertinit (210,000,000 ton), Bijih Besi Magnetit (4,200,000 ton), Pasir Besi (720,000 Ton).
2.	Aceh Jaya	Emas (0,2-4 ppm, Batu gamping dolomit (5,350,000,000 ton), Marmer (900,000,000 ton), Fosfat (77,000 ton), Batubara (2,400 ton), Pasir kwarsa (255,000,000,000 ton).
3.	Sabang	Puzolan/Tras (9,000,000 ton), Diatome (120,000 ton), Kaolin (32,800,000 ton), Belerang (6,400 ton), Andesit (930,000,000 ton), Panas Bumi (74,144 Mwe).
4.	Pidie	Emas, Perak, Tembaga (4-12 ppm (gr/ton), Emas (0,4-2,4 gr/ton), Tembaga (8-40 gr/ton), Bijih Besi (10,000 ton), Puzolan/Tras (65,000,000 ton), Diatome (1,400,000 ton).
5.	Aceh Barat	Emas (0,2-4 ppm), Batubara (350,900,00 ton), Dolomit (800,000,000 ton), Marmer (200,000,000 ton), Posfat (3,400 ton).
6.	Nagan Raya	Batubara (71,200,000 ton), Marmer (1,110,000,000 ton), Dolomit (20,000,000 ton), Emas (0,2-4 ppm).
7.	Aceh Barat Daya	Bijih Besi Magnetit (12,900,000 ton), Magnesit/supertinit (3,600,000 ton), Marmer (3,431,000 ton).
8.	Aceh Selatan	Bijih besi magnetit (1,200,000 ton), Magnetit/supernitit (4,200,000 ton), Marmer (160,750,000 ton).
9.	Subussalam	Bijih besi magnetit (20,000,000 ton), Galena/Timah hitam(4,000,000 ton).
10.	Aceh Timur	Timah hitam (400,000 ton), Bijih besi magnetit (22,000,000 ton), Granit (900,000,000 ton).
11.	Gayo Lues	Timah hitam (1,200,000 ton), Bijih besi magnetit (22,000,000 ton), Marmer (400,000,000 ton).
12.	Aceh Tamiang	Bijih besi magnetit (2,400,000 ton), Dolomit (1,190,000,000 ton), Fosfat (400,000 ton).
13.	Aceh Singkil	Pasir Kuarsa (5,250,000 ton), Gambut (11,800,000 ton).

Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Aceh, 2020



Tabel 2.10 Potensi Energi Aceh.

No	Kab/Kota	Panas Bumi (Lokasi/Potensi)	Air (Lokasi/Potensi)
1.	Sabang	Jaboi (74 Mwe), Lhok Pria Laot (50 Mwe), Jaboi-Keuneukai (50 Mwe)	-
2.	Aceh Besar	Selawah Agam (165 Mwe), Ie Seum-Krueng Raya (63 Mwe)	-
3.	Pidie	Alur Canang (25 Mwe), Alue Long-Beungga (100 Mwe), Tangse (25 Mwe)	-
4.	Bener Meriah	Rimba Raya (100 Mwe), Simpang Balik (100 Mwe)	Kr. Peusangan, Peusangan (89 MW).
5.	Aceh Tengah	Gunong Geurudong (120 Mwe), Silih Nara (100 Mwe)	Kr. Jambo Aye, Bidin/Jambo Aye (246 MW), Kr. Jambo Aye, Tawar/Bidin (73 MW), Kr. Jambo Aye, Tawar/Jambo Aye (42 MW), Kr. Jambo Aye, Pantan Dedalu/Isaq (7,90 MW), Kr. Pameu, Pameu (160,6 MW).
6.	Aceh Timur	Meranti (25 Mwe)	Kr. Tamiang, Tampur-1/Ramasan (172 MW), Kr. Peureulak, Peureulak (35 MW), Kr. Tamiang, Tampur-2 (427 MW).
7.	Aceh Tamiang	Brawang Buaya (25 Mwe)	-
8.	Gayo Lues	Kafi (25 Mwe), Lesten (25 Mwe), Gunung Kembar (92 Mwe), Dolok Perkirapan (25 Mwe)	-
9.	Pidie Jaya	-	Kr. Bracan, Meureudu (63 MW).
10.	Aceh Jaya	-	Kr. Teunom, Teunom (41 MW), Kr. Teunom, Teunom-2 (288,2 MW).
11.	Aceh Utara	-	Kr. Jambo Aye, Jambo Aye-3 (37 MW), Kr. Jambo Aye, Jambo Aye-5 (182 MW).



No	Kab/Kota	Panas Bumi (Lokasi/Potensi)	Air (Lokasi/Potensi)
12.	Aceh Tenggara	-	Lawe Alas, Lawe Alas/Leuser (268,10 MW). Lawe Mamas, Lawe Mamas/Tanah Merah (65,80 MW).
13.	Aceh Selatan	-	Kr. Jambo Papeun, Jambo Papeuen-2 (95,2 MW), Kr. Kluet, Kluet (141,00 MW), Kr. Kluet, Sibubung-2 (121,10 MW).
14.	Nagan Raya	-	Kr. Tripa, Tripa-3 (172,6 MW), K. Tripa, Tripa-4 (306,4 MW).
15.	Aceh Barat	-	Kr, Meureubo, Mereubo-1 (82,1 MW), Kr. Dolok, Dolok-1 (32,20 MW).
16.	Aceh Barat Daya	-	Kr. Lama Rayoek, Kecamatan Kuala Batee (60 MW).

Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Aceh, 2020.



BAB III

SUMBER DATA

A. Data Registrasi

Data utama yang digunakan dalam penyusunan buku profil perkembangan kependudukan adalah Data Konsolidasi Bersih (DKB). Data Konsolidasi Bersih merupakan data kependudukan dari pelayanan perekaman dan pencatatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terhubung secara nasional dan terpusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. DKB tersebut selanjutnya didistribusikan ke provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia setiap semester/tahun untuk mendukung pemanfaatan data dan pelayanan informasi administrasi kependudukan. Sehubungan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Aceh merupakan kegiatan yang dilakukan selama periode tahunan, maka data yang digunakan di buku ini adalah DKB Semester II tahun 2019.

B. Data Non Registrasi

Data non-registrasi digunakan sebagai data yang digunakan untuk melengkapi data registrasi, yaitu data lintas sektor yang berasal dari Bappeda Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Mahkamah Syar'iah Aceh, Dinas Sosial Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Data lintas sektor yang dipergunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini merupakan bahan pendukung dalam penyajian informasi untuk mengetahui



indikator yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas kependudukan seperti : angka kelahiran dan angka kematian ibu dan bayi, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni jenjang pendidikan sekolah dasar hingga menengah.

C. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan agar dapat dilakukan analisis terhadap data utama dan data pendukung. Sumber data utama pada penyusunan buku profil ini merupakan data konsolidasi bersih yang tersimpan di dalam sistem database kependudukan, dimana manajemen database dengan menggunakan aplikasi *Oracle Database 11g Release 2*. Proses mengeluarkan data yang tersimpan pada database kependudukan dilakukan dengan *Structured Query Language (SQL)* yang merupakan sekumpulan perintah khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam database relasional. SQL merupakan sebuah bahasa komputer yang mengikuti standar ANSI (*American National Standards Institute*) yang digunakan dalam manajemen database relasional, dimana tools yang digunakan untuk mengeluarkan data dari database kependudukan tersebut adalah *toad for oracle versi 12.9*. Data yang telah dikeluarkan dari database tersebut selanjutnya akan disusun ke dalam bentuk tabel dan grafik untuk dilakukan analisis.

D. Analisis Dan Penyajian Data

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan interpretasi terhadap berbagai data yang dikumpulkan sehingga dapat menjadi suatu informasi seperti: mengetahui kuantitas dan kualitas penduduk berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan sebagainya.



Analisis dan penyajian data dalam penulisan buku profil perkembangan kependudukan adalah untuk menggambarkan kondisi dan perkembangan atau dinamika penduduk pada tahun 2019. Analisis dan penyajian data kependudukan disajikan ke dalam bentuk tabel dan grafik, selanjutnya dilakukan interpretasi sehingga mudah dibaca serta dipahami dalam mengambil suatu kesimpulan.

Hasil dari analisis kependudukan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perencana maupun stakeholder yang terlibat dalam pembangunan untuk dapat merumuskan dan memberikan rekomendasi, mengingat pentingnya faktor penduduk sebagai objek perencanaan.



BAB IV

KUANTITAS PENDUDUK

Bab ini mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan kuantitas penduduk Aceh pada tahun 2019. Penyajiannya mencakup tentang:

- A. Jumlah dan persebaran penduduk, meliputi:
 - 1. Jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin/kecamatan/desa;
 - 2. Rasio Kepadatan penduduk;
 - 3. Laju pertumbuhan penduduk.
- B. Penduduk menurut karakteristik demografi, meliputi:
 - 1. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin.
 - a. Rasio jenis kelamin;
 - b. Piramida penduduk;
 - c. Rasio ketergantungan.
 - 2. Jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin, meliputi:
 - a. Angka perkawinan kasar;
 - b. Angka perkawinan umum;
 - c. Angka perkawinan menurut kelompok umur;
 - d. Rata-rata umur kawin pertama;
 - e. Angka perceraian kasar;
 - f. Angka perceraian umum.
 - 3. Keluarga.
 - a. Jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga;
 - b. Hubungan dengan kepala keluarga;



- c. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur;
 - d. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin;
 - e. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin;
 - f. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan pendidikan;
 - g. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan.
4. Penduduk menurut karakteristik sosial.
- a. Jumlah penduduk menurut pendidikan;
 - b. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan;
 - c. Jumlah penduduk menurut agama;
 - d. Jumlah penduduk menurut kecamatan.

A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

1. Jumlah Penduduk dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin/ Kecamatan/ Desa

Jumlah penduduk Aceh pada akhir 2019 sebanyak 5.269.809 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,42% atau sebesar 22.552 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, yakni tahun 2018 sebesar 5.247.257 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2019 masih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, yakni sebesar 50,18% dan perempuan sebesar 49,82% dengan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.644.534 jiwa dan perempuan 2.625.275 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,28% atau sebesar 7.426 jiwa untuk penduduk laki-laki dan 0,57% untuk penduduk perempuan atau meningkat sebesar 15.126 jiwa dari tahun 2018.



Apabila dirincikan perbandingan jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan di setiap kabupaten/kota, maka terlihat adanya peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Gambaran jumlah penduduk di Aceh yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota di Aceh pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1, menjelaskan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2019 adalah Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebesar 586.851 jiwa, kemudian disusul dengan Kabupaten Pidie sebesar 442.450 jiwa dan Kabupaten Bireuen sebesar 440.350 jiwa. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terendah adalah Kota Sabang, yaitu sebesar 42.191 jiwa dan Kota Subulussalam 87.285 jiwa. Sedangkan untuk perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 s.d. 2019

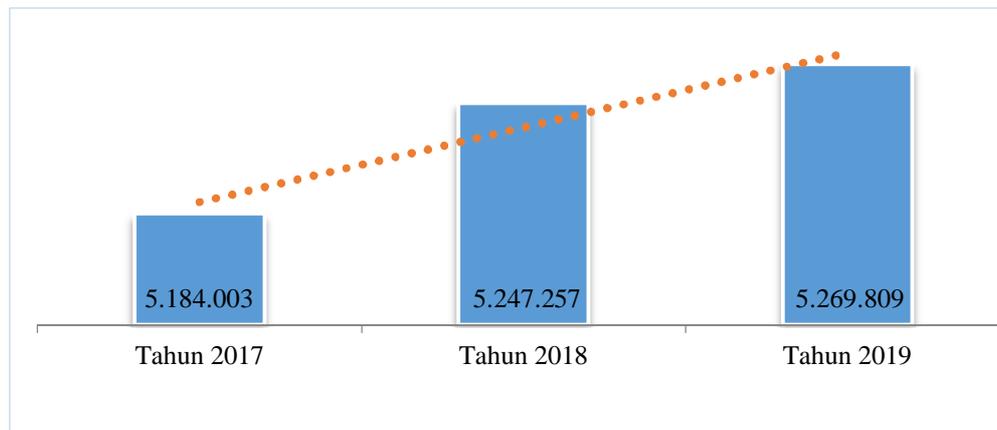
Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Aceh (Jiwa)			Selisih 2017 dan 2018 (Jiwa)	Selisih 2018 dan 2019 (Jiwa)
		2017	2018	2019		
11.01	Aceh Selatan	230.955	234.761	236.359	3.806	1.598
11.02	Aceh Tenggara	222.357	225.139	226.162	2.782	1.023
11.03	Aceh Timur	425.048	429.006	423.638	3.958	-5.368
11.04	Aceh Tengah	210.208	213.056	214.828	2.848	1.772
11.05	Aceh Barat	191.530	194.712	195.955	3.182	1.243
11.06	Aceh Besar	385.679	390.037	393.903	4.358	3.866
11.07	Pidie	438.083	440.231	442.450	2.148	2.219
11.08	Aceh Utara	577.310	583.350	586.851	6.040	3.501
11.09	Simeulue	90.825	92.977	93.724	2.152	747
11.10	Aceh Singkil	127.576	126.768	126.996	-808	228
11.11	Bireuen	434.517	438.615	440.350	4.098	1.735
11.12	Aceh Barat Daya	150.070	151.474	152.248	1.404	774



Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Aceh (Jiwa)			Selisih 2017 dan 2018 (Jiwa)	Selisih 2018 dan 2019 (Jiwa)
		2017	2018	2019		
11.13	Gayo Lues	97.579	99.937	101.045	2.358	1.108
11.14	Aceh Jaya	88.033	90.624	92.109	2.591	1.485
11.15	Nagan Raya	167.878	170.207	171.550	2.329	1.343
11.16	Aceh Tamiang	289.724	294.350	297.429	4.626	3.079
11.17	Bener Meriah	157.485	159.636	160.634	2.151	998
11.18	Pidie Jaya	157.942	160.115	161.430	2.173	1.315
11.71	Banda Aceh	240.462	244.689	245.779	4.227	1.090
11.72	Sabang	40.493	42.015	42.191	1.522	176
11.73	Lhokseumawe	192.596	193.395	189.505	799	-3.890
11.74	Langsa	184.057	186.432	187.388	2.375	956
11.75	Subulussalam	83.596	85.731	87.285	2.135	1.554
11	Provinsi Aceh	5.184.003	5.247.257	5.269.809	63.254	22.552

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Pada Tabel 4.2 di atas dapat dilihat adanya peningkatan jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota, kecuali di Aceh Timur dan Lhokseumawe yang mengalami penurunan jumlah penduduk masing-masing 5.368 dan 3.890 jiwa antara tahun 2018 dan 2019. Pada tabel di atas juga dapat dilihat adanya disparitas atau perbedaan jumlah yang cukup tinggi khususnya antara jumlah penduduk Kota Sabang dengan Kabupaten Aceh Utara, yakni selisih 544.660 jiwa pada tahun 2019. Selanjutnya, perkembangan jumlah penduduk di Aceh dari tahun 2017 s.d. 2019 dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.

**Gambar 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Aceh, Tahun 2017 s.d. 2019**

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 85.806 jiwa, sedangkan dari tahun 2018 sampai dengan 2019 jumlah penduduk bertambah sebesar 22.552 jiwa. Adanya penambahan penduduk ini diduga karena kenaikan angka kelahiran ataupun banyaknya pendatang atau migrasi masuk ke Aceh.

2. Rasio Kepadatan Penduduk

Rasio Kepadatan Penduduk adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah. Kepadatan penduduk juga dapat diartikan seberapa banyaknya jumlah penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu. Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun akibat perubahan jumlah penduduk secara alami (lahir-mati) ataupun karena perpindahan penduduk.

Rasio kepadatan penduduk dihitung dengan menggunakan rumus:

$$D = \frac{P}{A}$$

D = Rasio Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)

P = Jumlah Penduduk (jiwa)

A = Luas Wilayah (km²)



Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh total luas wilayah Aceh adalah 56.758,70 Km², sedangkan untuk wilayah kabupaten/kota yang memiliki luas wilayah yang terbesar adalah Kabupaten Aceh Timur dengan luas wilayah 6.286,01 Km², Selanjutnya Kabupaten Gayo Lues dengan luas wilayah 5.719,58 Km², sedangkan daerah yang memiliki luas wilayah yang terkecil adalah Kota Banda Aceh dengan luas wilayah 61,36 Km² dan Kota Sabang dengan luas wilayah 153,00 Km².

Pendekatan secara demografi, urbanisasi merupakan sebuah proses peningkatan jumlah penduduk yang berada di perkotaan sehingga proporsi penduduk di daerah tersebut semakin meningkat. Sebagai suatu wilayah industri dan pusat pelayanan jasa tentunya daerah perkotaan menjadi daya tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Beberapa hal yang menarik dari kota adalah: upah kerja lebih tinggi, banyaknya lapangan pekerjaan mulai dari tenaga kasar hingga profesional, fasilitas pelayanan sosial mudah didapatkan seperti pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, dan sarana transportasi.

Tabel 4.3 di bawah ini merupakan kondisi kepadatan penduduk di 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota berdasarkan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah pada periode tahun 2019.



Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk Tahun 2019

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Persen Luas Wilayah (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
11.01	Aceh Selatan	4.176,59	7,36	236.359	56,59
11.02	Aceh Tenggara	4.169,63	7,35	226.162	54,24
11.03	Aceh Timur	5.427,51	9,56	423.638	78,05
11.04	Aceh Tengah	4.454,04	7,85	214.828	48,23
11.05	Aceh Barat	2.758,72	4,86	195.955	71,03
11.06	Aceh Besar	2.895,64	5,10	393.903	136,03
11.07	Pidie	3.169,24	5,58	442.450	139,60
11.08	Aceh Utara	2.694,96	4,75	586.851	217,75
11.09	Simeulue	1.827,22	3,22	93.724	51,29
11.10	Aceh Singkil	1.845,88	3,25	126.996	68,79
11.11	Bireuen	1.796,31	3,16	440.350	245,14
11.12	Aceh Barat Daya	1.882,05	3,32	152.248	80,89
11.13	Gayo Lues	5.549,91	9,78	101.045	18,20
11.14	Aceh Jaya	3.877,05	6,83	92.109	23,75
11.15	Nagan Raya	3.544,91	6,25	171.550	48,39
11.16	Aceh Tamiang	2.146,99	3,78	297.429	138,53
11.17	Bener Meriah	1.904,01	3,35	160.634	84,36
11.18	Pidie Jaya	947,95	1,67	161.430	170,29
11.71	Banda Aceh	63,14	0,11	245.779	3.892,60
11.72	Sabang	122,09	0,22	42.191	345,57
11.73	Lhokseumawe	153,44	0,27	189.505	1.235,04
11.74	Langsa	175,73	0,31	187.388	1.066,34
11.75	Subulussalam	1.175,71	2,07	87.285	74,24
11	Provinsi Aceh	56.758,70	100	5.269.809	92,84

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Berdasarkan Tabel 4.3, kepadatan penduduk tertinggi terjadi di ibukota Provinsi Aceh yang menjadi pusat administrasi pemerintahan, yaitu Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk sebesar 245.779 jiwa dan rasio kepadatan penduduk sebesar 3.892,60 Jiwa/Km². Hal ini dikarenakan ibukota provinsi merupakan daerah



perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, kebudayaan dan perekonomian sehingga banyak penduduk yang datang dari luar untuk menetap di Kota Banda Aceh. Kabupaten/kota dengan kepadatan penduduk tertinggi selanjutnya adalah Kota Lhokseumawe, yaitu sebesar 1.235,04 Jiwa/Km² dan Kota Langsa sebesar 1.066,34 Jiwa/Km². Sedangkan Kabupaten Gayo Lues merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 18,20 Jiwa/Km². Kepadatan penduduk yang rendah umumnya pada wilayah tengah dan barat, hal ini disebabkan karena kondisi geografis wilayah tersebut merupakan pegunungan, sungai, lembah, rawa, hutan dan pesisir pantai, sehingga sebahagian potensi wilayahnya dipergunakan oleh masyarakat untuk pertanian, perkebunan dan perikanan.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Secara umum Angka Pertumbuhan Penduduk menggambarkan perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi penduduk.



Angka pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan rumus :

$$P_t = P_0 \cdot e^{rt}$$

P_t : Jumlah Penduduk pada tahun t

P_0 : Jumlah Penduduk pada tahun dasar/awal (0)

r : Angka Pertumbuhan Penduduk

t : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t

e : Fungsi eksponensial = 2,7182818

Tabel 4.4 berikut merupakan angka pertumbuhan penduduk Aceh pada tahun 2019.

Tabel 4.4 Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2018 (Jiwa)	Jumlah Penduduk Tahun 2019 (Jiwa)	Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019 (%)
11.01	Aceh Selatan	234.761	236.359	0,67
11.02	Aceh Tenggara	225.139	226.162	0,45
11.03	Aceh Timur	429.006	423.638	-1,26
11.04	Aceh Tengah	213.056	214.828	0,82
11.05	Aceh Barat	194.712	195.955	0,63
11.06	Aceh Besar	390.037	393.903	0,98
11.07	Pidie	440.231	442.450	0,50
11.08	Aceh Utara	583.350	586.851	0,59
11.09	Simeulue	92.977	93.724	0,79
11.10	Aceh Singkil	126.768	126.996	0,17
11.11	Bireuen	438.615	440.350	0,39
11.12	Aceh Barat Daya	151.474	152.248	0,50
11.13	Gayo Lues	99.937	101.045	1,09
11.14	Aceh Jaya	90.624	92.109	1,61
11.15	Nagan Raya	170.207	171.550	0,78
11.16	Aceh Tamiang	294.350	297.429	1,03
11.17	Bener Meriah	159.636	160.634	0,62
11.18	Pidie Jaya	160.115	161.430	0,81
11.71	Banda Aceh	244.689	245.779	0,44
11.72	Sabang	42.015	42.191	0,41
11.73	Lhokseumawe	193.395	189.505	-2,05



Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2018 (Jiwa)	Jumlah Penduduk Tahun 2019 (Jiwa)	Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019 (%)
11.74	Langsa	186.432	187.388	0,51
11.75	Subulussalam	85.731	87.285	1,78
11	Provinsi Aceh	5.247.257	5.269.809	0,42

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Berdasarkan Tabel 4.4, angka pertumbuhan penduduk di Aceh pada tahun 2019 adalah sebesar 0,42%. Kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kota Subulussalam, yaitu sebesar 1,78%, kemudian disusul Kabupaten Aceh Jaya 1,61% dan Kabupaten Gayo Lues 1,09% serta Kabupaten Aceh Singkil sebesar 0,17%. Sementara di Kota Lhokseumawe terjadi penurunan pertumbuhan penduduk sebesar 2,05% dan Kabupaten Aceh Timur 1,26%.

Gambaran perkembangan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5 Perkembangan Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017 s.d. 2019

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Angka Pertumbuhan Penduduk (%)		
		2017	2018	2019
11.01	Aceh Selatan	0,60	1,65	0,67
11.02	Aceh Tenggara	0,60	1,25	0,45
11.03	Aceh Timur	0,96	0,93	-1,26
11.04	Aceh Tengah	1,16	1,35	0,82
11.05	Aceh Barat	1,57	1,66	0,63
11.06	Aceh Besar	0,56	1,13	0,98
11.07	Pidie	0,38	0,49	0,50
11.08	Aceh Utara	0,55	1,05	0,59
11.09	Simeulue	1,96	2,37	0,79
11.10	Aceh Singkil	-1,56	-0,63	0,17
11.11	Bireuen	0,45	0,94	0,39
11.12	Aceh Barat Daya	0,99	0,94	0,50
11.13	Gayo Lues	2,59	2,42	1,09



Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Angka Pertumbuhan Penduduk (%)		
		2017	2018	2019
11.14	Aceh Jaya	2,57	2,94	1,61
11.15	Nagan Raya	0,42	1,39	0,78
11.16	Aceh Tamiang	0,99	1,60	1,03
11.17	Bener Meriah	2,21	1,37	0,62
11.18	Pidie Jaya	0,52	1,38	0,81
11.71	Banda Aceh	0,99	1,76	0,44
11.72	Sabang	1,43	3,76	0,41
11.73	Lhokseumawe	1,09	0,41	-2,05
11.74	Langsa	1,19	1,29	0,51
11.75	Subulussalam	3,22	2,55	1,78
11	Provinsi Aceh	0,87	1,22	0,42

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Dari Tabel 4.5 di atas, dari tahun 2017 sampai dengan 2019 terjadi kenaikan dan juga penurunan angka pertumbuhan penduduk di Aceh. Perkembangan angka pertumbuhan penduduk menurut kabupaten/kota tidaklah sama, di mana terjadi kecenderungan kenaikan dan penurunan yang berbeda setiap tahunnya. Terjadinya kenaikan dan penurunan angka pertumbuhan penduduk ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran, migrasi penduduk, pemutakhiran dan pembersihan data anomali dan ganda yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Ilmu pengetahuan tentang kependudukan dikenal istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin, atau yang sering disebut struktur umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk dapat dilihat dalam umur satu tahunan yang disebut dengan umur tunggal yang dikelompokkan dalam lima tahunan.



1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Distribusi penduduk menurut umur dikelompokkan menurut umur satu tahunan atau umur tunggal (single age) dan lima tahunan, namun dapat juga dikelompokkan menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan, seperti pengelompokan penduduk menurut usia sekolah.

Selain pengelompokan berdasarkan distribusi umur penduduk, terdapat juga pengelompokan penduduk berdasarkan struktur umur penduduk yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu penduduk usia muda (0-14) tahun penduduk usia produktif (15-59) tahun dan penduduk usia lanjut (>60).

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menghitung jumlah penduduk dapat menggunakan rumus :

P_t = jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = jumlah penduduk pada tahun dasar
(0)

B (*Birth*) = jumlah kelahiran selama periode 0-t

D (*death*) = jumlah kematian selama periode 0-t

M_i = jumlah migrasi masuk selama periode 0-t

M_0 = jumlah migrasi masuk selama periode 0-t

$$P_t = P_0 + (B-D) + (M_i - M_0)$$



Namun demikian, dengan telah berjalannya sistem registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, maka data jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Jumlah penduduk dapat disajikan dalam bentuk tabel menurut wilayah dan jenis kelamin.

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	00-04	245.332	9,28	228.974	8,72	474.306	9,00
2	05-09	272.529	10,31	256.102	9,76	528.631	10,03
3	10-14	266.481	10,08	250.121	9,53	516.602	9,80
4	15-19	239.157	9,04	226.356	8,62	465.513	8,83
5	20-24	225.142	8,51	217.756	8,29	442.898	8,40
6	25-29	214.489	8,11	210.595	8,02	425.084	8,07
7	30-34	218.244	8,25	221.175	8,42	439.419	8,34
8	35-39	207.303	7,84	209.772	7,99	417.075	7,91
9	40-44	176.255	6,66	181.744	6,92	357.999	6,79
10	45-49	159.237	6,02	158.917	6,05	318.154	6,04
11	50-54	124.793	4,72	130.186	4,96	254.979	4,84
12	55-59	100.178	3,79	107.265	4,09	207.443	3,94
13	60-64	71.797	2,71	75.383	2,87	147.180	2,79
14	65-69	53.757	2,03	57.761	2,20	111.518	2,12
15	70-74	29.113	1,10	37.633	1,43	66.746	1,27
16	>=75	40.727	1,54	55.535	2,12	96.262	1,83
	Jumlah	2.644.534	100	2.625.275	100	5.269.809	100

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.



Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut kelompok dan jenis kelamin tertinggi adalah pada kelompok umur antara (05-09) tahun, yaitu 528,631 jiwa (10,03%) dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 272.529 jiwa dan perempuan sebanyak 256.102 jiwa. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin terendah adalah pada kelompok umur antara (70-74) tahun, yakni sebesar 1,27% atau sebanyak 66.746 jiwa. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki pada kelompok umur ini adalah sebanyak 29.113 jiwa dan perempuan sebanyak 37.633 jiwa. Jumlah penduduk usia balita dan anak pada kelompok umur antara (00-09) tahun adalah sebesar 1.002.937 jiwa (19,03%) dan usia muda pada kelompok umur antara (10-14) tahun sebesar 516.602 jiwa (9,80%).

Jumlah penduduk usia produktif pada kelompok umur antara (15-64) tahun sebesar 3.475.744 jiwa (65,95%) dengan jumlah terbesar berada pada kelompok umur (15-19) tahun, yaitu sebesar 465.513 jiwa (8,83%) yang didominasi jenis kelamin laki-laki sebanyak 239.157 jiwa (9,04%), dan perempuan sebanyak 226.356 jiwa (8,62%). Jika dilihat berdasarkan pengelompokan umur (15-64) tahun, kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar kelompok tersebut merupakan penduduk usia kerja (usia produktif) dan sisanya merupakan penduduk lanjut usia (≥ 65 tahun), yaitu sebesar 274.526 jiwa (5,20%).

a. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah pada waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per



100 penduduk perempuan. Besar kecilnya Rasio Jenis Kelamin di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

- 1) Rasio Jenis Kelamin waktu lahir (*Sex Ratio At Birth*). Para demografis mengajukan bahwa perbandingan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan pada waktu lahir berkisar antara 103-105 bayi laki-laki per 100 bayi perempuan;
- 2) Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan. Jika kematian laki-laki lebih besar daripada jumlah kematian perempuan, maka rasio jenis kelamin semakin kecil;
- 3) Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan. Jika suatu daerah memiliki rasio jenis kelamin lebih kecil dari 100, maka hal ini berarti di daerah tersebut lebih banyak penduduk perempuan.

Data mengenai Rasio Jenis Kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara merata.

Rasio jenis kelamin dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$RJK = \left(\frac{\sum L}{\sum P} \right) \times K$$

RJK	=	Rasio Jenis Kelamin
$\sum L$	=	Jumlah Penduduk Laki-Laki
$\sum P$	=	Jumlah Penduduk Perempuan
K	=	Konstanta (100 penduduk perempuan)

Rasio jenis kelamin menurut kabupaten pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.7 :



Tabel 4.7 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten 2019

Kode Kab/Kota	Kabupaten Kota	Laki-laki		Perempuan		Sex Ratio
		Σ	%	Σ	%	
11.01	Aceh Selatan	118.442	4,48	117.917	4,49	100
11.02	Aceh Tenggara	113.536	4,29	112.626	4,29	101
11.03	Aceh Timur	213.182	8,06	210.456	8,02	101
11.04	Aceh Tengah	108.805	4,11	106.023	4,04	103
11.05	Aceh Barat	99.441	3,76	96.514	3,68	103
11.06	Aceh Besar	198.103	7,49	195.800	7,46	101
11.07	Pidie	220.104	8,32	222.346	8,47	99
11.08	Aceh Utara	292.424	11,06	294.427	11,22	99
11.09	Simeulue	47.995	1,81	45.729	1,74	105
11.10	Aceh Singkil	64.232	2,43	62.764	2,39	102
11.11	Bireuen	216.781	8,20	223.569	8,52	97
11.12	Aceh Barat Daya	76.966	2,91	75.282	2,87	102
11.13	Gayo Lues	50.847	1,92	50.198	1,91	101
11.14	Aceh Jaya	46.762	1,77	45.347	1,73	103
11.15	Nagan Raya	86.591	3,27	84.959	3,24	102
11.16	Aceh Tamiang	150.405	5,69	147.024	5,60	102
11.17	Bener Meriah	81.325	3,08	79.309	3,02	103
11.18	Pidie Jaya	80.501	3,04	80.929	3,08	99
11.71	Banda Aceh	123.917	4,69	121.862	4,64	102
11.72	Sabang	21.280	0,80	20.911	0,80	102
11.73	Lhokseumawe	94.187	3,56	95.318	3,63	99
11.74	Langsa	94.418	3,57	92.970	3,54	102
11.75	Subulussalam	44.290	1,67	42.995	1,64	103
11	Provinsi Aceh	2.644.534	100	2.625.275	100	101

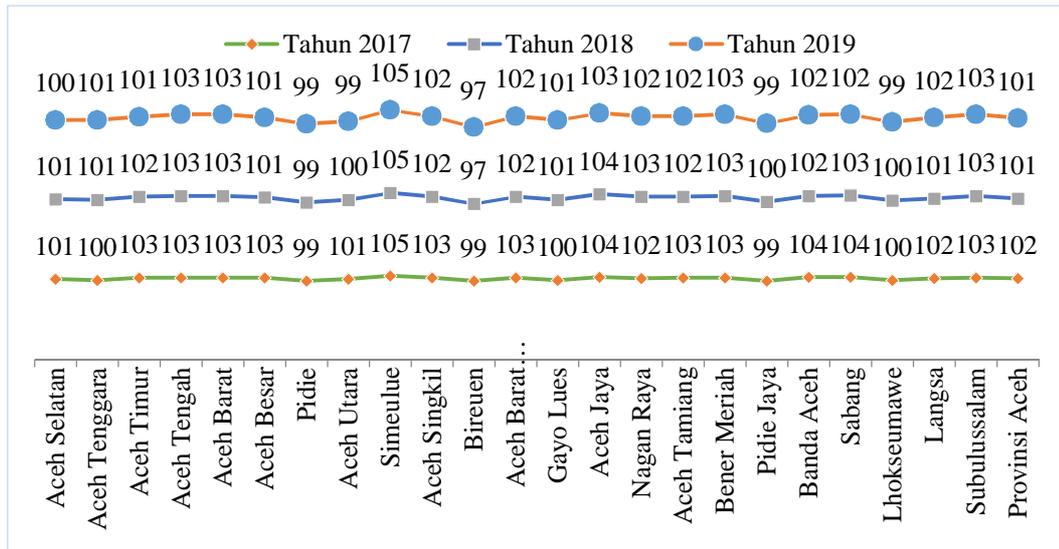
Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Berdasarkan tabel di atas hampir di semua kabupaten/kota Rasio Jenis Kelamin berada di atas 100, kecuali lima kabupaten/kota yaitu Bireun (97), Pidie (99), Aceh Utara (99), Pidie Jaya (99), dan Lhokseumawe (99). Lima kabupaten/kota tersebut menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada laki-laki yaitu antara 97-99, artinya adalah dari 100 perempuan terdapat 97 laki-laki di Bireun dan 99 laki-laki di empat Kabupaten/kota lainnya.



Selanjutnya, Perkembangan Rasio Jenis Kelamin dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2 Perkembangan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2017 s.d. 2019



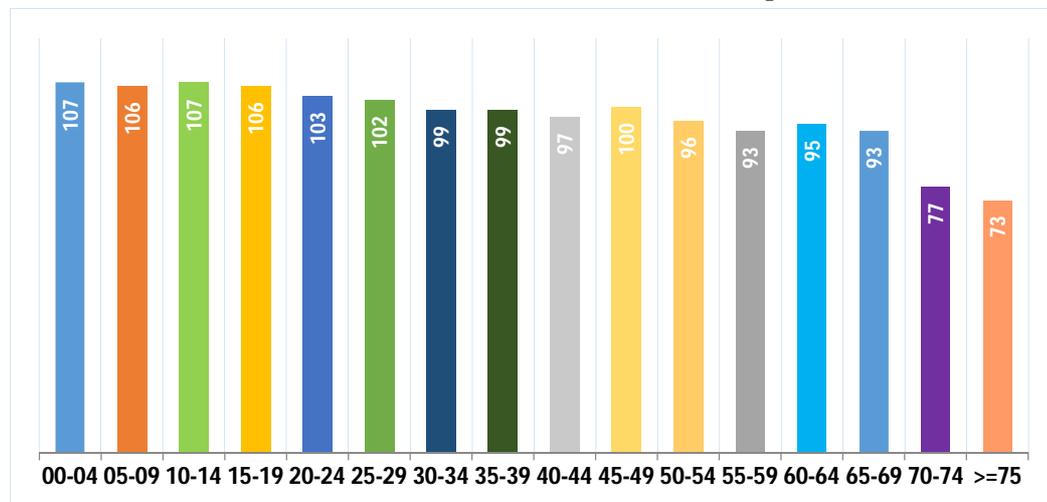
Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa, Perkembangan Rasio Jenis Kelamin tahun 2017 sampai dengan 2019 menggambarkan bahwa Kabupaten Simeulue merupakan wilayah yang memiliki nilai rasio jenis kelamin tertinggi yaitu sebesar 105, yang berarti dari 100 perempuan terdapat 105 laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Simeulue penduduk laki-laki masih mendominasi dari penduduk perempuan. Sebaliknya, Kabupaten Bireuen memiliki penduduk perempuan yang lebih banyak dari penduduk laki-laki yang dapat dilihat dari nilai rasio jenis kelamin pada wilayah in, yaitu sebesar 97 pada tahun 2019.

Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur pada tahun 2019 dapat dilihat melalui Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur



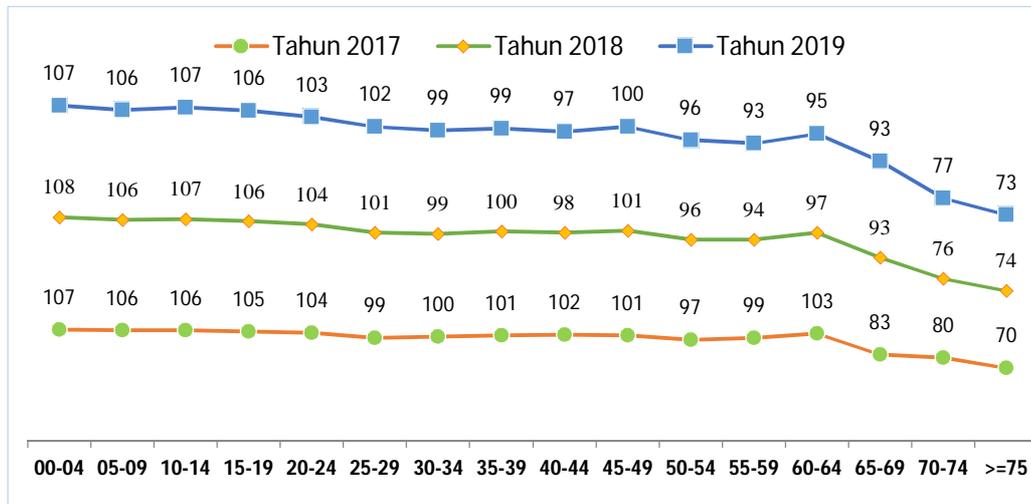
Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Dari gambar 4.3 diketahui bahwa pada tahun 2019 berdasarkan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur, kelompok usia balita dan usia muda didominasi oleh proporsi penduduk laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan. Sedangkan pada kelompok usia produktif didominasi oleh penduduk perempuan, dimana pada kelompok usia produktif ini besaran nilai rasio berbeda-beda pada setiap kelompok umur. Pada kelompok umur (30-34) tahun, (40-44) tahun, dan (50-64) tahun jumlah proporsi penduduk laki-laki lebih sedikit dengan nilai rasio berkisar 93-100. Pada kelompok usia lanjut (≥ 65) tahun menunjukkan proporsi perempuan juga lebih mendominasi daripada penduduk laki-laki.

Kecilnya Rasio Jenis Kelamin laki-laki terhadap perempuan menandakan bahwa proporsi jumlah laki-laki lebih kecil dibandingkan perempuan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor migrasi atau kematian laki-laki lebih besar daripada jumlah kematian perempuan. Perkembangan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut:



Gambar 4.4 Perkembangan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2017 s.d. 2019



Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Jika dilihat Gambar 4.4, pada tahun 2018 terjadi penurunan rasio jenis kelamin pada delapan kelompok umur. Kemudian pada tahun 2019 kelompok umur (30-34) tahun hingga kelompok usia lanjut (>65) kembali mengalami penurunan rasio jenis kelamin. Jika dilihat dari kelompok umur, proporsi penduduk perempuan lebih besar pada kelompok umur (50-54) tahun dan kelompok umur tua yakni (>65) tahun. Ini menunjukkan teori yang mengatakan bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi di bandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki.

b. Piramida Penduduk

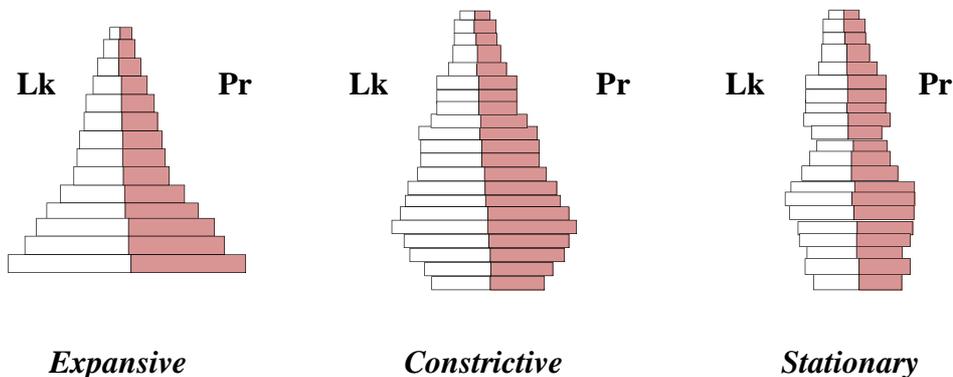
Komposisi umur dan jenis kelamin suatu penduduk secara grafik dapat digambarkan ke dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk



menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas, dan perpindahan penduduk (mobilitas).

Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase; Sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan; Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka (75+); dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Piramida penduduk dibedakan atas tiga ciri, yaitu ekspansif (*ekspansive*), konstriktif (*constrictive*), dan stasioner (*stationary*)



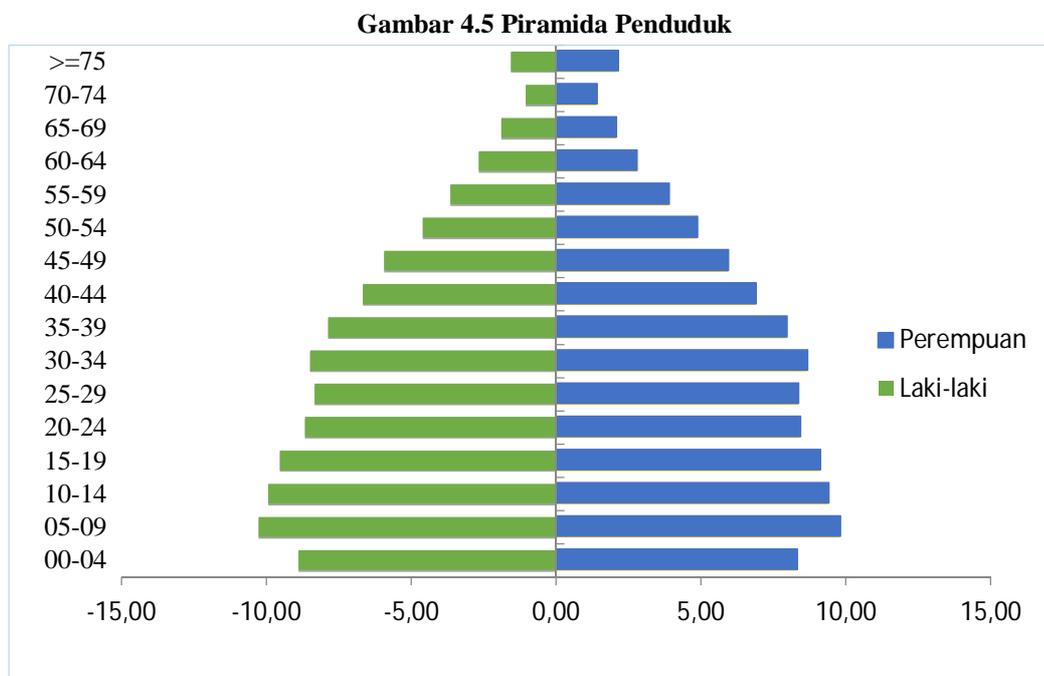
Expansive : Lebar pada bagian dasar piramida, yang menunjukkan proporsi penduduk muda yang besar dan kecilnya proporsi penduduk tua, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Constrictive : Bagian dasar piramida kecil dan sebagian besar penduduk masih berada dalam kelompok umur muda.



Stationary : Bagian dasar piramida kecil, penduduk dalam setiap kelompok umur hampir sama banyaknya dan mengecil pada usia tua.

Dengan melihat proporsi dari penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sifat karakteristik suatu penduduk, seperti jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2019 yang digambarkan dalam bentuk piramida yang dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut:



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Dari Gambar 4.5, piramida penduduk Aceh menunjukkan struktur penduduk konstruktif dengan struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya. Pada grafik piramida menunjukkan bahwa jumlah terbesar menurut kelompok umur adalah umur (05-09) tahun, yaitu 10.31%. Persentase penduduk yang berada pada kelompok umur (≤ 34) tahun adalah sebesar 62,47%, sedangkan persentase penduduk yang berada pada



kelompok umur (> 34) tahun adalah sebesar 37,53%. Penduduk yang berada pada kelompok umur (< 5) tahun mengalami peningkatan sebesar 8,61% dari tahun 2018 menjadi 9,00%. Begitu pula penduduk pada kelompok umur (≥ 65 tahun) juga mengalami peningkatan dari 5,05% pada tahun 2018 menjadi sebesar 5,20% pada tahun 2019.

c. Rasio Ketergantungan

Penduduk muda berusia (<15) tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia (>65) tahun juga dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun. Penduduk usia (15-64) tahun merupakan penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio Ketergantungan atau yang dikenal dengan istilah (Dependency Ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan banyaknya usia non-produktif (0-14) tahun dan (>65) dengan banyaknya penduduk usia produktif (15-64) tahun. Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk non-produktif. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64) tahun untuk membiayai hidup penduduk belum produktif (0-14) tahun) dan tidak produktif lagi (>65 tahun).



Rasio Ketergantungan atau (Rasio Beban Tanggungan) yang dibicarakan dalam studi demografi sering disebut (Age Dependency Ratio). Hal ini disebabkan karena rasio ini lebih merupakan perbandingan antara penduduk muda dan penduduk tua dengan penduduk usia kerja.

- 1) Rasio ketergantungan muda;
- 2) Rasio ketergantungan tua;
- 3) Rasio ketergantungan total.

Dengan memperhatikan kedua Rasio Ketergantungan tersebut, untuk usia muda dan usia lanjut, kita dapat mengetahui kelompok umur mana yang berkontribusi paling atau sedikit dalam rasio ketergantungan total. Meskipun tidak akurat secara ekonomi, rasio ketergantungan dapat menggambarkan banyaknya penduduk yang harus ditanggung penduduk usia kerja. Untuk melihat gambaran awal, dapat kita lihat jumlah penduduk yang tertera pada gambar di bawah yang terbagi dalam tiga kriteria, yaitu :

- a) Umur muda (0-14) tahun;
- b) Umur produktif (15-64) tahun;
- c) Umur tua (>65) tahun.

Rasio Ketergantungan dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} RK_{\text{muda}} &= \frac{P_{0-14}}{P_{15-64}} \\ RK_{\text{tua}} &= \frac{P_{65+}}{P_{15-64}} \\ RK_{\text{total}} &= \frac{(P_{0-14}) + (P_{65+})}{P_{15-64}} \end{aligned}$$

RK_{Total} = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Muda dan Tua

RK_{Muda} = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Muda

RK_{Tua} = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Tua

$P_{(0-14)}$ = Jumlah Penduduk Usia Muda (0-14 tahun)

$P_{(65+)}$ = Jumlah Penduduk Usia Tua (>65 tahun)

$P_{(15-64)}$ = Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)



Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Berumur Muda, Umur Produktif, Umur Tua dan Rasio Ketergantungan

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Umur Muda	Umur Produktif	Umur Tua	(RK) Umur Muda	(RK) Umur Tua	(RK) Total
11.01	Aceh Selatan	57.582	163.855	14.922	35,14	9,11	44,25
11.02	Aceh Tenggara	67.182	149.453	9.527	44,95	6,37	51,33
11.03	Aceh Timur	136.363	269.708	17.567	50,56	6,51	57,07
11.04	Aceh Tengah	63.216	141.210	10.402	44,77	7,37	52,13
11.05	Aceh Barat	52.726	132.796	10.433	39,70	7,86	47,56
11.06	Aceh Besar	116.980	254.642	22.281	45,94	8,75	54,69
11.07	Pidie	116.226	295.974	30.250	39,27	10,22	49,49
11.08	Aceh Utara	176.742	376.997	33.112	46,88	8,78	55,66
11.09	Simeulue	26.663	62.754	4.307	42,49	6,86	49,35
11.10	Aceh Singkil	41.621	81.620	3.755	50,99	4,60	55,59
11.11	Bireuen	125.590	287.291	27.469	43,72	9,56	53,28
11.12	Aceh Barat Daya	38.768	106.197	7.283	36,51	6,86	43,36
11.13	Gayo Lues	30.336	66.742	3.967	45,45	5,94	51,40
11.14	Aceh Jaya	27.663	59.379	5.067	46,59	8,53	55,12
11.15	Nagan Raya	45.193	117.064	9.293	38,61	7,94	46,54
11.16	Aceh Tamiang	85.945	197.385	14.099	43,54	7,14	50,68
11.17	Bener Meriah	48.827	104.298	7.509	46,81	7,20	54,01
11.18	Pidie Jaya	43.108	106.554	11.768	40,46	11,04	51,50
11.71	Banda Aceh	74.804	161.053	9.922	46,45	6,16	52,61
11.72	Sabang	12.354	27.561	2.276	44,82	8,26	53,08
11.73	Lhokseumawe	54.093	128.116	7.296	42,22	5,69	47,92
11.74	Langsa	48.262	129.556	9.570	37,25	7,39	44,64
11.75	Subulussalam	29.295	55.539	2.451	52,75	4,41	57,16
11	Provinsi Aceh	1.519.539	3.475.744	274.526	43,72	7,90	51,62

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Dari Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan umur produktif (15-64) tahun terbanyak pada tahun 2019 berada di Kabupaten Aceh Utara sebesar 376.997 jiwa, Kabupaten Pidie sebesar 295.974 jiwa dan Kabupaten Bireuen sebesar 287.291 jiwa. Sedangkan untuk umur produktif terendah berada di

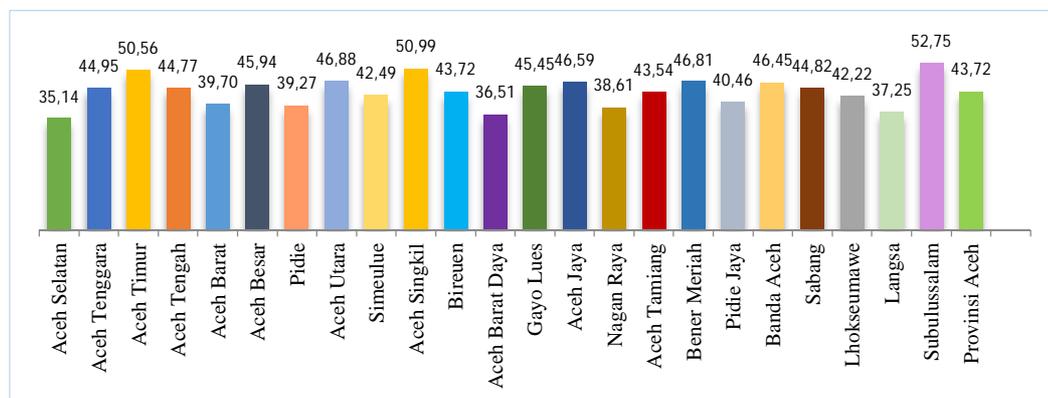


Kota Sabang sebesar 27.561 jiwa. Jumlah penduduk dengan umur muda (0-14) tahun terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara sebesar 176.742 jiwa, Kabupaten Aceh Timur 136.363 jiwa dan Kabupaten Bireuen sebesar 125.590 jiwa. Kota Sabang juga menjadi kabupaten/kota dengan umur muda terendah pada tahun 2019, yaitu sebesar 12.354 jiwa. Untuk jumlah penduduk dengan umur tua (>65) tahun terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara sebesar 33.112 jiwa dan Kabupaten Pidie sebesar 30.250 jiwa.

1) Rasio Ketergantungan Muda

Rasio Ketergantungan Muda adalah perbandingan jumlah penduduk umur (0-14) tahun dengan jumlah penduduk umur (15-64) tahun. Rasio ketergantungan muda menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut ini:

Gambar 4.6 Rasio Ketergantungan Muda



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Rasio Ketergantungan Muda (0-14) tahun di Aceh sebesar 43,72 dimana kabupaten/kota yang tertinggi berada di Kota Subulussalam yaitu sebesar 52,75, Kabupaten Aceh Singkil sebesar 50,99, dan Kabupaten Aceh Timur sebesar 50,56. Adapun Rasio Ketergantungan Muda terendah berada di Kabupaten Aceh Selatan,

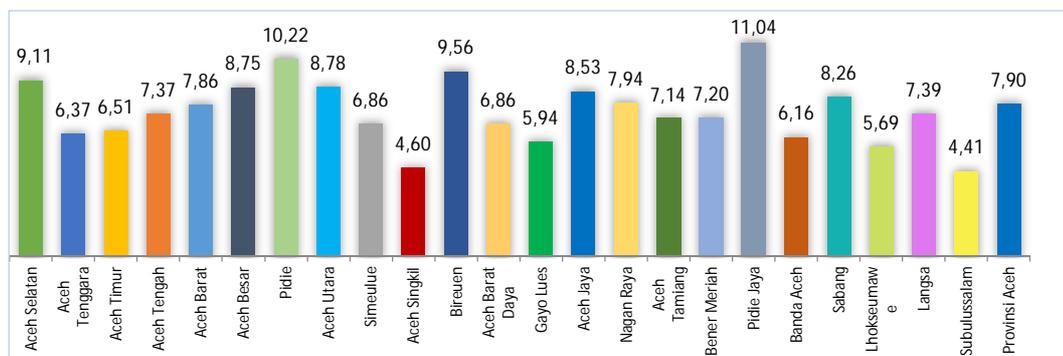


yaitu sebesar 35,14, Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 36,51, dan Kota Langsa sebesar 37,25.

2) Rasio Ketergantungan Tua

Rasio Ketergantungan Tua adalah perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia (15-64) tahun. Rasio ketergantungan tua menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 4.7 berikut ini.

Gambar 4.7 Rasio Ketergantungan Tua



Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

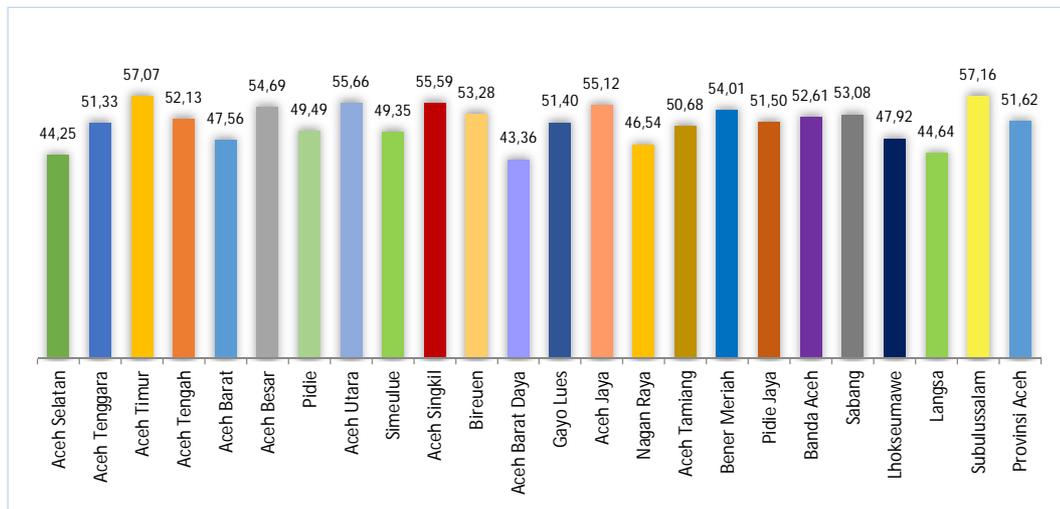
Dari Gambar 4.7 dapat dilihat bahwa, Rasio Ketergantungan Tua tertinggi berada di Kabupaten Pidie Jaya sebesar, yaitu sebesar 11,04 dan Kabupaten Pidie sebesar 10,22. Sedangkan kabupaten/kota dengan Rasio Ketergantungan Tua terendah berada di Kota Subulussalam, yaitu sebesar 4,41 dan Kabupaten Aceh Singkil sebesar 4,60.

3) Rasio Ketergantungan Total

Rasio Ketergantungan Total adalah menggambarkan penduduk produktif (15–64) tahun menanggung beban atas penduduk yang belum produktif atau usia muda (0–14) tahun dan penduduk yang tidak produktif lagi atau usia tua (>65) tahun. Adapun Rasio Ketergantungan Total dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut ini:



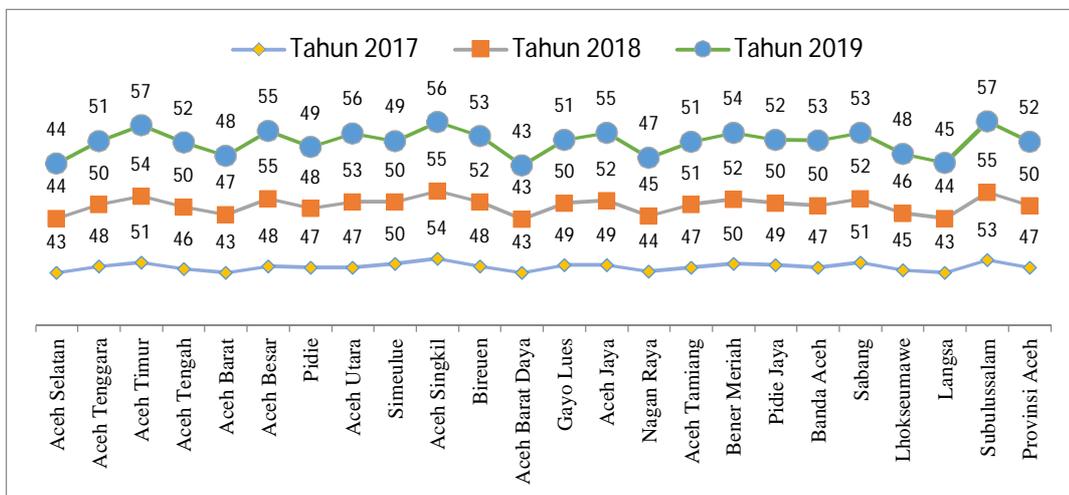
Gambar 4.8 Rasio Ketergantungan Total



Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan Total di Aceh adalah 51,62 per 100 penduduk usia kerja, hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Aceh mempunyai tanggungan sekitar 52 penduduk usia non-produktif.

Rasio Ketergantungan Total Kabupaten/Kota tertinggi berada di Kota Subulussalam adalah 57,16 per 100 penduduk usia kerja, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kota Subulussalam mempunyai tanggungan sekitar 57 penduduk usia non produktif. Untuk membandingkan Rasio Ketergantungan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut ini:

**Gambar 4.9 Perkembangan Rasio Ketergantungan Total Tahun 2017 s.d. 2019**

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Dari Gambar 4.9, dapat dilihat bahwa Rasio Ketergantungan Total tertinggi pada tahun 2019 yaitu Subulussalam dan Aceh Timur dengan nilai rasio sebesar 57. Hal ini menunjukkan bahwa, kedua kabupaten ini memiliki beban atau tanggungan yang besar pada penduduk produktif (15-64) tahun terhadap penduduk non produktif baik usia muda maupun usia tua.

2. Jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin

a. Angka perkawinan kasar

Angka Perkawinan Kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu. Angka Perkawinan Kasar merupakan indikator yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, tetapi bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.



Angka Perkawinan Kasar dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\bar{M} = \frac{M}{P} \times K$$

\bar{M} = Angka Perkawinan Kasar

M = Jumlah perkawinan dalam satu tahun

P = Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun yang sama

$P = (Po+Pt)/2]$, dimana Po adalah jumlah penduduk awal tahun dan Pt adalah jumlah penduduk akhir tahun

K = Konstanta = 1000

Tabel 4.9 Angka Perkawinan Kasar Menurut Kabupaten 2019

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Perkawinan Tahun 2019 **	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2019	Jumlah Penduduk \geq 15 Tahun Pada Pertengahan Tahun 2019	Angka Perkawinan Kasar
11.01	Aceh Selatan	2.114	234.267	178.744	9,02
11.02	Aceh Tenggara	1.578	223.407	158.506	7,06
11.03	Aceh Timur	3.836	419.165	287.171	9,15
11.04	Aceh Tengah	2.091	212.315	151.514	9,85
11.05	Aceh Barat	1.561	194.296	143.150	8,03
11.06	Aceh Besar	2.915	391.202	276.711	7,45
11.07	Pidie	3.864	437.537	325.978	8,83
11.08	Aceh Utara	5.990	579.859	410.009	10,33
11.09	Simeulue	614	92.917	67.023	6,61
11.10	Aceh Singkil	808	125.653	85.338	6,43
11.11	Bireuen	3.843	436.094	314.704	8,81
11.12	Aceh Barat Daya	1.294	150.998	113.426	8,57
11.13	Gayo Lues	1.277	99.929	70.573	12,78
11.14	Aceh Jaya	661	91.225	64.423	7,25
11.15	Nagan Raya	1.440	169.714	126.103	8,48
11.16	Aceh Tamiang	3.843	294.849	211.322	13,03
11.17	Bener Meriah	1.574	158.851	111.773	9,91



Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Perkawinan Tahun 2019 **	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2019	Jumlah Penduduk \geq 15 Tahun Pada Pertengahan Tahun 2019	Angka Perkawinan Kasar
11.18	Pidie Jaya	1.704	159.785	118.270	10,66
11.71	Banda Aceh	1.915	243.513	170.907	7,86
11.72	Sabang	217	41.850	29.828	5,19
11.73	Lhokseumawe	1.469	187.957	135.378	7,82
11.74	Langsa	1.443	186.004	139.062	7,76
11.75	Subulussalam	790	86.515	57.922	9,13
11.	Provinsi Aceh	46.841	5.217.902	3.747.835	8,98

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa Angka Perkawinan Kasar di Aceh sebesar 8,98 yang berarti dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun 2019 terjadi 8 sampai 9 kali perkawinan. Angka Perkawinan Kasar tertinggi terjadi di Aceh Tamiang sebesar 13,03 yang berarti dari 1.000 penduduk pertengahan tahun 2019 di Aceh Tamiang terjadi 13 kali perkawinan.

b. Angka perkawinan umum

Angka Perkawinan Umum menunjukkan banyaknya perkawinan pada suatu periode tertentu per 1.000 penduduk berusia di atas 15 tahun pada pertengahan periode yang sama di suatu wilayah. Angka Perkawinan Umum merupakan indikator yang lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perkawinan Kasar karena dalam perhitungannya hanya memasukkan penduduk yang berusia kawin saja yaitu yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut.



Angka Perkawinan Umum (AKU) ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$M_u = \frac{M}{P_{15+}} \times K$$

M_u = Angka Perkawinan Kasar

M = Jumlah perkawinan dalam satu tahun

P_{15+} = Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas

K = Konstanta = 1000

Tabel 4.10 Angka Perkawinan Umum Menurut Kabupaten 2019

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Perkawinan Tahun 2019 **	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2019	Jumlah Penduduk \geq 15 Tahun Pada Pertengahan Tahun 2019	Angka Perkawinan Umum
11.01	Aceh Selatan	2.114	234.267	178.744	11,83
11.02	Aceh Tenggara	1.578	223.407	158.506	9,96
11.03	Aceh Timur	3.836	419.165	287.171	13,36
11.04	Aceh Tengah	2.091	212.315	151.514	13,80
11.05	Aceh Barat	1.561	194.296	143.150	10,90
11.06	Aceh Besar	2.915	391.202	276.711	10,53
11.07	Pidie	3.864	437.537	325.978	11,85
11.08	Aceh Utara	5.990	579.859	410.009	14,61
11.09	Simeulue	614	92.917	67.023	9,16
11.10	Aceh Singkil	808	125.653	85.338	9,47
11.11	Bireuen	3.843	436.094	314.704	12,21
11.12	Aceh Barat Daya	1.294	150.998	113.426	11,41
11.13	Gayo Lues	1.277	99.929	70.573	18,09
11.14	Aceh Jaya	661	91.225	64.423	10,26
11.15	Nagan Raya	1.440	169.714	126.103	11,42
11.16	Aceh Tamiang	3.843	294.849	211.322	18,19
11.17	Bener Meriah	1.574	158.851	111.773	14,08
11.18	Pidie Jaya	1.704	159.785	118.270	14,41
11.71	Banda Aceh	1.915	243.513	170.907	11,20
11.72	Sabang	217	41.850	29.828	7,28
11.73	Lhokseumawe	1.469	187.957	135.378	10,85
11.74	Langsa	1.443	186.004	139.062	10,38
11.75	Subulussalam	790	86.515	57.922	13,64
11.	Provinsi Aceh	46.841	5.217.902	3.747.835	12,50

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.



Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa Angka Perkawinan Umum di Aceh sebesar 12,50 yang berarti dari 1.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas di Aceh pada tahun 2019 terjadi 12 sampai 13 kali perkawinan. Angka Perkawinan Umum tertinggi terjadi di Aceh Tamiang sebesar 18,19 yang berarti dari 1.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas di Aceh Tamiang pada pertengahan tahun 2019 terjadi 18 kali perkawinan.

c. Angka perkawinan menurut kelompok umur

Pembahasan selanjutnya adalah jumlah penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur dan status perkawinan. Untuk menghitung Angka Perkawinan Spesifik (Angka Perkawinan Menurut Umur) menggunakan rumus :

m_i^s : Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur (i) dan jenis kelamin (s)

$$m_i^s = \frac{M_i^s}{P_i^s} \times K$$

M_i^s : Jumlah perkawinan pada kelompok umur (i) dan jenis kelamin (s) pada tahun tertentu

P_i^s : Jumlah penduduk kelompok umur (i) dan jenis kelamin (s). Pada pertengahan tahun yang sama.

Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan

No	Kelompok Umur	Belum Kawin (Jiwa)		Kawin (Jiwa)		Cerai Hidup (Jiwa)		Cerai Mati (Jiwa)		Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	00-04	474.305	17,35	1	0,00	0	0,00	0	0,00	474.306	9,00
2	05-09	528.629	19,34	2	0,00	0	0,00	0	0,00	528.631	10,03
3	10-14	516.590	18,90	11	0,00	1	0,00	0	0,00	516.602	9,80
4	15-19	459.123	16,80	6.355	0,28	29	0,06	6	0,00	465.513	8,83
5	20-24	364.578	13,34	77.436	3,44	715	1,38	169	0,07	442.898	8,40
6	25-29	200.836	7,35	220.985	9,81	2.544	4,90	719	0,31	425.084	8,07
7	30-34	91.691	3,35	339.826	15,08	5.367	10,34	2.535	1,10	439.419	8,34
8	35-39	44.055	1,61	360.103	15,98	7.242	13,96	5.675	2,45	417.075	7,91
9	40-44	22.568	0,83	316.740	14,06	7.851	15,13	10.840	4,69	357.999	6,79



No	Kelompok Umur	Belum Kawin (Jiwa)		Kawin (Jiwa)		Cerai Hidup (Jiwa)		Cerai Mati (Jiwa)		Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
10	45-49	13.500	0,49	279.644	12,41	7.705	14,85	17.305	7,48	318.154	6,04
11	50-54	8.042	0,29	215.444	9,56	6.531	12,59	24.962	10,80	254.979	4,84
12	55-59	4.603	0,17	166.186	7,38	5.391	10,39	31.263	13,52	207.443	3,94
13	60-64	2.473	0,09	109.441	4,86	3.452	6,65	31.814	13,76	147.180	2,79
14	65-69	1.357	0,05	75.483	3,35	2.389	4,60	32.289	13,97	111.518	2,12
15	70-74	645	0,02	39.215	1,74	1.223	2,36	25.663	11,10	66.746	1,27
16	>=75	642	0,02	46.193	2,05	1.454	2,80	47.973	20,75	96.262	1,83
		2.733.637	100,00	2.253.065	100,00	51.894	100,00	231.213	100,00	5.269.809	100,00

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Berdasarkan tabel 4.11 di atas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tertinggi menurut kelompok umur dan status perkawinan (belum kawin dan kawin) dapat diklasifikasikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Status Belum Kawin: (05 - 09) tahun sebesar 528.629 jiwa;
- 2) Status Kawin: (35 -39) tahun sebesar 360.103 jiwa.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terendah menurut kelompok umur dan status perkawinan, dapat diklasifikasikan perinciannya sebagai berikut:

- 1) Status Belum Kawin: (>=75) tahun sebesar 642 jiwa;
- 2) Status Kawin: (00-04) tahun sebesar 1 jiwa.

Terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tertinggi menurut kelompok umur dan status perkawinan (cerai hidup dan cerai mati), dapat diklasifikasikan perinciannya sebagai berikut:

- 1) Status Cerai Hidup: (40-44) tahun sebesar 7.851 jiwa;
- 2) Status Cerai Mati: (\geq 75) tahun sebesar 47.973 jiwa.



Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terendah menurut kelompok umur dan status perkawinan, dapat diklasifikasikan perinciannya sebagai berikut:

- 1) Status Cerai Hidup: (10-14) tahun sebesar 1 jiwa;
- 2) Status Cerai Mati: (15-19) tahun sebesar 6 jiwa.

Tabel 4.12 Jumlah Penduduk Laki-laki Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan

No	Kelompok Umur	Belum Kawin		Kawin		Cerai hidup		Cerai Mati		Total	
		(Jiwa)		(Jiwa)		(Jiwa)		(Jiwa)		(Jiwa)	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	00-04	245.331	9	1	0,00	0	0,00	0	0,00	245.332	9,28
2	05-09	272.528	10	1	0,00	0	0,00	0	0,00	272.529	10,31
3	10-14	266.479	10	2	0,00	0	0,00	0	0,00	266.481	10,08
4	15-19	238.760	9	395	0,02	1	0,00	1	0,00	239.157	9,04
5	20-24	210.696	8	14.343	0,64	92	0,18	11	0,00	225.142	8,51
6	25-29	140.781	5	73.096	3,24	534	1,03	78	0,03	214.489	8,11
7	30-34	66.794	2	149.710	6,64	1.469	2,83	271	0,12	218.244	8,25
8	35-39	29.731	1	174.891	7,76	2.131	4,11	550	0,24	207.303	7,84
9	40-44	12.800	0	160.452	7,12	2.115	4,08	888	0,38	176.255	6,66
10	45-49	6.209	0	149.608	6,64	2.167	4,18	1.253	0,54	159.237	6,02
11	50-54	3.121	0	118.047	5,24	1.707	3,29	1.918	0,83	124.793	4,72
12	55-59	1.684	0	94.627	4,20	1.338	2,58	2.529	1,09	100.178	3,79
13	60-64	891	0	67.137	2,98	926	1,78	2.843	1,23	71.797	2,71
14	65-69	481	0	49.576	2,20	646	1,24	3.054	1,32	53.757	2,03
15	70-74	213	0	26.104	1,16	325	0,63	2.471	1,07	29.113	1,10
16	>=75	183	0	34.128	1,51	470	0,91	5.946	2,57	40.727	1,54
		1.496.682	55	1.112.118	49,36	13.921	26,83	21.813	9,43	2.644.534	100,00

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah

Berdasarkan tabel 4.12 terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki tertinggi menurut kelompok umur dan status perkawinan (belum kawin dan kawin), dapat diklasifikasikan perinciannya sebagai berikut:

- 1) Status Belum Kawin: (05-09) tahun sebesar 272.528 jiwa;
- 2) Status Kawin: (35-39) tahun sebesar 174.891 jiwa.



Adapun jumlah penduduk laki-laki terendah menurut kelompok umur dan status perkawinan, dapat diklasifikasikan perinciannya sebagai berikut:

- 1) Status Belum Kawin: (≥ 75) tahun sebesar 183 jiwa;
- 2) Status Kawin: (05-09) tahun sebesar 1 jiwa.

Jumlah penduduk laki-laki tertinggi menurut kelompok umur dan status perkawinan (cerai hidup dan cerai mati), dapat diklasifikasikan perinciannya sebagai berikut:

- 1) Status Cerai Hidup: (45-49) tahun sebesar 2.167 jiwa;
- 2) Status Cerai Mati: (≥ 75) tahun sebesar 5.946 jiwa.

Adapun jumlah penduduk laki-laki terendah menurut kelompok umur dan status perkawinan, dapat diklasifikasikan perinciannya sebagai berikut:

- 1) Status Cerai Hidup: (15-19) tahun sebesar 1 jiwa;
- 2) Status Cerai Mati: (15-19) tahun sebesar 1 jiwa.

Selanjutnya, penduduk perempuan menurut kelompok umur dan status perkawinan, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.13 Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan

No	Kelompok Umur	Belum Kawin		Kawin		Cerai hidup		Cerai Mati		Total	
		(Jiwa)		(Jiwa)		(Jiwa)		(Jiwa)		(Jiwa)	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	00-04	228.974	8,38	0	0	0	0,00	0	0,00	228.974	8,72
2	05-09	256.101	9,37	1	0	0	0,00	0	0,00	256.102	9,76
3	10-14	250.111	9,15	9	0,00	1	0,00	0	0,00	250.121	9,53
4	15-19	220.363	8,06	5.960	0,26	28	0,05	5	0,00	226.356	8,62
5	20-24	153.882	5,63	63.093	2,80	623	1,20	158	0,07	217.756	8,29
6	25-29	60.055	2,20	147.889	6,56	2.010	3,87	641	0,28	210.595	8,02
7	30-34	24.897	0,91	190.116	8,44	3.898	7,51	2.264	0,98	221.175	8,42
8	35-39	14.324	0,52	185.212	8,22	5.111	9,85	5.125	2,22	209.772	7,99
9	40-44	9.768	0,36	156.288	6,94	5.736	11,05	9.952	4,30	181.744	6,92
10	45-49	7.291	0,27	130.036	5,77	5.538	10,67	16.052	6,94	158.917	6,05



No	Kelompok Umur	Belum Kawin		Kawin		Cerai hidup		Cerai Mati		Total	
		(Jiwa)		(Jiwa)		(Jiwa)		(Jiwa)		(Jiwa)	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
11	50-54	4.921	0,18	97.397	4,32	4.824	9,30	23.044	9,97	130.186	4,96
12	55-59	2.919	0,11	71.559	3,18	4.053	7,81	28.734	12,43	107.265	4,09
13	60-64	1.582	0,06	42.304	1,88	2.526	4,87	28.971	12,53	75.383	2,87
14	65-69	876	0,03	25.907	1,15	1.743	3,36	29.235	12,64	57.761	2,20
15	70-74	432	0,02	13.111	0,58	898	1,73	23.192	10,03	37.633	1,43
16	>=75	459	0,02	12.065	0,54	984	1,90	42.027	18,18	55.535	2,12
		1.236.955	45,25	1.140.947	50,64	37.973	73,17	209.400	90,57	2.625.275	100,00

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Berdasarkan tabel 4.13 terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan tertinggi menurut kelompok umur dan status perkawinan (belum kawin dan kawin) dapat diklasifikasikan perinciannya sebagai berikut:

- 1) Status Belum Kawin: (05-09) tahun sebesar 256.101 jiwa;
- 2) Status Kawin: (30-34) tahun sebesar 190.116 jiwa.

Adapun jumlah penduduk perempuan terendah menurut kelompok umur dan status perkawinan dapat diklasifikasikan perinciannya sebagai berikut:

- 1) Status Belum Kawin: (70-74) tahun sebesar 432 jiwa;
- 2) Status Kawin: (05-09) tahun sebesar 1 jiwa.

Terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan tertinggi menurut kelompok umur dan status perkawinan (cerai hidup dan cerai mati) dapat diklasifikasikan perinciannya sebagai berikut:

- 1) Status Cerai Hidup: (40-44) tahun sebesar 5.736 jiwa;
- 2) Status Cerai Mati: (\geq 75) tahun sebesar 42.027 jiwa.

Adapun jumlah penduduk perempuan terendah menurut kelompok umur dan status perkawinan, dapat diklasifikasikan perinciannya sebagai berikut:

- 1) Status Cerai Hidup : (10-14) tahun sebesar 1 jiwa;



2) Status Cerai Mati : (15-19) tahun sebesar 5 jiwa.

d. Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama

Definisi *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM) adalah perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). Kegunaan tersedianya indikator rata-rata umur kawin pertama dengan metode SMAM akan memudahkan para penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan.

Program untuk pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan juga dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Rata-rata umur perkawinan pertama juga akan berpengaruh terhadap masa reproduksi dari wanita usia subur dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

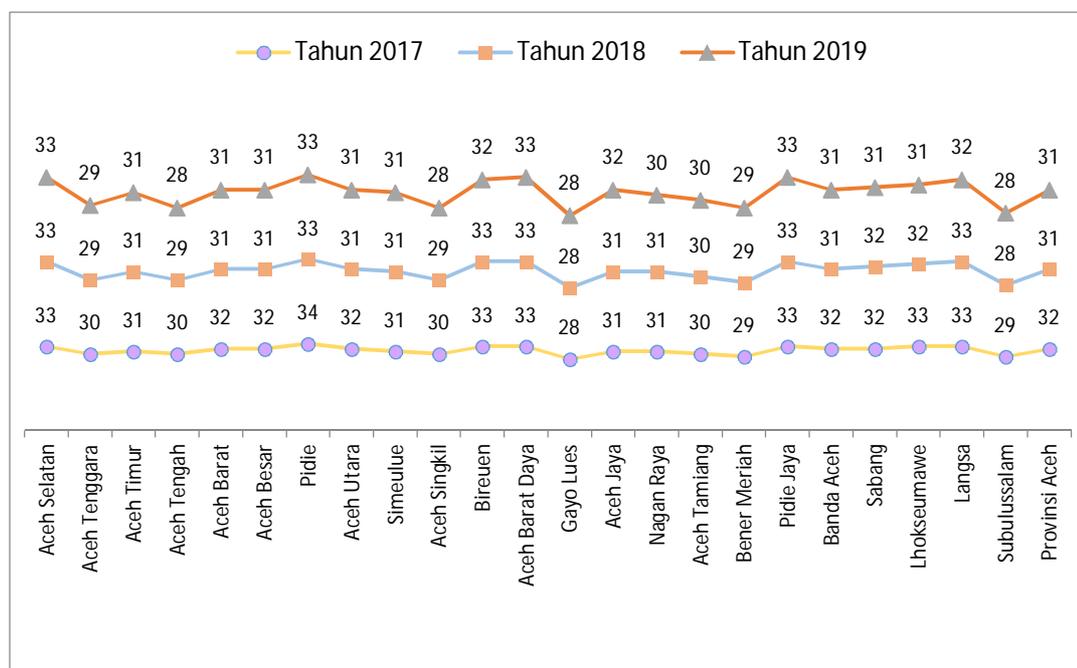
1. Berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan;
2. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian;
3. Ketidaksiapan orang tua untuk pengasuhan anak, dan;
4. Kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

Umur perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas. Umur perkawinan pertama mempunyai korelasi negatif



dengan tingkat fertilitas seorang perempuan, artinya semakin tua umur perkawinan pertama perempuan maka semakin kecil potensi perempuan tersebut untuk melahirkan banyak anak. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur perkawinan pertama seorang perempuan, maka semakin pendek masa usia subur dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat fertilitas perempuan tersebut.

Gambar 4.10 Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Laki-Laki Tahun 2017 s.d. 2019

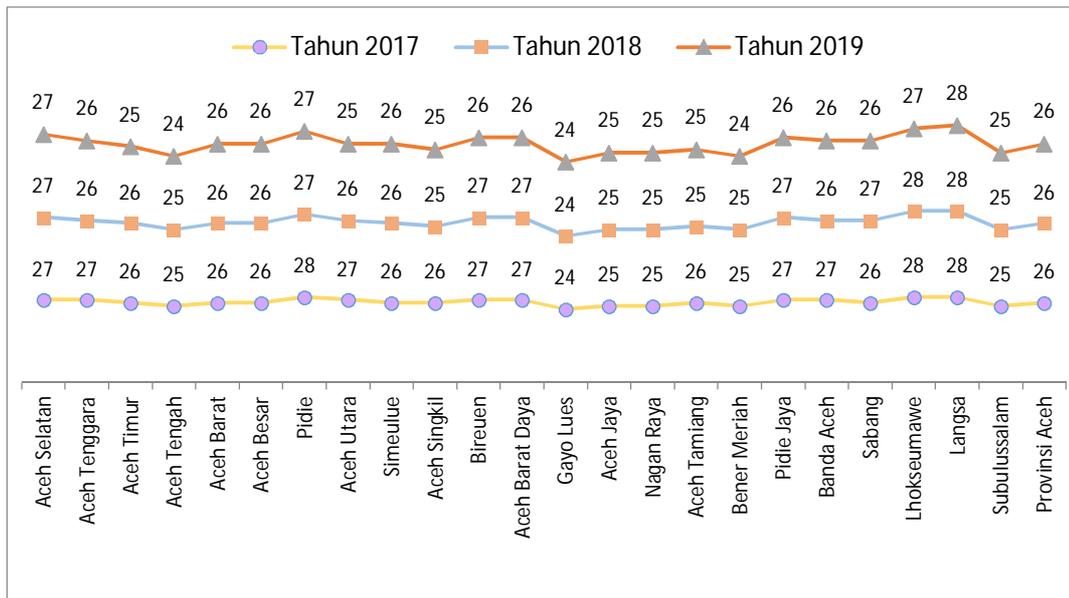


Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Dari Gambar 4.10 dapat dilihat, Rata-rata umur perkawinan pertama laki-laki di Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami penurunan menjadi 31 tahun, namun pada tahun 2018 s.d. 2019 rata-rata umur perkawinan pertama laki-laki di Aceh tidak mengalami penurunan atau tetap 31 tahun. Dari gambar di atas juga dapat dilihat, kabupaten/kota dengan rata-rata umur perkawinan pertama terendah pada tahun 2019 Gayo Lues, Subulussalam, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil yaitu 28 tahun.



Gambar 4.11 Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Tahun 2017 s.d. 2019



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Gambar 4.11 dapat dilihat, Rata-rata umur perkawinan pertama perempuan di Aceh pada tahun 2017 s.d. 2019 berada pada angka 26 tahun, angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu 27 tahun. Dari gambar di atas juga dapat dilihat, kabupaten/kota dengan rata-rata umur perkawinan pertama perempuan terendah pada tahun 2019 adalah Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tengah yaitu 24 tahun. Sedangkan kabupaten/kota dengan rata-rata umur perkawinan pertama tertinggi tahun 2019 adalah Kota Langsa, yaitu 28 tahun.

e. Angka Perceraian Kasar

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka Perceraian Kasar dapat dihitung menggunakan rumus :



$$d = \frac{Dv}{P} \times K$$

d = Angka Perceraian Kasar

Dv = Jumlah perceraian dalam satu tahun

P = Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun
 [P= (Po+Pt)/2], dimana Po adalah jumlah penduduk awal tahun (dasar) dan Pt adalah jumlah penduduk akhir tahun

K = Konstanta = 1000

Angka Perceraian Kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka Perceraian Kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin.

Tabel 4.14 Angka Perceraian Kasar Menurut Kabupaten

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Perceraian Tahun 2019 **	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2019	Jumlah Penduduk ≥ 15 Tahun Pada Pertengahan Tahun 2019	Angka Perceraian Kasar
11.01	Aceh Selatan	221	234.267	178.744	0,94
11.02	Aceh Tenggara	268	223.407	158.506	1,20
11.03	Aceh Timur	461	419.165	287.171	1,10
11.04	Aceh Tengah	414	212.315	151.514	1,95
11.05	Aceh Barat	231	194.296	143.150	1,19
11.06	Aceh Besar	354	391.202	276.711	0,90
11.07	Pidie	405	437.537	325.978	0,93
11.08	Aceh Utara	595	579.859	410.009	1,03
11.09	Simeulue	78	92.917	67.023	0,84
11.10	Aceh Singkil	82	125.653	85.338	0,65
11.11	Bireuen	474	436.094	314.704	1,09
11.12	Aceh Barat Daya	145	150.998	113.426	0,96
11.13	Gayo Lues	77	99.929	70.573	0,77
11.14	Aceh Jaya	85	91.225	64.423	0,93
11.15	Nagan Raya	163	169.714	126.103	0,96
11.16	Aceh Tamiang	454	294.849	211.322	1,54
11.17	Bener Meriah	291	158.851	111.773	1,83
11.18	Pidie Jaya	171	159.785	118.270	1,07
11.71	Banda Aceh	348	243.513	170.907	1,43
11.72	Sabang	65	41.850	29.828	1,55



Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Perceraian Tahun 2019 **	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2019	Jumlah Penduduk \geq 15 Tahun Pada Pertengahan Tahun 2019	Angka Perceraian Kasar
11.73	Lhokseumawe	268	187.957	135.378	1,43
11.74	Langsa	310	186.004	139.062	1,67
11.75	Subulussalam	88	86.515	57.922	1,02
11	Provinsi Aceh	6.048	5.217.902	3.747.835	1,16

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Tabel 4.14 di atas memperlihatkan bahwa Angka Perceraian Kasar di Aceh sebesar 1,16 yang berarti dari 1.000 penduduk Aceh pada tahun 2019 terjadi 1 kali perceraian. Angka Perceraian Kasar tertinggi terjadi di Aceh Tengah 1,95 yang berarti dari 1.000 penduduk pertengahan tahun 2019 di Aceh Tengah terjadi 1 sampai 2 kali perceraian.

f. Angka Perceraian Umum

Adapun Angka Perceraian Umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu. Angka Perceraian Umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perceraian Kasar.

Angka Perceraian Umum ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$d_u = \frac{Dv}{P_{15+}} \times K$$

d_u = Angka Perkawinan Kasar

Dv = Jumlah perkawinan dalam satu tahun

P_{15+} = Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun

K = Konstanta = 1000



Tabel 4.15 Angka Perceraian Umum Menurut Kabupaten

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Perceraian Tahun 2019 **	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2019	Jumlah Penduduk \geq 15 Tahun Pada Pertengahan Tahun 2019	Angka Perceraian Umum
11.01	Aceh Selatan	221	234.267	178.744	1,24
11.02	Aceh Tenggara	268	223.407	158.506	1,69
11.03	Aceh Timur	461	419.165	287.171	1,61
11.04	Aceh Tengah	414	212.315	151.514	2,73
11.05	Aceh Barat	231	194.296	143.150	1,61
11.06	Aceh Besar	354	391.202	276.711	1,28
11.07	Pidie	405	437.537	325.978	1,24
11.08	Aceh Utara	595	579.859	410.009	1,45
11.09	Simeulue	78	92.917	67.023	1,16
11.10	Aceh Singkil	82	125.653	85.338	0,96
11.11	Bireuen	474	436.094	314.704	1,51
11.12	Aceh Barat Daya	145	150.998	113.426	1,28
11.13	Gayo Lues	77	99.929	70.573	1,09
11.14	Aceh Jaya	85	91.225	64.423	1,32
11.15	Nagan Raya	163	169.714	126.103	1,29
11.16	Aceh Tamiang	454	294.849	211.322	2,15
11.17	Bener Meriah	291	158.851	111.773	2,60
11.18	Pidie Jaya	171	159.785	118.270	1,45
11.71	Banda Aceh	348	243.513	170.907	2,04
11.72	Sabang	65	41.850	29.828	2,18
11.73	Lhokseumawe	268	187.957	135.378	1,98
11.74	Langsa	310	186.004	139.062	2,23
11.75	Subulussalam	88	86.515	57.922	1,52
11	Provinsi Aceh	6.048	5.217.902	3.747.835	1,61

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Angka Perceraian Umum di Aceh sebesar 1,61 yang berarti dari 1.000 penduduk berumur 15 tahun keatas di Aceh pada tahun 2019 terjadi 1 sampai 2 kali perceraian. Angka Perceraian Umum tertinggi terjadi di Aceh Tengah sebesar 2,73 yang berarti dari 1.000 penduduk pertengahan tahun 2019 di Aceh Tengah terjadi 2 sampai 3 kali perceraian.



3. Keluarga

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu:

- Keluarga Inti (*Nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.
- Keluarga luas (*extended family*), adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya. Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Terdapat juga keluarga yang terdiri dari tiga generasi, yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan cucu atau yang biasa disebut dengan (*Sandwiches Family*), dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan, beban tanggungan yang dipikul dan pengasuhan baik orang tua maupun anak.



Dalam konteks administrasi kependudukan, banyaknya keluarga tercermin dari banyaknya Kartu Keluarga, mengingat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) dan setiap orang hanya dibenarkan terdaftar dalam satu kartu keluarga.

a. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Rata-rata jumlah anggota keluarga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\overline{AK} = \frac{\sum Pddk}{\sum KK} \times 100$$

\overline{AK} = Rata-Rata jumlah anggota keluarga

$\sum Pddk$ = Jumlah penduduk

$\sum KK$ = Jumlah Kepala Keluarga

Jumlah kepala keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Laki-laki	Kepala Keluarga	Jumlah Perempuan	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga
11.01	Aceh Selatan	236.359	4,48	68.784	4,49	3,44
11.02	Aceh Tenggara	226.162	4,29	60.111	4,29	3,76
11.03	Aceh Timur	423.638	8,06	109.816	8,02	3,86
11.04	Aceh Tengah	214.828	4,11	61.203	4,04	3,51
11.05	Aceh Barat	195.955	3,76	58.261	3,68	3,36
11.06	Aceh Besar	393.903	7,49	113.766	7,46	3,46
11.07	Pidie	442.450	8,32	123.789	8,47	3,57
11.08	Aceh Utara	586.851	11,06	167.820	11,22	3,50
11.09	Simeulue	93.724	1,81	24.426	1,74	3,84
11.10	Aceh Singkil	126.996	2,43	31.735	2,39	4,00



Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Laki-laki	Kepala Keluarga	Jumlah Perempuan	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga
11.11	Bireuen	440.350	8,20	119.984	8,52	3,67
11.12	Aceh Barat Daya	152.248	2,91	42.753	2,87	3,56
11.13	Gayo Lues	101.045	1,92	28.024	1,91	3,61
11.14	Aceh Jaya	92.109	1,77	28.293	1,73	3,26
11.15	Nagan Raya	171.550	3,27	51.352	3,24	3,34
11.16	Aceh Tamiang	297.429	5,69	83.825	5,60	3,55
11.17	Bener Meriah	160.634	3,08	45.784	3,02	3,51
11.18	Pidie Jaya	161.430	3,04	46.800	3,08	3,45
11.71	Banda Aceh	245.779	4,69	70.180	4,64	3,50
11.72	Sabang	42.191	0,80	12.242	0,80	3,45
11.73	Lhokseumawe	189.505	3,56	51.816	3,63	3,66
11.74	Langsa	187.388	3,57	51.051	3,54	3,67
11.75	Subulussalam	87.285	1,67	22.642	1,64	3,86
11	Provinsi Aceh	5.269.809	100,00	1.474.457	100,00	3,57

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Berdasarkan Tabel 4.16, jumlah kepala keluarga tertinggi menurut kabupaten/kota berada di Kabupaten Aceh utara, yaitu sebanyak 167.820 dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 3 sampai dengan 4 orang per keluarga. Tabel di atas memberikan informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga yang dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan program keluarga berencana di Aceh dan juga dapat digunakan oleh pemerintahan kabupaten/kota dalam merencanakan kebutuhan perumahan seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

b. Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan dalam Keluarga dan Jenis

Kelamin

Jumlah penduduk menurut status hubungan dalam kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*Living Arrangement*) dan pola pengasuhan anak. Jumlah penduduk



menurut status hubungan dalam kepala keluarga dan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.17 Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)

No	Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Kepala Keluarga	1.167.252	44,14	307.205	11,70	1.474.457	28,00
2	Suami	324	0,01	2	0,00	326	0,00
3	Istri	3	0,00	1.074.361	40,92	1.074.364	20,40
4	Anak	1.424.680	53,87	1.193.343	45,46	2.618.023	49,70
5	Menantu	265	0,01	237	0,01	502	0,00
6	Cucu	17.376	0,66	13.910	0,53	31.286	0,60
7	Orang Tua	773	0,03	6.826	0,26	7.599	0,10
8	Mertua	485	0,02	4.215	0,16	4.700	0,10
9	Famili Lain	30.745	1,16	23.320	0,89	54.065	1,00
10	Pembantu	47	0,00	62	0,00	109	0,00
11	Lainnya	2.584	0,10	1.794	0,07	4.378	0,10
	Total	2.644.534	100,00	2.625.275	100,00	5.269.809	100,00

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Dari tabel 4.17 di atas terlihat bahwa Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga laki-laki yaitu sebesar 2.644.534 sedang perempuan sebesar 2.625.275. Kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus sendiri baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati.

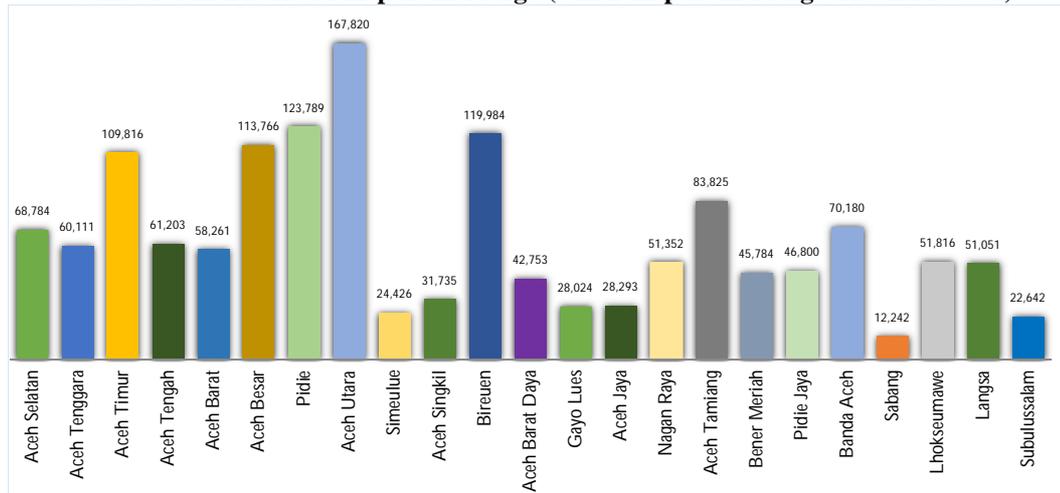
Perempuan berstatus kepala keluarga perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki. Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua dan famili lain



menunjukkan proporsi yang rendah. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (*Extended Family*) di Aceh jumlahnya tidak besar.

c. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Gambar 4.12 Distribusi Kepala Keluarga (Umur Kepala Keluarga Tidak Dibatasi)



Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

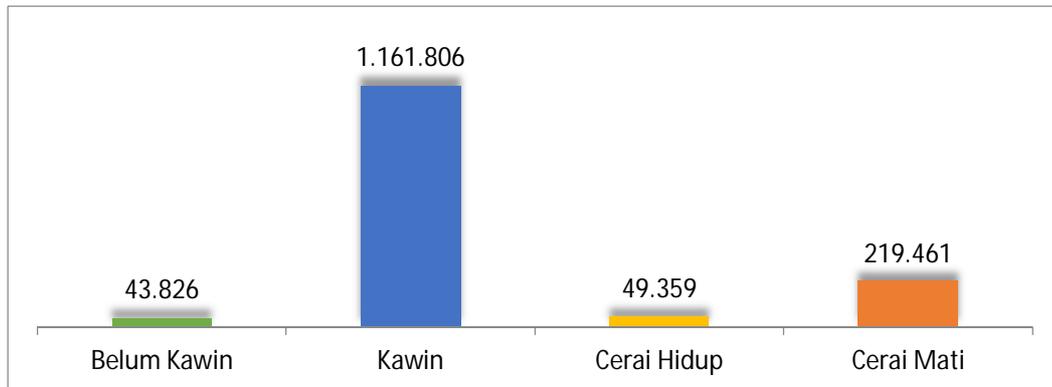
Gambar di atas terlihat bahwa sebahagian besar kepala keluarga sebagaimana dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Aceh Utara sebesar 167.820 kepala keluarga, kemudian disusul dengan Kabupaten Pidie sebesar 123.789 kepala keluarga dan Kabupaten Bireuen sebesar 119.984 kepala keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga terendah, yaitu Kota Sabang, yaitu sebanyak 12.242 kepala keluarga.

d. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan

Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan menggambarkan keadaan kepala keluarga di Aceh dengan status perkawinan (belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati), sebagaimana yang tertera pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.13 Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan



Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa kepala keluarga tertinggi didominasi dengan status kawin sebesar 1.161.806 jiwa, kemudian disusul dengan kepala keluarga dengan status cerai mati sebesar 219.461 jiwa dan kepala keluarga dengan status cerai hidup sebesar 49.359 jiwa.

e. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur Dan Status Perkawinan

Pada Gambar 4.13 sebelumnya memperlihatkan Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan, selanjutnya pada tabel berikut dapat diketahui Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur Dan Status Perkawinan.

Tabel 4.18 Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur Dan Status Perkawinan

No	Kelompok Umur	Belum Kawin (Jiwa)		Kawin (Jiwa)		Cerai Hidup (Jiwa)		Cerai Mati (Jiwa)		Total (Jiwa)	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	15-19	637	1,45	484	0,04	21	0,04	5	0,00	1.147	0,08
2	20-24	4.716	10,76	15.138	1,30	652	1,32	164	0,07	20.670	1,40
3	25-29	7.713	17,60	75.565	6,50	2.387	4,84	697	0,32	86.362	5,86
4	30-34	7.653	17,46	154.350	13,29	5.061	10,25	2.490	1,13	169.554	11,50
5	35-39	5.880	13,42	180.603	15,55	6.862	13,90	5.591	2,55	198.936	13,49
6	40-44	4.465	10,19	166.128	14,30	7.479	15,15	10.701	4,88	188.773	12,80



No	Kelompok Umur	Belum Kawin (Jiwa)		Kawin (Jiwa)		Cerai Hidup (Jiwa)		Cerai Mati (Jiwa)		Total (Jiwa)	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
7	45-49	3.791	8,65	155.434	13,38	7.387	14,97	17.104	7,79	183.716	12,46
8	50-54	3.338	7,62	123.403	10,62	6.267	12,70	24.622	11,22	157.630	10,69
9	55-59	2.358	5,38	99.717	8,58	5.194	10,52	30.674	13,98	137.943	9,36
10	60-64	1.537	3,51	71.252	6,13	3.296	6,68	30.875	14,07	106.960	7,25
11	65-69	891	2,03	53.441	4,60	2.268	4,59	30.784	14,03	87.384	5,93
12	70-74	440	1,00	28.714	2,47	1.157	2,34	23.778	10,83	54.089	3,67
13	>=75	407	0,93	37.577	3,23	1.328	2,69	41.976	19,13	81.288	5,51
	Jumlah	43.826	100	1.161.806	100	49.359	100	219.461	100	1.474.452	100

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa kepala keluarga tertinggi dengan status kawin berada pada kelompok umur (35-39) tahun sebesar 180.603 jiwa dan kepala keluarga dengan status belum kawin tertinggi berada pada kelompok umur (25-29) tahun sebesar 7.713 jiwa. Kepala keluarga dengan status cerai hidup tertinggi berada pada kelompok umur (40-44) tahun sebesar 7.479 jiwa dan kepala keluarga dengan status cerai mati tertinggi berada pada kelompok umur (≥ 75) tahun sebesar 41.976 jiwa.

1) Karakteristik Kepala keluarga Laki-Laki Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan

Kepala Keluarga Laki-Laki Menurut Kelompok Umur Dan Status Perkawinan bertujuan untuk menggambarkan keadaan penduduk laki-laki di Aceh dari kelompok umur dan status perkawinan, sebagaimana yang tertera pada Tabel 4.19 berikut:



Tabel 4.19 Karakteristik Kepala Keluarga Laki-laki Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan

No	Kelompok Umur	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Total	
		(Jiwa)		(Jiwa)		(Jiwa)		(Jiwa)		(Jiwa)	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	15-19	378	1,42	374	0,03	0	0,00	1	0,00	753	0,06
2	20-24	3.195	11,98	14.211	1,28	90	0,69	10	0,05	17.506	1,50
3	25-29	5.725	21,46	72.713	6,57	495	3,78	72	0,35	79.005	6,77
4	30-34	5.606	21,02	148.859	13,45	1.366	10,44	258	1,24	156.089	13,37
5	35-39	4.111	15,41	173.790	15,70	1.986	15,18	532	2,57	180.419	15,46
6	40-44	2.599	9,74	159.611	14,42	1.982	15,15	856	4,13	165.048	14,14
7	45-49	1.754	6,58	149.045	13,47	2.034	15,54	1.217	5,87	154.050	13,20
8	50-54	1.273	4,77	117.663	10,63	1.616	12,35	1.858	8,97	122.410	10,49
9	55-59	867	3,25	94.364	8,53	1.275	9,74	2.472	11,93	98.978	8,48
10	60-64	547	2,05	66.929	6,05	881	6,73	2.771	13,37	71.128	6,09
11	65-69	339	1,27	49.419	4,47	616	4,71	2.954	14,25	53.328	4,57
12	70-74	149	0,56	25.972	2,35	308	2,35	2.326	11,22	28.755	2,46
13	>=75	129	0,48	33.815	3,06	437	3,34	5.398	26,05	39.779	3,41
	Jumlah	26.672	100,00	1.106.765	100,00	13.086	100,00	20.725	100,00	1.167.248	100,00

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kepala keluarga laki-laki tertinggi dengan status kawin berada pada kelompok umur (35-39) tahun sebesar 173.790 jiwa dan kepala keluarga laki-laki dengan status belum kawin tertinggi berada pada kelompok umur (25-29) tahun sebesar 5.725 jiwa. Kepala keluarga dengan status cerai hidup tertinggi berada pada kelompok umur (45-49) tahun sebesar 2.034 jiwa dan kepala keluarga dengan status cerai mati tertinggi berada pada kelompok umur (≥ 75) tahun sebesar 5.398 jiwa.



2) Karakteristik Kepala Keluarga Perempuan Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan

Tabel 4.20 Karakteristik Kepala Keluarga Perempuan Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan

No	Kelompok Umur	Belum Kawin (Jiwa)		Kawin (Jiwa)		Cerai Hidup (Jiwa)		Cerai Mati (Jiwa)		Total (Jiwa)	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	15-19	259	1,51	110	0,20	21	0,06	4	0,00	394	0,13
2	20-24	1.521	8,87	927	1,68	562	1,55	154	0,08	3.164	1,03
3	25-29	1.988	11,59	2.852	5,18	1.892	5,22	625	0,31	7.357	2,39
4	30-34	2.047	11,93	5.491	9,98	3.695	10,19	2.232	1,12	13.465	4,38
5	35-39	1.769	10,31	6.813	12,38	4.876	13,44	5.059	2,55	18.517	6,03
6	40-44	1.866	10,88	6.517	11,84	5.497	15,15	9.845	4,95	23.725	7,72
7	45-49	2.037	11,87	6.389	11,61	5.353	14,76	15.887	7,99	29.666	9,66
8	50-54	2.065	12,04	5.740	10,43	4.651	12,82	22.764	11,45	35.220	11,46
9	55-59	1.491	8,69	5.353	9,73	3.919	10,80	28.202	14,19	38.965	12,68
10	60-64	990	5,77	4.323	7,85	2.415	6,66	28.104	14,14	35.832	11,66
11	65-69	552	3,22	4.022	7,31	1.652	4,55	27.830	14,00	34.056	11,09
12	70-74	291	1,70	2.742	4,98	849	2,34	21.452	10,79	25.334	8,25
13	>=75	278	1,62	3.762	6,83	891	2,46	36.578	18,41	41.509	13,51
	Jumlah	17.154	100,00	55.041	100,00	36.273	100,00	198.736	100,00	307.204	100,00

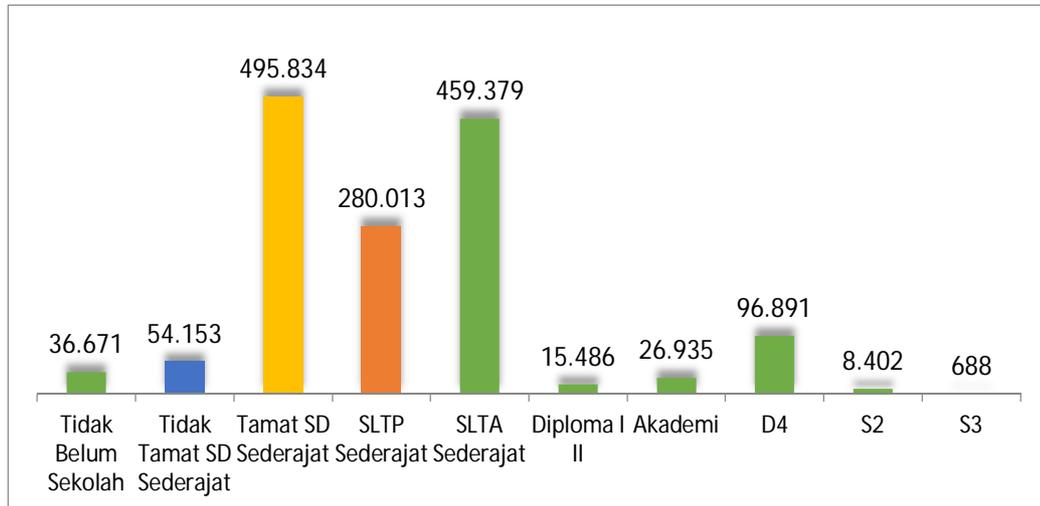
Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan tertinggi dengan status kawin berada pada kelompok umur (35- 39) tahun sebesar 6.813 jiwa dan kepala keluarga perempuan dengan status belum kawin tertinggi berada pada kelompok umur (50-54) tahun sebesar 2.065 jiwa. Kepala keluarga dengan status cerai hidup tertinggi berada pada kelompok umur (40-44) tahun sebesar 5.497 jiwa dan kepala keluarga dengan status cerai mati tertinggi berada pada kelompok umur (≥ 75) tahun sebesar 36.578 jiwa.



f. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan

Gambar 4.14 Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan



Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Pada Gambar 4.14, Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan menunjukkan bahwa kepala keluarga dengan jenjang pendidikan akhir Tamat SD/Sederajat memiliki jumlah tertinggi di Aceh, yaitu sebesar 495.834 jiwa, kemudian disusul dengan kepala keluarga dengan pendidikan SLTA/Sederajat sebesar 459.379 jiwa dan kepala keluarga dengan pendidikan SLTP /Sederajat sebesar 280.013 jiwa.

Keadaan kepala keluarga dengan jenjang pendidikan Tamat SD/Sederajat perlu dikaji lebih mendalam, sebab ada kemungkinan kepala keluarga berada pada jenjang pendidikan Tamat SLTA/Sederajat, namun tidak melakukan perubahan identitas di KTP-El. Akan tetapi gambaran kepala keluarga menurut pendidikan di Aceh dapat dijadikan acuan dalam melakukan kajian selanjutnya.



g. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan

Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan menggambarkan keadaan penduduk berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel 4.21 Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pekerjaan dan Jenis Kelamin

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Belum Tidak Bekerja	5.850	0,50	7.005	2,28	12.855	0,87
2	Mengurus Rumah Tangga	62	0,01	165.193	53,77	165.255	11,21
3	Pelajar Mahasiswa	7.623	0,65	3.706	1,21	11.329	0,77
4	Pensiunan	17.010	1,46	5.453	1,78	22.463	1,52
5	Pegawai Negeri Sipil	62.354	5,34	9.431	3,07	71.785	4,87
6	Tentara Nasional Indonesia	13.776	1,18	8	0,00	13.784	0,93
7	Kepolisian Ri	11.139	0,95	29	0,01	11.168	0,76
8	Perdagangan	8.670	0,74	750	0,24	9.420	0,64
9	Petani Pekebun	423.831	36,31	86.549	28,17	510.380	34,61
10	Peternak	642	0,06	109	0,04	751	0,05
11	Nelayan Perikanan	46.006	3,94	67	0,02	46.073	3,12
12	Industri	361	0,03	67	0,02	428	0,03
13	Konstruksi	768	0,07	3	0,00	771	0,05
14	Transportasi	2.594	0,22	3	0,00	2.597	0,18
15	Karyawan Swasta	44.626	3,82	1.386	0,45	46.012	3,12
16	Karyawan BUMN	8.939	0,77	329	0,11	9.268	0,63
17	Karyawan BUMD	1.467	0,13	49	0,02	1.516	0,10
18	Karyawan Honorer	14.069	1,21	1.788	0,58	15.857	1,08
19	Buruh Harian Lepas	31.270	2,68	642	0,21	31.912	2,16
20	Buruh Tani Perkebunan	18.387	1,58	3.273	1,07	21.660	1,47
21	Buruh Nelayan Perikanan	3.973	0,34	29	0,01	4.002	0,27
22	Buruh Peternakan	122	0,01	11	0,00	133	0,01
23	Pembantu Rumah Tangga	8	0,00	392	0,13	400	0,03
24	Tukang Cukur	819	0,07	2	0,00	821	0,06
25	Tukang Listrik	625	0,05	2	0,00	627	0,04
26	Tukang Batu	5.405	0,46	4	0,00	5.409	0,37
27	Tukang Kayu	9.650	0,83	6	0,00	9.656	0,65
28	Tukang Sol Sepatu	101	0,01	2	0,00	103	0,01
29	Tukang Las Pandai Besi	1.683	0,14	0	0,00	1.683	0,11
30	Tukang Jahit	1.693	0,15	1.039	0,34	2.732	0,19
31	Tukang Gigi	60	0,01	0	0,00	60	0,00
32	Penata Rias	17	0,00	35	0,01	52	0,00



No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
33	Penata Busana	10	0,00	1	0,00	11	0,00
34	Penata Rambut	183	0,02	35	0,01	218	0,01
35	Mekanik	4.415	0,38	0	0,00	4.415	0,30
36	Seniman	187	0,02	7	0,00	194	0,01
37	Tabib	52	0,00	18	0,01	70	0,00
38	Paraji	13	0,00	9	0,00	22	0,00
39	Perancang Busana	10	0,00	8	0,00	18	0,00
40	Penterjemah	14	0,00	2	0,00	16	0,00
41	Imam Mesjid	538	0,05	0	0,00	538	0,04
42	Pendeta	48	0,00	0	0,00	48	0,00
43	Pastor	1	0,00	0	0,00	1	0,00
44	Wartawan	506	0,04	8	0,00	514	0,03
45	Ustadz Mubaligh	4.181	0,36	156	0,05	4.337	0,29
46	Juru Masak	21	0,00	31	0,01	52	0,00
47	Promotor Acara	1	0,00	0	0,00	1	0,00
48	Anggota DPR Ri	5	0,00	0	0,00	5	0,00
49	Anggota DPD	2	0,00	0	0,00	2	0,00
50	Anggota BPK	11	0,00	0	0,00	11	0,00
54	Anggota Kabinet Kementerian	1	0,00	0	0,00	1	0,00
56	Gubernur	1	0,00	0	0,00	1	0,00
57	Wakil Gubernur	1	0,00	0	0,00	1	0,00
58	Bupati	16	0,00	0	0,00	16	0,00
59	Wakil Bupati	12	0,00	0	0,00	12	0,00
60	Walikota	6	0,00	0	0,00	6	0,00
61	Wakil Walikota	6	0,00	0	0,00	6	0,00
62	Anggota DPRD Provinsi	22	0,00	1	0,00	23	0,00
63	Anggota DPRD Kabupaten Kota	298	0,03	9	0,00	307	0,02
64	Dosen	2.388	0,20	186	0,06	2.574	0,17
65	Guru	9.587	0,82	4.400	1,43	13.987	0,95
66	Pilot	1	0,00	0	0,00	1	0,00
67	Pengacara	161	0,01	9	0,00	170	0,01
68	Notaris	55	0,00	11	0,00	66	0,00
69	Arsitek	90	0,01	1	0,00	91	0,01
70	Akuntan	12	0,00	1	0,00	13	0,00
71	Konsultan	350	0,03	7	0,00	357	0,02
72	Dokter	1.021	0,09	147	0,05	1.168	0,08
73	Bidan	0	0,00	554	0,18	554	0,04
74	Perawat	1.769	0,15	332	0,11	2.101	0,14
75	Apoteker	30	0,00	11	0,00	41	0,00



No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
76	Psikiater Psikolog	6	0,00	1	0,00	7	0,00
77	Penyiar Televisi	4	0,00	0	0,00	4	0,00
78	Penyiar Radio	17	0,00	3	0,00	20	0,00
79	Pelaut	399	0,03	0	0,00	399	0,03
80	Peneliti	45	0,00	1	0,00	46	0,00
81	Sopir	23.219	1,99	2	0,00	23.221	1,57
82	Pialang	17	0,00	2	0,00	19	0,00
83	Paranormal	10	0,00	1	0,00	11	0,00
84	Pedagang	50.092	4,29	3.854	1,25	53.946	3,66
85	Perangkat Desa	1.661	0,14	15	0,00	1.676	0,11
86	Kepala Desa	885	0,08	0	0,00	885	0,06
87	Biarawati	0	0,00	5	0,00	5	0,00
88	Wiraswasta	321.184	27,52	9.986	3,25	331.170	22,46
89	Lainnya	84	0,01	28	0,01	112	0,01
		1.167.248	100	307.204	100	1.474.452	100

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

4. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

a. Jumlah penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Tabel 4.22 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidik Akhir	Laki-laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Tidak Sekolah	647.125	24,47	622.499	23,71	1.269.624	24,09
2	Tidak Tamat SD Sederajat	328.981	12,44	324.369	12,36	653.350	12,40
3	Tamat SD Sederajat	481.287	18,20	555.905	21,18	1.037.192	19,68
4	SLTP Sederajat	389.715	14,74	371.418	14,15	761.133	14,44
5	SLTA Sederajat	652.078	24,66	530.938	20,22	1.183.016	22,45
6	Diploma I II	12.632	0,48	34.098	1,30	46.730	0,89
7	Akademi	26.135	0,99	58.425	2,23	84.560	1,60
8	D4	97.701	3,69	122.591	4,67	220.292	4,18
9	S2	8.231	0,31	4.750	0,18	12.981	0,25
10	S3	649	0,02	282	0,01	931	0,02
	Jumlah	2.644.534	100	2.625.275	100	5.269.809	100

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.



Dari tabel ini terlihat bahwa penduduk Aceh 22,45 persen berpendidikan SLTA/ Sederajat. Persentase penduduk perempuan yang berpendidikan SLTA sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang berpendidikan SLTA. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk bersekolah lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Pada jenjang pendidikan dasar, persentase penduduk yang tamat SD untuk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan persentase untuk laki-laki. Pada tingkat yang lebih tinggi, persentase yang menamatkan lebih rendah untuk laki laki dibandingkan untuk perempuan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini menunjukkan ketimpangan gender dalam hal pendidikan di Aceh sudah mulai berkurang.

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin

Sumber data untuk menghitung jumlah dan proporsi penduduk menurut agama pada suatu periode tertentu dapat di diperoleh dari hasil pencatatan/pendataan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

Tabel 4.23 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin

No	Agama	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Islam	2.605.860	98,54	2.586.869	98,54	5.192.729	98,54
2	Kristen	32.239	1,22	31.983	1,22	64.222	1,22
3	Katholik	2.624	0,10	2.542	0,10	5.166	0,10
4	Hindu	48	0,00	39	0,00	87	0,00
5	Budha	3.632	0,14	3.704	0,14	7.336	0,14
7	Lainnya	131	0,00	138	0,01	269	0,01
		2.644.534	100	2.625.275	100	5.269.809	100

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa 98,54 persen penduduk Aceh beragama Islam. Agama kedua yang dianut penduduk Aceh adalah Kristen yakni 1,22 persen,



selanjutnya 0,14 persen penduduknya beragama Buddha, dan hanya sebagian kecil yang menganut Kepercayaan lainnya.

c. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan

Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan *kategori khusus*. Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Masing-masing disajikan dalam bentuk tabel tunggal menurut kecamatan.

Tabel 4.24 Jumlah Penyandang Cacat Menurut Jenis Kelamin

No	Penyandang Cacat **	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Netra	579	11,19	389	11,60	968	11,35
2	Rungu	274	5,29	186	5,55	460	5,39
3	Wicara	315	6,09	303	9,03	618	7,25
4	Daksa	2.232	43,12	1.366	40,73	3.598	42,18
5	Grahitia	540	10,43	373	11,12	913	10,70
6	Ganda	345	6,67	255	7,60	600	7,03
7	Autis	190	3,67	137	4,08	327	3,83
8	Lainnya	701	13,54	345	10,29	1.046	12,26
		5.176	100	3.354	100	8.530	100

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah. Dinas Sosial, Tahun 2019, diolah

Dari tabel terlihat bahwa 43,12 persen penduduk Aceh cacat fisik dengan persentase tertinggi pada laki-laki. Selanjutnya penyandang cacat lainnya menepati urutan kedua yakni 13,54 persen dengan persentase tertinggi pada laki-laki. Keseluruhan untuk persentase penyandang cacat untuk laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.



BAB V

KUALITAS PENDUDUK

Bab ini mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan kualitas penduduk Aceh pada tahun 2019, dengan berdasarkan Permendagri Nomor 65 tahun 2010 Dalam penyajiannya ditampilkan melalui grafik dan tabel yang mencakup tentang

A. Kesehatan, meliputi :

1. Kelahiran

- a. Angka Kelahiran Menurut Umur;
- b. Angka Kelahiran Total;
- c. Rasio Anak Perempuan;
- d. Angka Kelahiran Umum.

2. Kematian

- a. Angka Kematian Bayi;
- b. Angka Kematian Neonatal dan Post Neonatal;
- c. Angka Kematian Anak;
- d. Angka Kematian Balita;
- e. Angka Kematian Ibu.

B. Pendidikan, meliputi :

1. Jumlah Penduduk Usia Sekolah;
2. Angka Partisipasi Kasar;
3. Angka Partisipasi Murni, dan;
4. Rata-rata Lama Sekolah.



C. Ekonomi, meliputi :

1. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja;
2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja;
3. Jumlah dan Proporsi Pengangguran;
4. Karakteristik Pengangguran;
5. Angka Partisipasi Angkatan Kerja;
6. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan.

D. Sosial, meliputi:

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
2. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat;
3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan;
4. Jumlah Penduduk Menurut Agama;
5. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah;
6. Jumlah Penyandang Cacat.

A. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting dalam peningkatan kualitas hidup kependudukan. Kesehatan sangat penting untuk diperhatikan karena sangat erat kaitannya dengan pembangunan, khususnya berkaitan dengan sumber daya manusia. Permasalahan penduduk dalam suatu wilayah dapat memberi dampak atau pengaruh yang cukup besar, salah satunya yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat cepat atau lambat. Tingkat fertilitas dan mortalitas akan memberikan dampak terhadap laju pertumbuhan penduduk yang nantinya berpengaruh pula terhadap beban ketergantungan suatu negara, di mana akan



mempengaruhi keseimbangan fiskal negara di masa depan. Kualitas kesehatan dilihat dari angka kelahiran (fertilitas) dan angka kematian (mortalitas).

1. Kelahiran

United Nations mendefinisikan kelahiran atau fertilitas sebagai salah satu komponen utama pertumbuhan populasi dan perubahan struktur usia. Thompson (1953) mendefinisikan "*fertility is the actual reproductive performance of a woman or group a woman*". Jadi fertilitas adalah kemampuan seorang wanita atau sekelompok wanita untuk memberikan keturunan yang diukur dengan bayi lahir hidup. Kelahiran hidup adalah lepasnya bayi dari rahim seorang wanita terlepas dari durasi kehamilan, dengan adanya tanda-tanda bernafas atau menunjukkan bukti lain tentang kehidupan, seperti detak jantung, denyut nadi dari tali pusar telah dipotong atau plasenta terpasang; setiap kelahiran seperti itu dianggap lahir hidup (United Nations Statistical Office, 1955: p.6). Apabila tanda-tanda kehidupan tidak ada maka disebut dengan lahir mati yang di dalam demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran.

1) Angka Kelahiran Menurut Umur

Angka kelahiran menurut umur (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan usia produktif (15-49 tahun) menurut kelompok umur yang sama. Tingkat kelahiran yang terjadi menurut umur sangat berbeda. Artinya, tingkat kelahiran yang terjadi di antara penduduk perempuan pada kelompok umur (20-24 tahun) sangat berbeda dengan penduduk perempuan pada kelompok umur (35-39 tahun). Angka kelahiran ini sudah memperhitungkan perbedaan kemampuan melahirkan dari setiap



kelompok umur yang berbeda. Sehingga pengetahuan tentang ASFR akan berguna dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta perencanaan pelaksanaan program keluarga berencana (KB). Indikator ASFR juga akan digunakan untuk mengembangkan proyeksi penduduk dan masyarakat sumber perhitungan banyaknya penduduk umur 0-1 tahun ada perhitungan proyeksi penduduk. Perhitungan Angka kelahiran menurut kelompok umur dengan rumus:

$ASFR_i = \text{Age Specific Fertility Rate}$ (Angka Kelahiran Menurut Umur) untuk perempuan pada kelompok umur i ,
dimana:

$i = 1$ untuk umur 15-19 tahun,

$i = 2$ untuk umur 20-24 tahun,

$i = 3$ untuk umur 25-29 tahun,

$i = 4$ untuk umur 30-34 tahun,

$i = 5$ untuk umur 35-39 tahun,

$i = 6$ untuk umur 40-44 tahun,

$i = 7$ untuk umur 45-49 tahun.

B_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i .

P_i^f = Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur i .

K = Konstanta = 1.000

$$ASFR = \frac{B_i}{P_i^f} \times K$$

2) Angka Kelahiran Total

Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate/TFR*) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya



(perempuan kelompok umur 15 = 49 tahun). Informasi angka fertilitas total (TFR) di suatu daerah akan berguna bagi para pengambil keputusan dan perencana dalam merencanakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduksi dan peningkatan pelayanan terhadap ibu dan anak.

Angka Kelahiran Total (TFR) dapat dihitung dengan rumus :

$$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$$

TFR = Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total

ASFR_i = ASFR kelompok umur i.

i = Kelompok umur, yaitu 15-19, 20-24,..,45-49

3) Rasio Anak Perempuan

Rasio Anak Perempuan adalah perbandingan antara jumlah anak di bawah usia lima tahun (0-4) tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia reproduksi (15-49) tahun di suatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio Anak Perempuan dapat digunakan untuk mengetahui beban wanita usia subur dalam mengurus anak (0-4) tahun. Semakin besar Rasio Anak Perempuan semakin tinggi beban wanita subur dalam mengurus anak (0-4) tahun. Rasio anak perempuan (CWR) dapat dihitung dengan rumus :

CWR = Rasio Anak Perempuan

P (0-4) = Jumlah penduduk dibawah 5 tahun (0-4 tahun)

P(15-49) = Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun

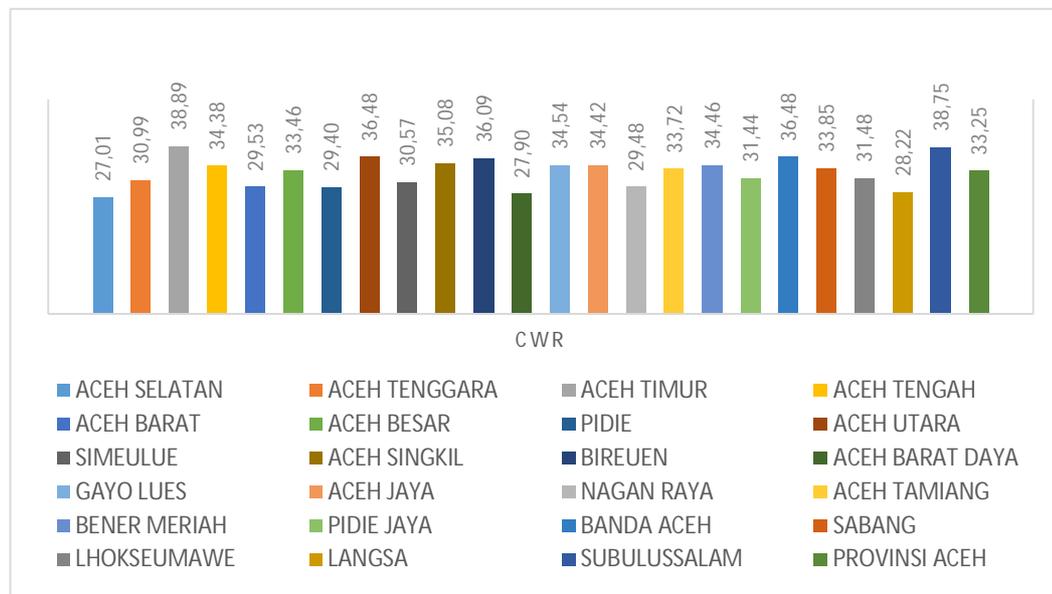
K = Konstanta = 100

$$CWR = \frac{P_{0-4}}{P_{15-49}} \times K$$



Rasio Anak Perempuan di Aceh dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut. Rasio Anak Perempuan pada tahun 2019 mencapai 33,25 yang berarti dari 100 penduduk wanita usia subur terdapat 33 orang anak di bawah 5 tahun berumur (0-4) tahun. Rasio Anak Perempuan tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Timur sebesar 38,89 yang berarti dari 100 penduduk wanita usia subur terdapat 39 orang anak di bawah 5 tahun, diikuti Kota Subussalam dan Kota Banda Aceh sebesar 38,75 dan 36,48. Sementara itu, rasio anak Perempuan terendah terdapat di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 27,01 yang berarti dari 100 penduduk wanita usia subur terdapat 27 orang anak berumur (0-4) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan perlu memprogramkan upaya kesehatan bagi penduduk usia (0-4) tahun baik berupa kesehatan lingkungan maupun peningkatan gizi.

Gambar 5.1 Child Woman Ratio di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh



Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah



Selanjutnya perkembangan Rasio Anak Perempuan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1. Perkembangan Rasio Anak Perempuan, Tahun 2017 s.d. 2019

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Rasio Anak Perempuan		
		2017	2018	2019
11	Provinsi Aceh	27,64	31,29	33,25
11.01	Aceh Selatan	24,20	25,35	27,01
11.02	Aceh Tenggara	25,40	28,54	30,99
11.03	Aceh Timur	31,70	36,68	38,89
11.04	Aceh Tengah	27,22	31,75	34,38
11.05	Aceh Barat	23,66	28,18	29,53
11.06	Aceh Besar	27,62	33,80	33,46
11.07	Pidie	24,39	26,31	29,40
11.08	Aceh Utara	24,98	32,50	36,48
11.09	Simeulue	28,44	28,77	30,57
11.10	Aceh Singkil	32,34	34,01	35,08
11.11	Bireuen	28,94	33,81	36,09
11.12	Aceh Barat Daya	27,46	27,39	27,90
11.13	Gayo Lues	31,38	32,56	34,54
11.14	Aceh Jaya	27,30	31,83	34,42
11.15	Nagan Raya	25,30	27,49	29,48
11.16	Aceh Tamiang	28,75	33,63	33,72
11.17	Bener Meriah	31,22	31,88	34,46
11.18	Pidie Jaya	27,44	29,19	31,44
11.71	Banda Aceh	31,80	35,10	36,48
11.72	Sabang	32,58	32,05	33,85
11.73	Lhokseumawe	28,39	29,61	31,48
11.74	Langsa	26,79	27,28	28,22
11.75	Subulussalam	30,82	36,30	38,75

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Berdasarkan tabel 5.1 tersebut, rasio anak perempuan di Aceh terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rasio Anak perempuan pada tahun 2019 mencapai 33,25 (33 jiwa). Hal ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 31,29

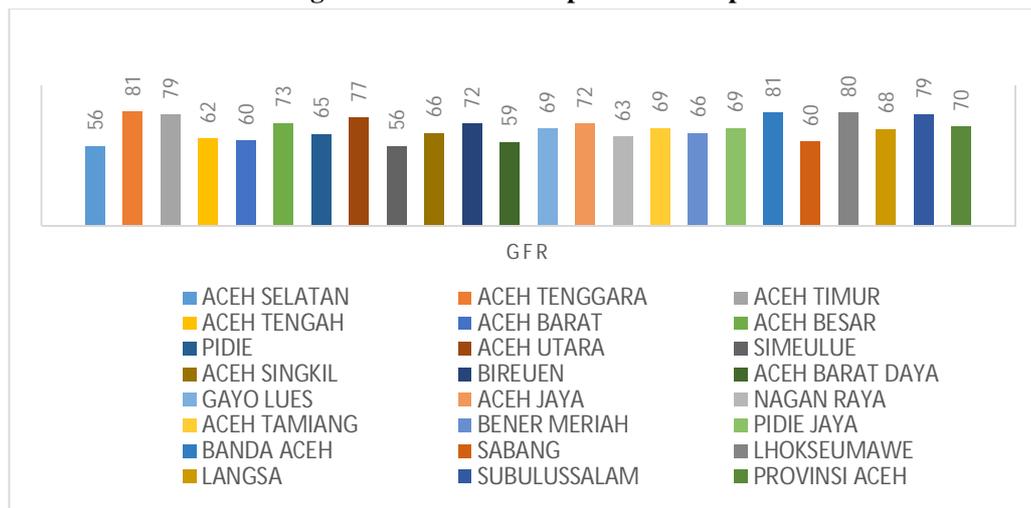


(31 jiwa). Artinya, dari 100 penduduk wanita usia subur terdapat tambahan 3 orang anak berumur (0-4) tahun menjadi 33 anak di Tahun 2019.

4) Angka Kelahiran Umum

Angka Kelahiran Umum merupakan banyaknya kelahiran di suatu daerah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama per 1.000 penduduk wanita usia subur. Angka Kelahiran Umum merupakan indikator kelahiran yang lebih baik dibandingkan Angka Kelahiran Kasar. Angka Kelahiran Umum menurut kabupaten/kota di Aceh tertera pada Gambar 5.2 berikut.

Gambar 5.2 Angka Kelahiran Umum pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah. Dinas Kesehatan Aceh, Tahun 2019 diolah.

Angka Kelahiran Umum di Aceh pada tahun 2019 sebesar 70, yang berarti dari 1.000 penduduk wanita usia subur (15-49) tahun terjadi kelahiran sebesar 70 jiwa. Angka kelahiran umum tertinggi terdapat di Kabupaten Banda Aceh dan Aceh Tenggara sebesar 81 yang menunjukkan bahwa dari 1.000 penduduk wanita usia subur (15 - 49) tahun terjadi kelahiran sebesar 81 jiwa. Angka kelahiran umum terendah terdapat di Kabupaten Aceh Selatan dan Simeulue sebesar 56,



menunjukkan bahwa dari 1.000 penduduk wanita usia subur terjadi kelahiran hanya sebesar 56 jiwa.

Selanjutnya, perkembangan angka kelahiran umum tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat ditunjukkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Perkembangan Angka Kelahiran Umum, Tahun 2017 s.d. 2019

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Umum		
		2017	2018	2019
11	Provinsi Aceh	81,87	35,60	70,31
11.01	Aceh Selatan	70,87	39,72	56,21
11.02	Aceh Tenggara	67,50	29,61	80,92
11.03	Aceh Timur	79,33	35,82	78,70
11.04	Aceh Tengah	71,99	53,99	61,81
11.05	Aceh Barat	69,86	37,80	59,93
11.06	Aceh Besar	63,27	33,40	72,91
11.07	Pidie	71,98	38,24	64,87
11.08	Aceh Utara	63,00	32,80	76,72
11.09	Simeulue	73,08	37,47	56,12
11.10	Aceh Singkil	67,24	25,63	65,69
11.11	Bireuen	71,45	32,20	72,34
11.12	Aceh Barat Daya	72,03	52,37	59,35
11.13	Gayo Lues	63,51	29,03	68,79
11.14	Aceh Jaya	69,84	40,89	72,22
11.15	Nagan Raya	75,74	43,62	63,11
11.16	Aceh Tamiang	60,87	33,04	69,22
11.17	Bener Meriah	69,16	55,22	65,66
11.18	Pidie Jaya	69,24	30,63	69,35



Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Umum		
		2017	2018	2019
11.71	Banda Aceh	68,36	33,27	80,52
11.72	Sabang	85,86	46,82	59,62
11.73	Lhokseumawe	67,92	44,74	80,27
11.74	Langsa	76,36	37,72	68,42
11.75	Subulussalam	69,49	38,62	78,75

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.
Dinas Kesehatan Aceh, Tahun 2019, diolah.

Berdasarkan tabel 5.2 tersebut, angka kelahiran umum di Aceh terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Angka kelahiran umum pada tahun 2019 sebesar 70,31. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 35,60. Artinya, dari 1.000 penduduk wanita usia subur, jumlah kelahiran bertambah 34 kelahiran menjadi 70 kelahiran di tahun 2019.

2. Kematian (Mortalitas)

Mortalitas merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap struktur penduduk dan bersifat mengurangi jumlah penduduk. Mortalitas merupakan indikator yang menentukan kesejahteraan penduduk, dan merepresentasikan kualitas penduduk dalam suatu wilayah. Tingkat mortalitas yang rendah menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu wilayah, khususnya dalam bidang kesehatan sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan dibidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Tingkat kematian dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin dan lain sebagainya. Kematian juga



dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti penyakit menular atau penyakit degeneratif kecelakaan maupun penyebab yang lain.

Kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernafasan bagian atas (ISPA) dan diare yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah. Indikator kematian biasa digunakan untuk mengukur kualitas hidup/kesehatan di suatu daerah.

a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate (IMR)* didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, atau probabilitas kematian bayi usia dibawah 1 tahun (0-24 bulan) per 1.000 kelahiran bayi yang lahir hidup dalam tahun tertentu. Perhitungan angka kematian bayi (IMR) biasa digunakan sebagai indikator dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. IMR juga digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Secara garis besar, dari segi penyebab, kematian bayi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu eksogen (kematian post neonatal) dan endogen (kematian neonatal). IMR/AKB dapat dirumuskan sebagai berikut:



AKB = Angka Kematian Bayi/Infant Mortality Rate (IMR)

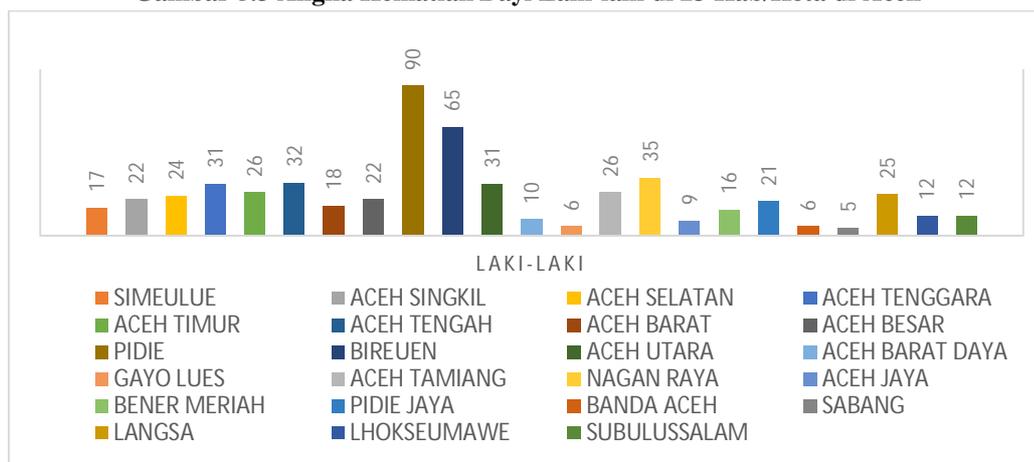
D(0-<1 th)= Jumlah kematian bayi kurang dari 1 tahun pada satu tahun tertentu

$$AKB (IMR) = \frac{D_{0-<1TH}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times K$$

\sum Lahir Hidup = Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu

K = Konstanta = 1000

Gambar 5.3 Angka Kematian Bayi Laki-laki di 23 Kab/Kota di Aceh



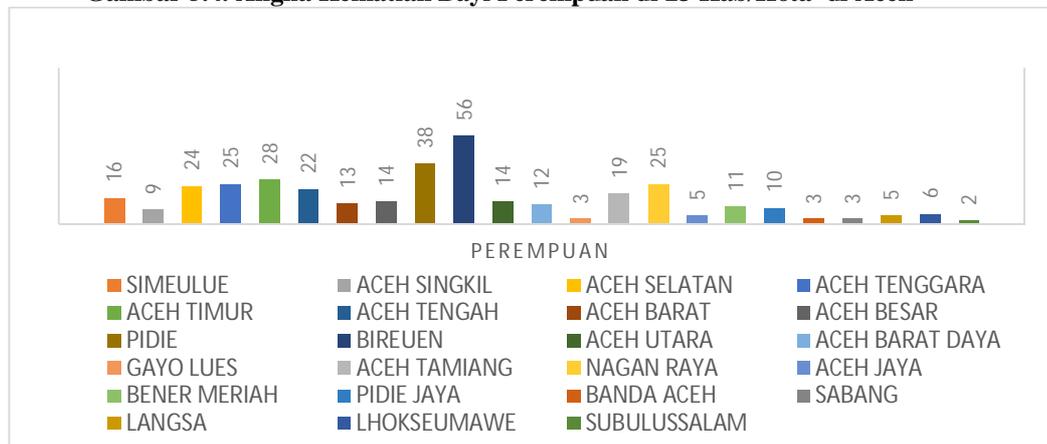
Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah. Dinas Kesehatan Aceh, Tahun 2019, diolah.

Gambar 5.3 menunjukkan angka kematian bayi laki-laki (0-11) bulan di 23 Kab/Kota di Aceh. Angka kematian bayi laki-laki tertinggi terdapat di Kabupaten Pidie sebesar 90 diikuti Kabupaten Bireuen dan Nagan Raya sebesar 65 dan 31. Angka kematian bayi laki-laki sebesar 90 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pidie, dari 1.000 kelahiran hidup terdapat kematian bayi laki-laki yang cukup tinggi yaitu 90. Sementara itu, angka kematian bayi laki-laki terendah terdapat di Kota Sabang



sebesar 5 diikuti Kabupaten Gayo Lues dan Kota Banda Aceh sebesar 6. Artinya dari 1.000 kelahiran hidup, terdapat kematian bayi sebesar 6 jiwa.

Gambar 5.4. Angka Kematian Bayi Perempuan di 23 Kab/Kota di Aceh

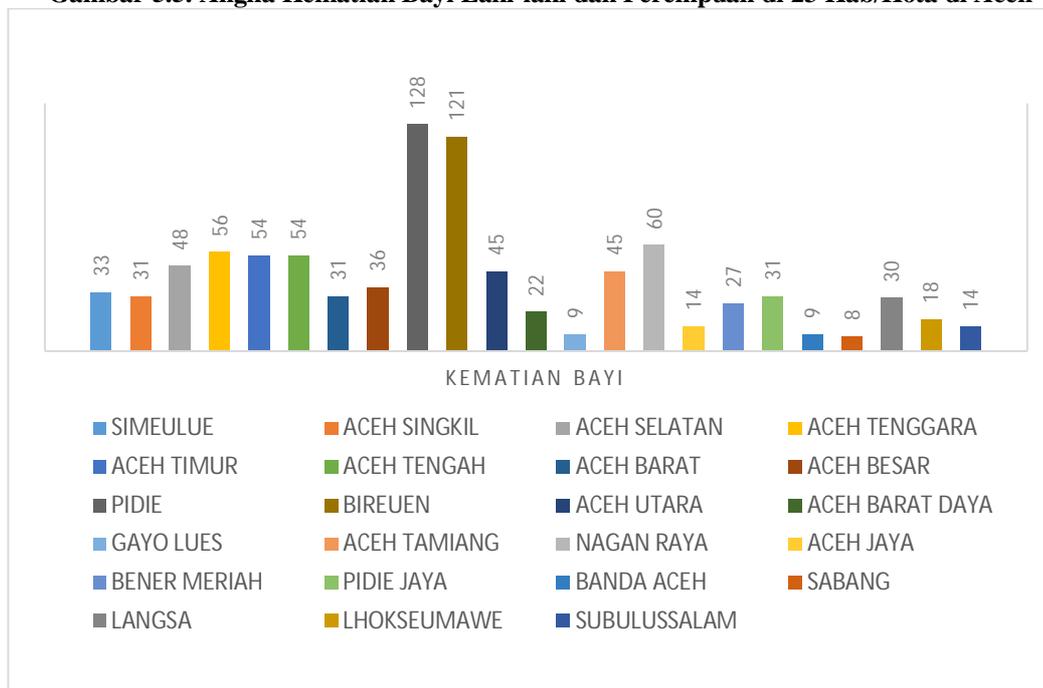


Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah. Dinas Kesehatan Aceh, Tahun 2019, diolah.

Gambar 5.4 menunjukkan angka kematian bayi perempuan (0-11) bulan di 23 Kab/Kota di Aceh. Angka kematian bayi perempuan tertinggi terdapat di Kabupaten Bireuen sebesar 56 diikuti Kabupaten Pidie dan Aceh Timur sebesar 38 dan 28. Angka kematian bayi perempuan sebesar 56 menunjukkan bahwa di Kabupaten Bireuen, dari 1.000 kelahiran hidup terdapat kematian bayi perempuan yang cukup tinggi sebesar 56. Sementara itu, angka kematian bayi perempuan terendah terdapat di Kota Subussalam sebesar 2 diikuti Kota Sabang, Kabupaten Gayo Lues, dan Kota Banda Aceh sebesar 3. Artinya dari 1.000 kelahiran hidup, terdapat kematian bayi perempuan sejumlah 2 jiwa di Kota Subussalam dan Kota Sabang, Kabupaten Gayo Lues, dan Kota Banda Aceh sejumlah 3 jiwa.



Gambar 5.5. Angka Kematian Bayi Laki-laki dan Perempuan di 23 Kab/Kota di Aceh



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah. Dinas Kesehatan Aceh, Tahun 2019, diolah.

Gambar 5.5 menunjukkan angka kematian bayi laki-laki maupun perempuan (0-11) bulan di 23 Kab/Kota di Aceh. Angka kematian bayi tertinggi terdapat di Kabupaten Pidie sebesar 128 diikuti Kabupaten Bireuen dan Nagan Raya sebesar 121 dan 60. Angka kematian bayi sebesar 128 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pidie, dari 1.000 kelahiran hidup terdapat kematian bayi yang cukup tinggi yaitu sebesar 128. Hal ini menandakan jumlah kematian bayi laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Pidie dan Bireuen mendominasi angka kematian bayi (0-11) bulan di Provinsi Aceh. Sementara itu, angka kematian bayi terendah terdapat di Kota Sabang, Kabupaten Gayo Lues, Kota Banda Aceh sebesar 8, 9, dan 9 berturut-turut. Artinya dari 1.000 kelahiran hidup, terdapat kematian bayi sebesar 8, 9, dan 9 jiwa di Kota Sabang, Kabupaten Gayo Lues, dan Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dari Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten



khususnya Kabupaten Pidie dan Kabupaten Bireuen terkait masih tingginya kematian bayi tersebut.

b. Angka Kematian Neonatal dan Post Neonatal

Kematian bayi endogen atau disebut pula dengan kematian neonatal adalah kematian yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya atau didapat selama kehamilan. Angka kematian neonatal dihitung dengan rumus :

NNDR = Angka Kematian bayi dibawah 1 bulan (Neonatal)

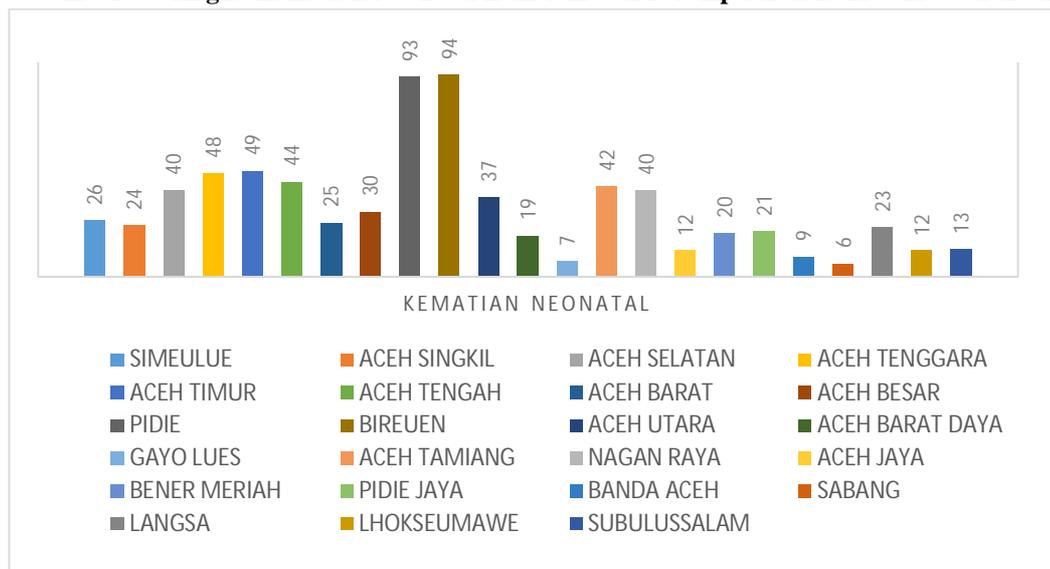
$D_{0-<1 \text{ bln}}$ = Jumlah kematian bayi umur 0-<1 bulan (Neonatal) pada satu tahun tertentu

\sum Lahir Hidup = Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu

K = Konstanta = 1000

$$NNDR = \frac{D_{0-<1 \text{ bulan}}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times K$$

Gambar 5.6 Angka Kematian Neonatal Laki-laki dan Perempuan di 23 Kab/Kota di Aceh



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah. Dinas Kesehatan Aceh, Tahun 2019, diolah.



Gambar 5.6 menunjukkan angka kematian neonatal di 23 Kab/Kota di Aceh. Angka kematian neonatal tertinggi terdapat di Kabupaten Bireuen sebesar 94 jiwa, selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Pidie sebesar 93 jiwa. Jumlah kematian neonatal sebesar 94, menunjukkan bahwa dari 1.000 kelahiran hidup terdapat kematian neonatal sebesar 94 jiwa. Nilai ini jauh melebihi angka rata-rata Provinsi Aceh sebesar 32. Sementara itu, angka kematian neonatal terendah terdapat di, selanjutnya diikuti oleh Kota Sabang diikuti Kabupaten Gayo Lues dan Kota Banda Aceh sebesar 6, 7 dan 9 berturut-turut. Artinya dari 1.000 kelahiran hidup, terdapat kematian neonatal hanya sebesar 6, 7 dan 9 jiwa di Kota Sabang, Kabupaten Gayo Lues dan Kota Banda Aceh pada tahun 2019.

Sementara itu, kematian bayi eksogen atau kematian post neonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar.

$$PNNDR = \frac{D_{1 \text{ bln} < 1 \text{ thn}}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times K$$

PNNDR = Angka Kematian bayi dibawah 1 bulan (Post Neonatal)

$D_{1 \text{ bln} < 1 \text{ thn}}$ = Jumlah kematian bayi umur 1bulan - <1 tahun (Post Neonatal) pada satu tahun tertentu

$\sum \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu

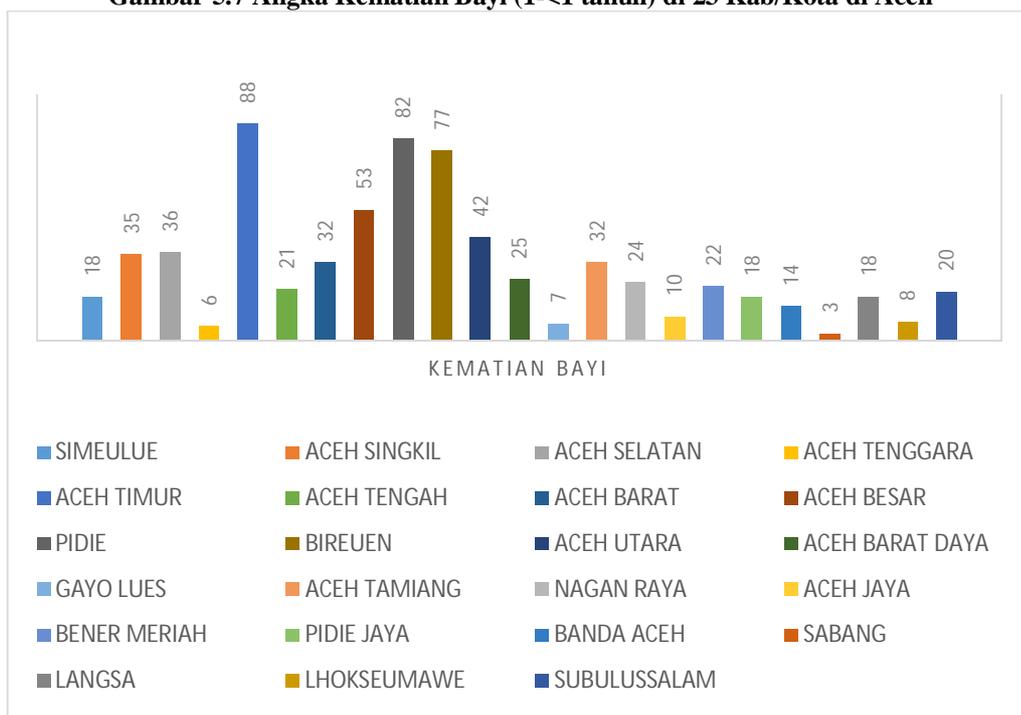
K = Konstanta = 1000

Gambar 5.7 menunjukkan angka kematian bayi usia di bawah 1 tahun (1-<1 tahun) di 23 Kab/Kota di Aceh. Angka kematian bayi tertinggi terdapat di Kabupaten Aceh Timur sebesar 88 jiwa, selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Pidie sebesar 82 jiwa dan Kabupaten Bireuen sebesar 77 jiwa. Jumlah kematian bayi sebesar 88, 82 dan 77 menunjukkan bahwa dari 1.000 kelahiran hidup terdapat



kematian bayi di bawah 1 tahun sebesar 88, 82, dan 77 jiwa di 3 Kabupaten tersebut. Nilai ini jauh melebihi angka rata-rata Provinsi Aceh sebesar 30. Sementara itu, angka kematian bayi usia di bawah 1 tahun terendah terdapat di, selanjutnya diikuti oleh Kota Sabang diikuti Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Gayo Lues sebesar 3, 6 dan 7 berturut-turut. Artinya dari 1.000 kelahiran hidup, terdapat kematian bayi di bawah 1 tahun sebesar 3, 6 dan 7 jiwa di 3 Kabupaten tersebut. Angka ini sangat rendah jauh di bawah angka rata-rata Provinsi Aceh.

Gambar 5.7 Angka Kematian Bayi (1-<1 tahun) di 23 Kab/Kota di Aceh



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah. Dinas Kesehatan Aceh, Tahun 2019, diolah.

c. Angka Kematian Anak

Anak adalah penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5 tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan 29 hari. Angka kematian anak



mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka kematian anak juga dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam dan di luar rumah. Angka kematian Anak dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$AK_{Anak} = \frac{D_{1-4thn}}{\sum Pddk_{1-4thn}} \times K$$

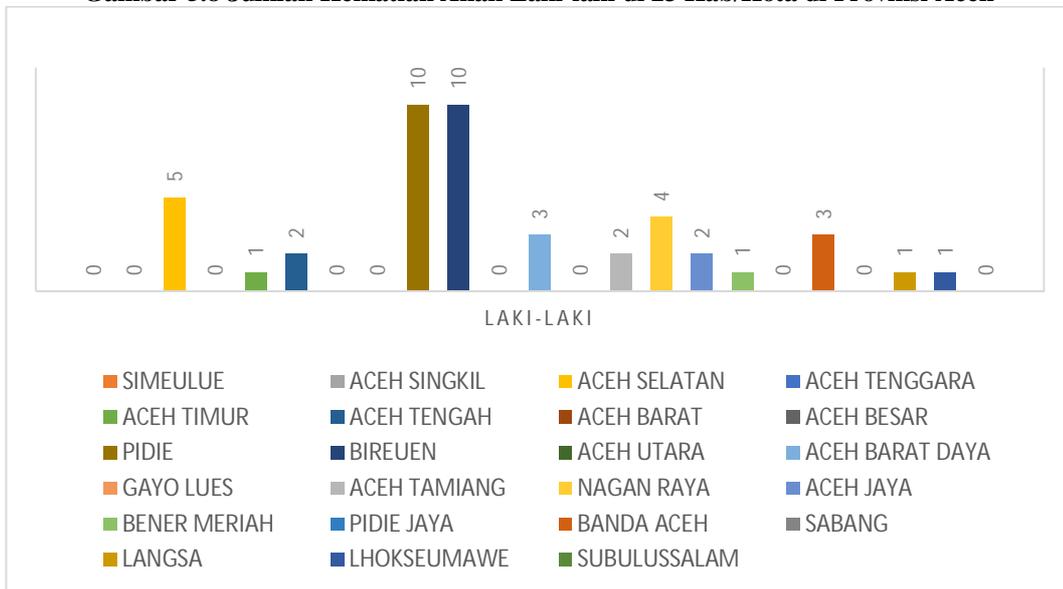
AK_{Anak} = Angka Kematian Anak

D_{1-4thn} = Jumlah kematian anak umur 1-4 tahun pada satu tahun tertentu

$\sum Pddk_{1-4thn}$ = Jumlah penduduk usia 1-4 tahun pada pertengahan tahun yang sama

K = Konstanta = 1000

Gambar 5.8 Jumlah Kematian Anak Laki-laki di 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh



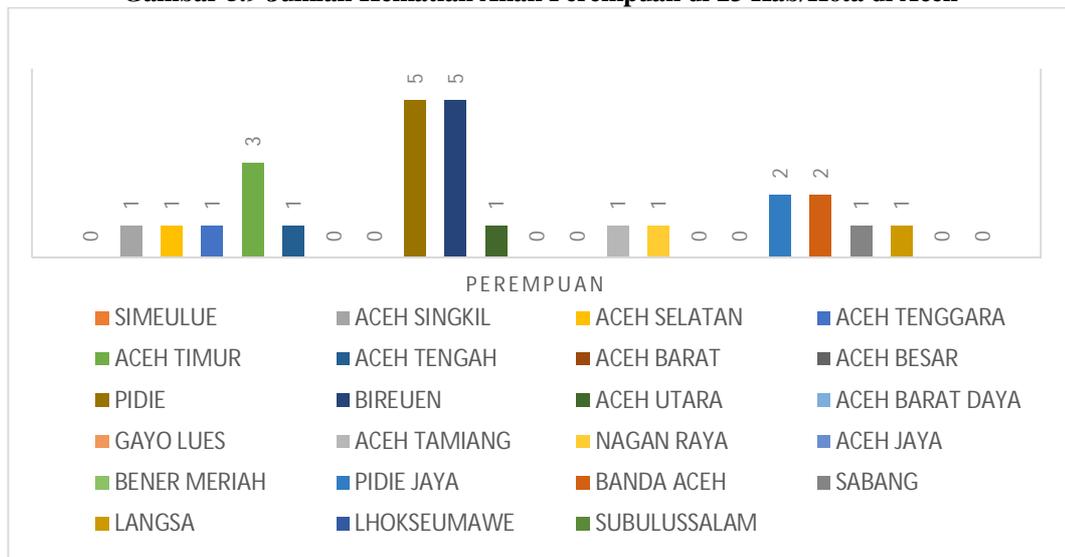
Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah. Dinas Kesehatan Aceh, Tahun 2019, diolah.

Gambar 5.8 menunjukkan jumlah kematian anak laki-laki di 23 Kab/Kota di Aceh. Angka kematian anak laki-laki tertinggi terdapat di Kabupaten Pidie dan



Bireuen sebesar 10. Jumlah kematian anak laki-laki sebesar 10, menunjukkan bahwa dari 1.000 kelahiran hidup terdapat kematian anak laki-laki sebesar 10 jiwa. Sementara itu, terdapat 10 Kab/Kota yang tidak terdapat jumlah kematian anak laki-laki yaitu Kabupaten Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Utara, Gayo Lues, Pidie Jaya, Kota Sabang dan Subussalam.

Gambar 5.9 Jumlah Kematian Anak Perempuan di 23 Kab/Kota di Aceh



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah. Dinas Kesehatan Aceh, Tahun 2019, diolah.

Gambar 5.9 menunjukkan jumlah kematian anak perempuan di 23 Kab/Kota di Aceh. Angka kematian anak perempuan tertinggi terdapat di Kabupaten Pidie dan Bireuen sebesar 5. Jumlah kematian anak perempuan sebesar 5, menunjukkan bahwa dari 1.000 kelahiran hidup terdapat kematian anak perempuan sebesar 5 jiwa. Sementara itu, terdapat 9 Kab/Kota yang tidak terdapat jumlah kematian anak perempuan yaitu Kabupaten Simeulue, Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah, Kota Lhokseumawe dan Subussalam.



d. Angka Kematian Balita

Balita adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir atau berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat 5 tahun. Angka kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun tersebut. Angka kematian balita dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK_{\text{Balita}} = \frac{D_{0-4 \text{ thn}}}{\sum P_{\text{ddk}}_{0-4 \text{ thn}}} \times K$$

AK_{Balita} = Angka Kematian Balita

$D_{1-4 \text{ thn}}$ = Jumlah kematian Balita umur 0-4 tahun pada satu tahun tertentu

$\sum P_{\text{ddk}} (1-4 \text{ thn})$ = Jumlah penduduk usia 0-4 tahun pada pertengahan tahun yang sama

K = Konstanta = 1000

e. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu menurut WHO adalah kematian yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan oleh sebab apapun, tetapi bukan kecelakaan atau kelalaian, dan terjadi selama kehamilan sampai dengan 42 hari setelah persalinan (masa nifas) serta tidak tergantung umur atau letak kehamilan. Artinya, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain. Informasi mengenai tingginya MMR/AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi; program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga



kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

Angka kematian ibu dapat diperoleh dengan rumus:

$$AKI(MMR) = \frac{\sum \text{Kematian Ibu}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times K$$

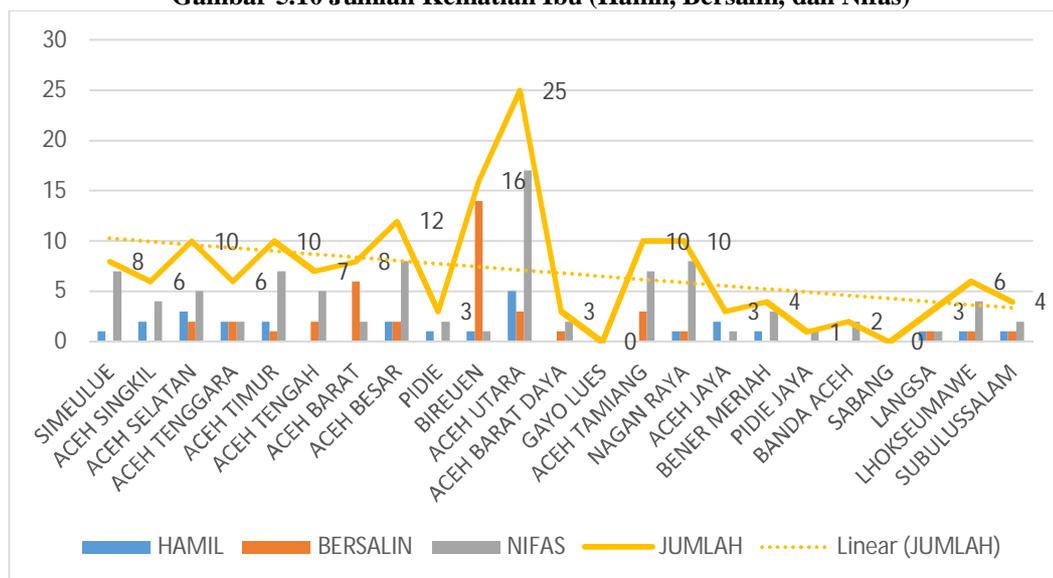
AKI (MMR) = Angka Kematian Ibu

\sum Kematian Ibu = Jumlah kematian Ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan dan pasca persalinan pada satu tahun tertentu

\sum Lahir Hidup = Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu

K = Konstanta = 100.000

Gambar 5.10 Jumlah Kematian Ibu (Hamil, Bersalin, dan Nifas)



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah. Dinas Kesehatan Aceh, Tahun 2019, diolah.

Gambar 5.10 menunjukkan angka kematian ibu di 23 Kab/Kota di Aceh. Kematian ibu tertinggi terdapat di Kabupaten Aceh Utara yaitu sebesar 25, yang artinya dari 100.000 kelahiran hidup terdapat 25 kematian ibu saat hamil, bersalin, maupun pasca bersalin, di mana dapat dirincikan jumlah kematian ibu hamil



sejumlah 5, ibu bersalin sejumlah 3, dan ibu nifas sejumlah 17 orang di Kabupaten Aceh Utara. Jumlah kematian ibu hamil dan ibu nifas tertinggi terdapat di Kabupaten Aceh Utara. Sementara itu, kematian ibu bersalin tertinggi terdapat di Kabupaten Bireuen yaitu sejumlah 14 jiwa. Jumlah, kematian ibu terendah terdapat di Kota Sabang dan Gayo Lues yaitu tidak ada jumlah ibu yang meninggal saat hamil, bersalin, maupun pasca persalinan.

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut.

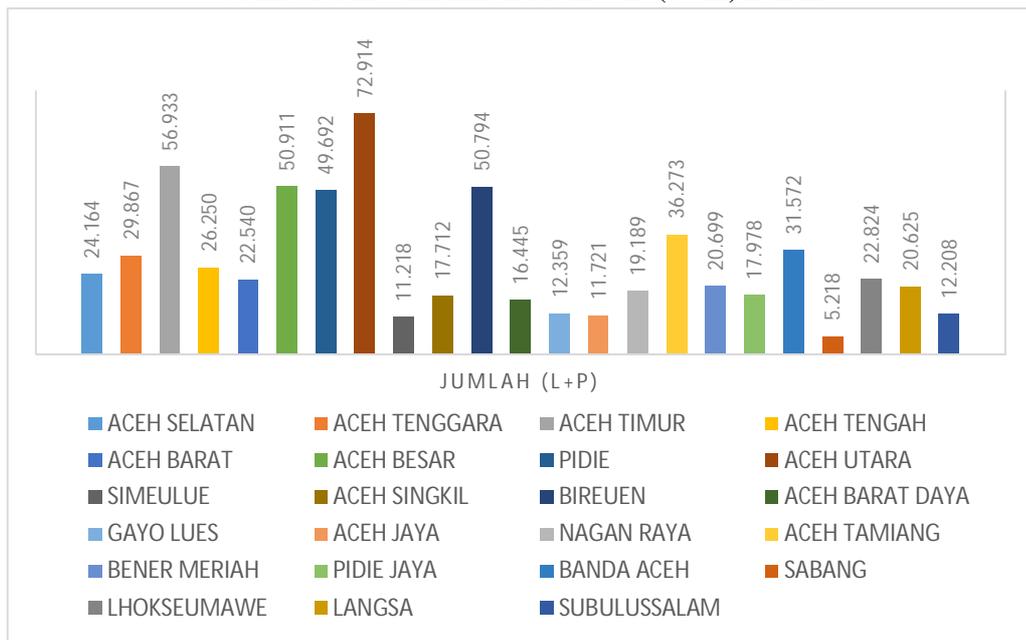
Komposisi penduduk berdasarkan kualitas pendidikan umumnya diukur dengan persentase jumlah penduduk yang berhasil menempuh setiap jenjang pendidikan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Semakin banyak proporsi jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan studi sampai ke jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi, menjadi indikasi semakin baik kualitas penduduk. Indikator untuk mengukur kualitas penduduk dibidang pendidikan di suatu wilayah antara lain dapat dilihat dari Jumlah Penduduk Usia Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Rata-rata Lama Sekolah.



1. Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Jumlah penduduk usia sekolah antara lain berupa jumlah penduduk usia sekolah dasar, jumlah penduduk usia sekolah menengah pertama dan jumlah penduduk usia sekolah menengah atas. Jumlah penduduk usia sekolah dasar adalah penduduk yang berumur (7-12) tahun, jumlah penduduk usia sekolah menengah pertama adalah penduduk berumur (13 - 15) tahun dan jumlah penduduk usia sekolah menengah atas adalah penduduk berumur (16 - 18) tahun. Informasi tentang jumlah penduduk usia sekolah dasar lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.16 berikut.

Gambar 5.11 Jumlah Penduduk Usia (7 - 12) Tahun



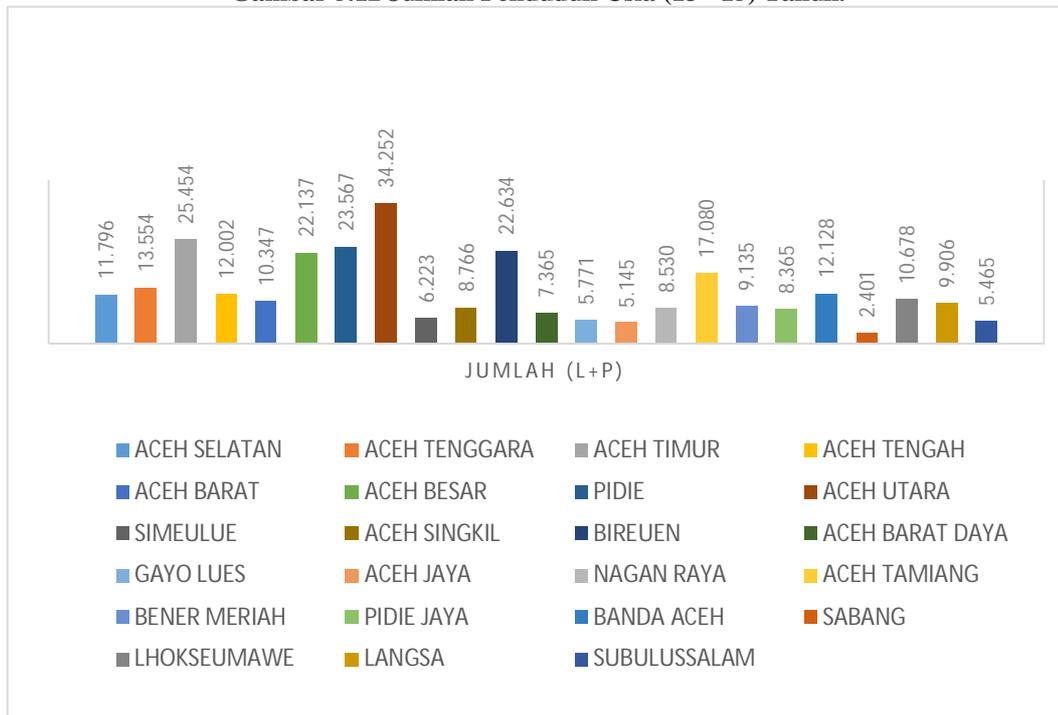
Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Total jumlah penduduk usia (7-12) tahun di Provinsi Aceh yaitu sebesar 640.106 jiwa. Gambar 5.11 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia (7-12) tahun tertinggi berada di Kabupaten Aceh Utara yaitu sebesar 72.914 jiwa, diikuti Kabupaten Aceh Timur sebesar 56.933 jiwa, dan Kabupaten Aceh Besar sebesar



50.911 jiwa. Sedangkan Kota Sabang merupakan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk usia (7-12) tahun terendah yaitu sebesar 5.218 jiwa. Selanjutnya usia (13-15) tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.12 Jumlah Penduduk Usia (13 - 15) Tahun.



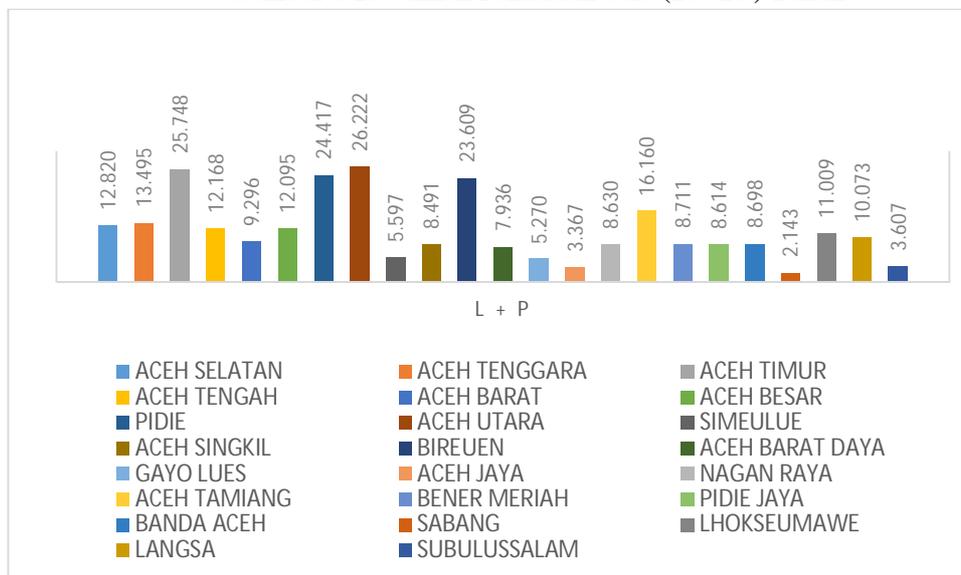
Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Jumlah penduduk usia (13-15) tahun di Provinsi Aceh berjumlah sebesar 292.701 jiwa. Gambar 5.12 menunjukkan jumlah penduduk usia (13-15) tahun. Jumlah penduduk usia (13-15) tahun tertinggi berada di Kabupaten Aceh Utara yaitu sebesar 34.252 jiwa, diikuti Kabupaten Aceh Timur sebesar 25.454 jiwa dan Kabupaten Aceh Timur sebesar 25.454 jiwa. Sementara itu, Kota Sabang merupakan daerah yang memiliki penduduk usia (13-15) tahun terendah, yaitu sebesar 2.401 jiwa, diikuti Kabupaten Aceh Jaya sebesar 5.145 jiwa, dan Kota Subussalam Gayo Lues sebesar 5.465 jiwa.



Jumlah penduduk usia (16-18) tahun di Provinsi Aceh sebesar 268.176 jiwa. Gambar 5.13 menunjukkan jumlah penduduk usia (16-18) tahun. Jumlah penduduk usia (16-18) tahun tertinggi berada di Kabupaten Aceh Utara yaitu sebesar 26.222 jiwa, diikuti Kabupaten Aceh Timur sebesar 25.748 jiwa dan Kabupaten Pidie sebesar 24.417 jiwa. Sementara itu, Kota Sabang merupakan daerah yang memiliki penduduk usia (16-18) tahun terendah, yaitu sebesar 2.143 jiwa, diikuti Kabupaten Aceh Jaya sebesar 3.367 jiwa, dan Kota Subussalam sebesar 3.607 jiwa.

Gambar 5.13 Jumlah Penduduk Usia (16 - 18) Tahun.



Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar didefinisikan sebagai perbandingan persentase anak sekolah menurut jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk dalam kelompok umur tertentu. Dalam Angka Partisipasi Kasar, turut dihitung pendidikan non formal (Paket A, B, dan C). Angka Partisipasi Kasar bertujuan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan.



Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi penduduk dalam bersekolah, tanpa memperhatikan kesesuaian umur dan jenjang pendidikannya. Apabila Nilai APK mendekati atau lebih dari 100%, menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah melebihi umur yang seharusnya atau belum mencukupi umur.

Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat sekolah dasar atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk sekolah dasar.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.



Metode perhitungan APK, adalah sebagai berikut

$$APK_h = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$$

APK_h = Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan (h)

E_h^t = Jumlah penduduk pada tahun (t) dari berbagai usia sedang sekolah pada Jenjang Pendidikan (h)

$P_{h,a}^t$ = Jumlah penduduk yang pada tahun (t) berada pada kelompok usia (a) yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan (h)

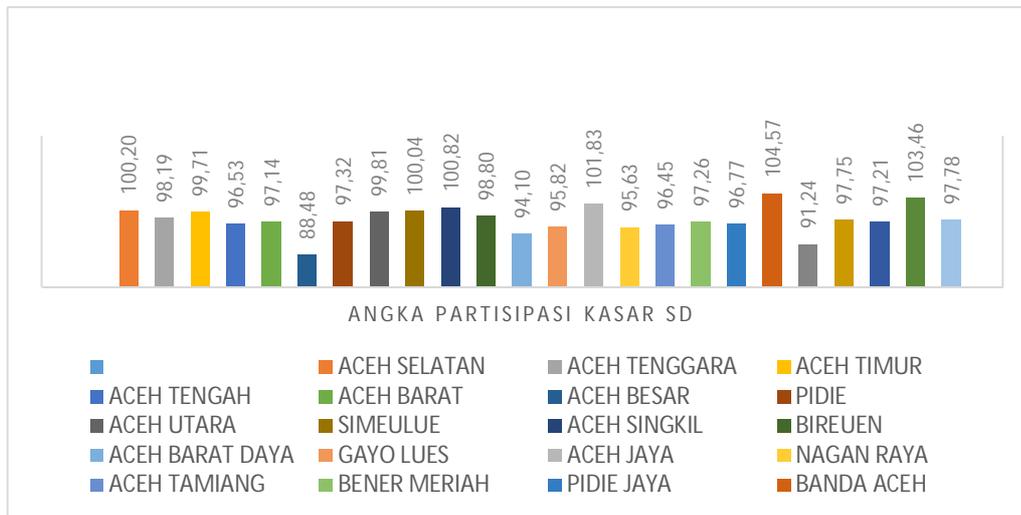
Dalam menghitung Angka Partisipasi Kasar, data non registrasi yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Aceh, terdiri dari :

- Jenjang Pendidikan Dasar: Jumlah siswa usia (7-12) yang menempuh pendidikan di SD/MI/SDLB negeri dan swasta di Aceh.
- Jenjang Pendidikan Menengah Pertama: Jumlah siswa usia (13-15) tahun yang menempuh pendidikan di SMP/MTs/SMPLB negeri dan swasta di Aceh.
- Jenjang Pendidikan Menengah Atas: Jumlah siswa usia (16-18) tahun yang menempuh pendidikan di SMA/SMK/MA/SMLB negeri dan swasta di Aceh.

Selanjutnya untuk mengetahui berapa Angka Partisipasi Kasar usia Sekolah Dasar (SD/MI/SDLB) dapat dilihat melalui gambar berikut.



Gambar 5.14 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB.



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah Dinas Pendidikan Aceh, Tahun 2019 dan Kanwil Kemenag, 2019, diolah

Angka Partisipasi Kasar SD/SLB Tahun 2019 di Aceh sebesar 97,78 %. Angka Partisipasi Kasar menurut kabupaten/kota tertinggi berada di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 104,57 % diikuti Kota Subussalam yaitu sebesar 103,46 %, dan Kabupaten Aceh Jaya sebesar 101,83 %. Nilai APK di atas 100 % dapat kita lihat di enam Kab/Kota, yaitu Kota Subussalam, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Jaya dan kabupaten Aceh Singkil. APK di atas 100 menunjukkan bahwa pada jenjang SD, banyak anak-anak usia di atas 12 tahun tetapi masih sekolah di tingkat SD atau sebaliknya adanya siswa yang lebih muda masuk ke jenjang SD. Adapun Angka Partisipasi Kasar terendah berada di Koabupaten Aceh Besar sebesar 88,48 %, Kota Sabang sebesar 1,24 % dan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 94,10 %. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/SLB dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.3 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/SLB, Tahun 2017 s.d. 2019

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	APK SD/SDLB		
		2017	2018	2019
11.01	Aceh Selatan	85,73	100,40	100,20
11.02	Aceh Tenggara	85,53	99,30	98,19
11.03	Aceh Timur	82,59	102,52	99,71
11.04	Aceh Tengah	80,56	99,10	96,53
11.05	Aceh Barat	75,46	96,38	97,14
11.06	Aceh Besar	61,64	86,31	88,48
11.07	Pidie	72,37	97,51	97,32
11.08	Aceh Utara	85,92	100,30	99,81
11.09	Simeulue	90,68	100,97	100,04
11.10	Aceh Singkil	98,01	100,03	100,82
11.11	Bireuen	66,56	99,54	98,80
11.12	Aceh Barat Daya	77,67	93,98	94,10
11.13	Gayo Lues	91,16	97,00	95,82
11.14	Aceh Jaya	76,96	99,86	101,83
11.15	Nagan Raya	79,75	92,74	95,63
11.16	Aceh Tamiang	88,06	97,37	96,45
11.17	Bener Meriah	76,15	97,34	97,26
11.18	Pidie Jaya	66,75	95,97	96,77
11.71	Banda Aceh	77,92	105,73	104,57
11.72	Sabang	77,80	92,41	91,24
11.73	Lhokseumawe	79,21	96,73	97,75
11.74	Langsa	74,90	95,70	97,21
11.75	Subulussalam	98,04	106,56	103,46
11	Provinsi Aceh	78,89	97,99	97,78

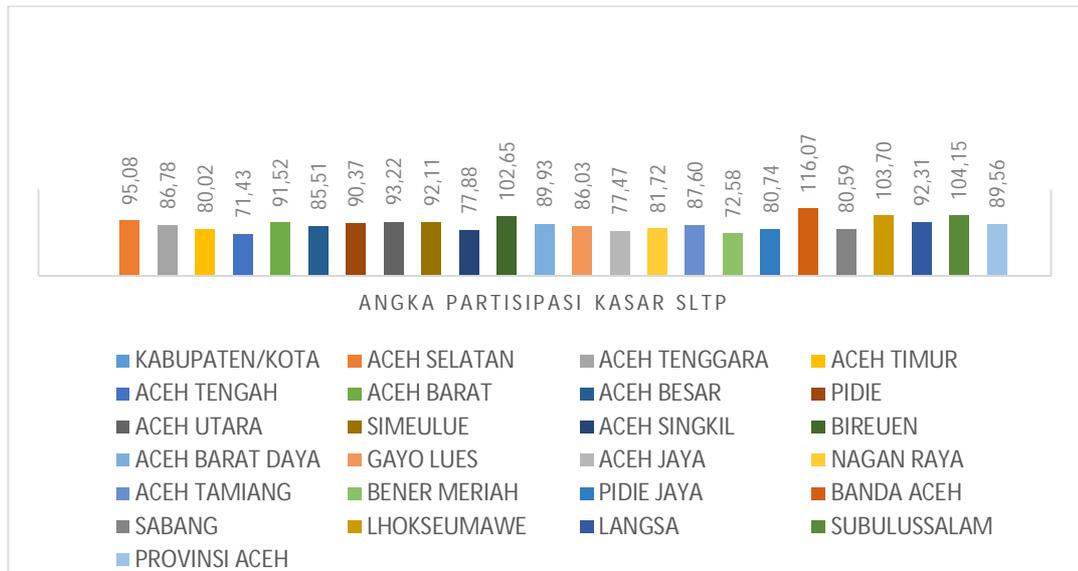
Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2019, diolah.
 Dinas Pendidikan Aceh, Tahun 2019 dan Kanwil Kemenag, 2019, diolah.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/SDLB tahun 2017 sampai dengan 2019 di Aceh mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 sebesar 78,89 % dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 97,99 % pada tahun 2018. Namun demikian, nilai tersebut mengalami



sedikit penurunan pada tahun 2019 sebesar 97,78. Selanjutnya untuk Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPLB dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.15 Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPLB.



Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2019, diolah.
 Dinas Pendidikan Aceh, Tahun 2019 dan Kanwil Kemenag, 2019, diolah.

Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPLB Tahun 2019 di Aceh sebesar 89,56%. Angka Partisipasi Kasar menurut kabupaten/kota tertinggi berada di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 116,07 %, Kota Subussalam sebesar 104,15 % dan Kota Lhokseumawe sebesar 103,07 %. Sementara itu, nilai APK di atas 100 % hanya terdapat di empat Kab/Kota, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Subussalam, dan Kabupaten Bireuen. APK di atas 100 menunjukkan bahwa pada jenjang SMP/SMPLB, banyak anak-anak usia di atas 15 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SMP atau sebaliknya adanya siswa yang lebih muda masuk ke jenjang SMP. Adapun Angka Partisipasi Kasar terendah berada di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 71,43 %, Kabupaten Bener Meriah sebesar 72,58 % dan Kabupaten Aceh jaya sebesar 77,47 %. Sementara itu, Kota Sabang yang merupakan terendah tahun



2018 mengalami peningkatan menjadi 80,59 %. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPLB dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPLB, Tahun 2017 s.d. 2019

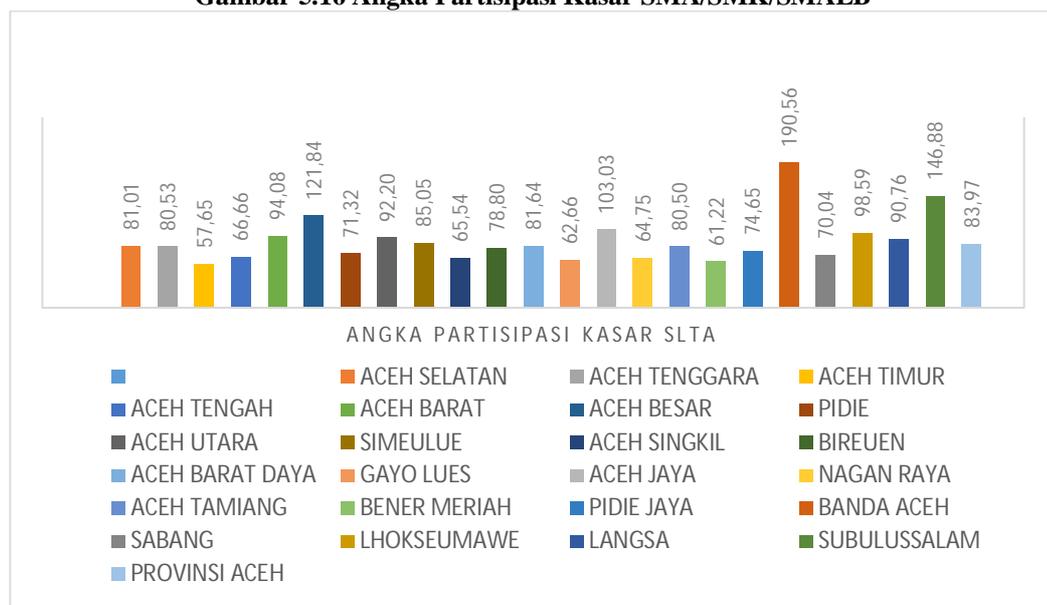
Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	APK SMP/SMPLB		
		2017	2018	2019
11.01	Aceh Selatan	73,27	99,09	95,08
11.02	Aceh Tenggara	72,77	94,31	86,78
11.03	Aceh Timur	51,79	83,47	80,02
11.04	Aceh Tengah	54,73	81,10	71,43
11.05	Aceh Barat	62,09	100,98	91,52
11.06	Aceh Besar	52,84	86,64	85,51
11.07	Pidie	58,02	92,48	90,37
11.08	Aceh Utara	72,91	94,40	93,22
11.09	Simeulue	76,74	89,58	92,11
11.10	Aceh Singkil	74,72	84,11	77,88
11.11	Bireuen	71,86	104,16	102,65
11.12	Aceh Barat Daya	72,14	97,38	89,93
11.13	Gayo Lues	74,33	83,88	86,03
11.14	Aceh Jaya	70,36	95,82	77,47
11.15	Nagan Raya	70,90	82,32	81,72
11.16	Aceh Tamiang	69,99	88,60	87,60
11.17	Bener Meriah	58,02	81,33	72,58
11.18	Pidie Jaya	58,99	92,40	80,74
11.71	Banda Aceh	86,40	121,27	116,07
11.72	Sabang	66,36	79,79	80,59
11.73	Lhokseumawe	72,05	109,34	103,70
11.74	Langsa	65,90	97,09	92,31
11.75	Subulussalam	70,88	102,93	104,15
11	Provinsi Aceh	66,31	93,15	89,56

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2019, diolah.
Dinas Pendidikan Aceh, Tahun 2019 dan Kanwil Kemenag, 2019, diolah.



Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPLB tahun 2017 sampai dengan 2019 di Aceh mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 sebesar 66,31 % mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 89,56 % pada tahun 2018. Namun demikian, APK SMP/SMPLB tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 3,59 % menjadi 89,56 %. Penurunan ini ditandai dengan banyak menurunnya APK di beberapa Kabupaten/Kota di Aceh. Selanjutnya untuk Angka Partisipasi Kasar SMA/SMALB dapat dilihat pada gambar 5.16 berikut.

Gambar 5.16 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/SMALB



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2019, diolah.
Dinas Pendidikan Aceh, Tahun 2019 dan Kanwil Kemenag, Tahun 2019, diolah.

Angka Partisipasi Kasar SMA/SMALB Tahun 2019 di Aceh sebesar 83,97%. Angka Partisipasi Kasar menurut kabupaten/kota tertinggi berada di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 190,56 %, Kota Subussalam sebesar 146,88 % dan Kabupaten Aceh Besar sebesar 121,84 %. Sementara itu, nilai APK di atas 100 % hanya terdapat di 4 Kota yaitu Kota Banda Aceh dan Kota Subussalam, Kabupaten



Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Jaya. APK di atas 100 menunjukkan bahwa pada jenjang SMA/SMALB, banyak anak-anak usia di atas 18 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SMA atau sebaliknya adanya siswa yang lebih muda masuk ke jenjang SMA. Adapun Angka Partisipasi Kasar terendah berada di Kabupaten Aceh Timur sebesar 57,65 %, Kabupaten Gayo Lues sebesar 62,66 % dan Kabupaten Nagan Raya sebesar 64,75 %. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMALB dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/SMALB, Tahun 2017 s.d. 2019

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	APK SMA/SMK/SMALB		
		2017	2018	2019
11.01	Aceh Selatan	61,84	77,59	81,01
11.02	Aceh Tenggara	67,32	84,80	80,53
11.03	Aceh Timur	43,64	58,38	57,65
11.04	Aceh Tengah	56,54	74,47	66,66
11.05	Aceh Barat	73,14	97,27	94,08
11.06	Aceh Besar	51,95	86,48	121,84
11.07	Pidie	56,22	71,19	71,32
11.08	Aceh Utara	54,31	74,77	92,20
11.09	Simeulue	84,46	87,83	85,05
11.10	Aceh Singkil	58,83	71,93	65,54
11.11	Bireuen	58,29	82,92	78,80
11.12	Aceh Barat Daya	71,99	80,08	81,64
11.13	Gayo Lues	55,16	64,93	62,66
11.14	Aceh Jaya	64,76	88,36	103,03
11.15	Nagan Raya	58,62	63,93	64,75
11.16	Aceh Tamiang	63,32	76,65	80,50



Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	APK SMA/SMK/SMALB		
		2017	2018	2019
11.17	Bener Meriah	54,25	70,81	61,22
11.18	Pidie Jaya	51,79	73,91	74,65
11.71	Banda Aceh	129,72	153,92	190,56
11.72	Sabang	61,37	68,48	70,04
11.73	Lhokseumawe	83,39	100,79	98,59
11.74	Langsa	76,70	92,76	90,76
11.75	Subulussalam	76,26	94,62	146,88
11	Provinsi Aceh	62,18	80,54	83,97

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2019, diolah.

Dinas Pendidikan Aceh, Tahun 2019 dan Kanwil Kemenag, Tahun 2019, diolah.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/SMALB tahun 2017 sampai dengan 2019 di Aceh mengalami peningkatan 3 tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 sebesar 62,18 % dan terus mengalami kenaikan di mana pada Tahun 2018 mencapai 80,544 % dan 83,97 % pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan semakin tingginya partisipasi penduduk dalam bersekolah SMA/SMK/SMALB, tanpa memperhatikan kesesuaian umur dan jenjang pendidikannya.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.



Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar sekolah dasar yaitu (7-12) tahun. Rumus untuk menghitung Angka Partisipasi Murni :

APM_h^t = Angka Partisipasi Murni Pada Jenjang Pendidikan (h) pada tahun (t)

$$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100$$

$E_{h,a}^t$ = Jumlah murid kelompok usia (a) yang bersekolah ditingkat pendidikan (h) pd tahun (t)

$P_{h,a}^t$ = Jumlah penduduk pada tahun (t) berada pada kelompok usia (a) yang berkaitan dengan jenjang pendidikan (h)

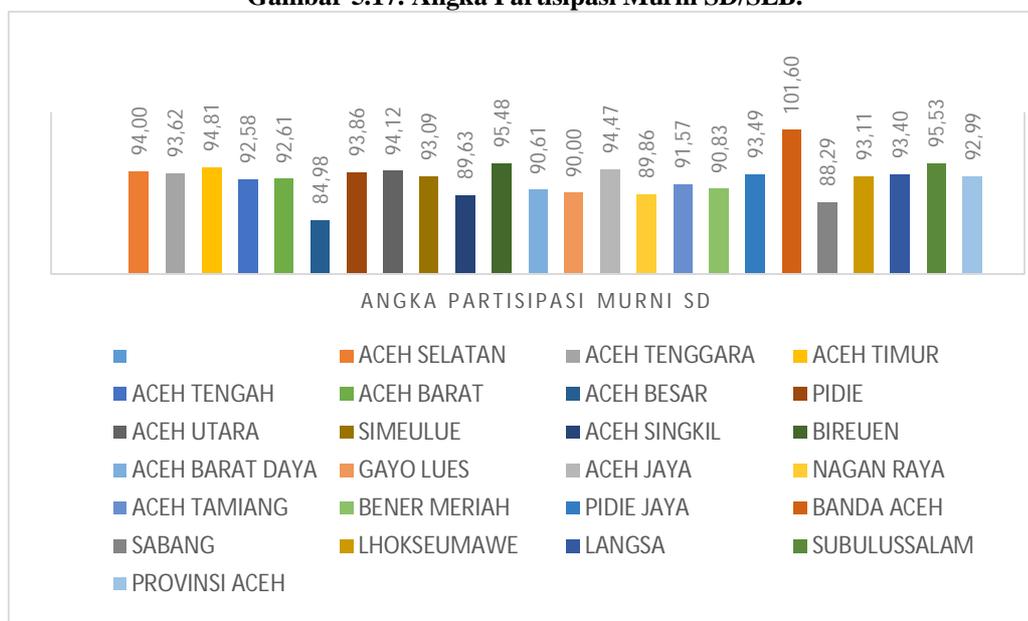
Dalam menghitung Angka Partisipasi Murni data yang digunakan dari Dinas Pendidikan Aceh, yang terbagi dari :

- Jenjang Pendidikan Dasar : Jumlah siswa yang menempuh pendidikan di SD/SDLB negeri dan swasta di Aceh.
- Jenjang Pendidikan Menengah : Jumlah siswa yang menempuh pendidikan SMP/SMPLB negeri dan swasta di Aceh.
- Jenjang Pendidikan Atas : Jumlah siswa yang menempuh pendidikan di SMA/SMK/SMLB negeri dan swasta di Aceh.



Selanjutnya untuk mengetahui berapa Angka Partisipasi Murni usia Sekolah Dasar (SD/SLB) dapat dilihat melalui gambar berikut ini. Angka Partisipasi Murni SD/SLB di Aceh sebesar 92,99 %. Angka Partisipasi Murni menurut kabupaten/kota yang tertinggi berada di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 101,60 %, disusul Kota Subussalam sebesar 95,53 % dan Kabupaten Bireun sebesar 95,48 %. APM Kota Banda Aceh sebesar 101,60 % artinya secara keseluruhan dari 100 penduduk usia SD/ sederajat, semua penduduk bersekolah di bangku SD/ sederajat. Adapun Angka Partisipasi Murni terendah berada di Kabupaten Aceh Besar sebesar 84,98 %. Artinya, dari 100 penduduk usia 7-12 tahun 85 orang bersekolah di bangku SD. Hal ini disebabkan masih banyaknya penduduk Aceh Besar yang memilih bersekolah SD di Kota Banda Aceh, sehingga jumlah penduduk di Banda Aceh yang bersekolah juga melebihi total penduduk Banda Aceh.

Gambar 5.17. Angka Partisipasi Murni SD/SLB.



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2019, diolah.
Dinas Pendidikan Aceh, Tahun 2019 dan Kanwil Kemenag, tahun 2019, diolah.



Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/SLB tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6. Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/SLB, Tahun 2017 s.d. 2019.

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	APM SD/SDLB		
		2017	2018	2019
11.01	Aceh Selatan	77,66	93,77	94,00
11.02	Aceh Tenggara	79,13	93,47	93,62
11.03	Aceh Timur	76,08	96,71	94,81
11.04	Aceh Tengah	75,62	94,43	92,58
11.05	Aceh Barat	70,49	92,39	92,61
11.06	Aceh Besar	57,81	82,97	84,98
11.07	Pidie	66,90	92,83	93,86
11.08	Aceh Utara	79,28	94,55	94,12
11.09	Simeulue	83,26	93,97	93,09
11.10	Aceh Singkil	86,48	89,14	89,63
11.11	Bireuen	61,91	95,58	95,48
11.12	Aceh Barat Daya	72,37	89,60	90,61
11.13	Gayo Lues	82,38	89,55	90,00
11.14	Aceh Jaya	72,86	95,90	94,47
11.15	Nagan Raya	73,02	87,05	89,86
11.16	Aceh Tamiang	81,93	92,10	91,57
11.17	Bener Meriah	70,65	90,43	90,83
11.18	Pidie Jaya	62,94	92,46	93,49
11.71	Banda Aceh	75,13	103,21	101,60
11.72	Sabang	73,88	88,76	88,29
11.73	Lhokseumawe	74,12	92,10	93,11
11.74	Langsa	70,06	91,51	93,40
11.75	Subulussalam	88,13	97,32	95,53
11	Provinsi Aceh	73,11	92,60	92,99

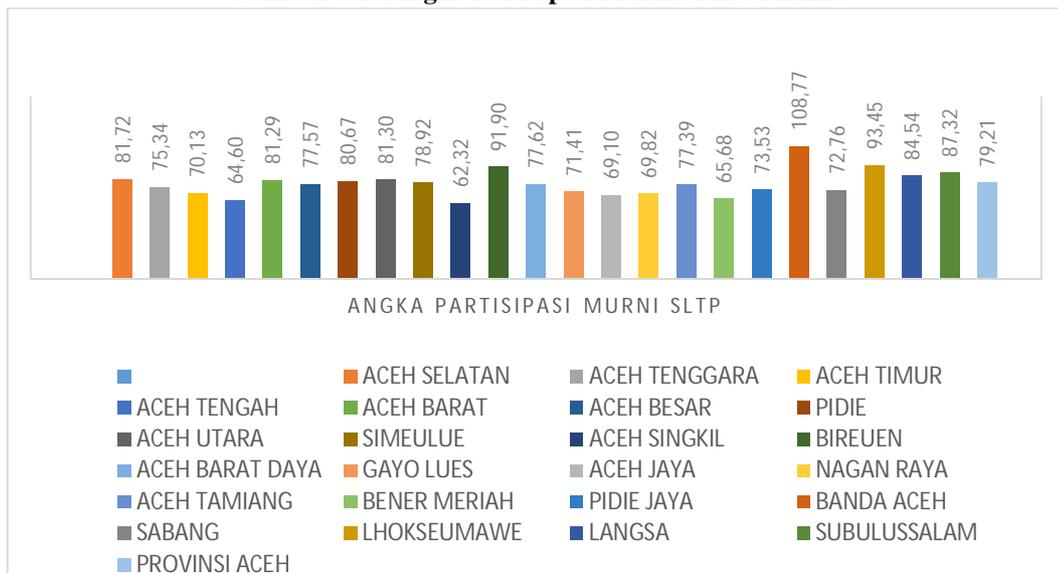
Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2019, diolah.

Dinas Pendidikan Aceh, Tahun 2019 dan Kanwil Kemenag, tahun 2019, diolah.



Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/SLB tahun 2017 sampai dengan 2019 di Aceh mengalami peningkatan dimana APM SD/SDLB pada tahun 2017 sebesar 73,11 dan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2018 nilai APM menjadi sebesar 92,60 dan 92,99 pada tahun 2019. Nilai APM sebesar 92,99 artinya bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun 93 orang bersekolah dibangku SD/Sederajat. Adapun Angka Partisipasi Murni SMP/SMPLB dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5.18 Angka Partisipasi Murni SMP/SMPLB.



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2019, diolah.

Dinas Pendidikan Aceh, Tahun 2019 dan Kanwil Kemenag, tahun 2019, diolah.

Angka Partisipasi Murni SMP/SMPLB di Aceh sebesar 79,21 %. Angka Partisipasi Murni menurut kabupaten/kota yang tertinggi berada di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 108,77 %, disusul Kota Lhokseumawe sebesar 93,45 % dan Kabupaten Bireuen sebesar 91,90 %. Adapun Angka Partisipasi Murni terendah berada di kabupaten Aceh Singkil sebesar 62,32 %. Perkembangan Angka



Partisipasi Murni SMP/SMPLB tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/SMPLB, Tahun 2017 s.d. 2019

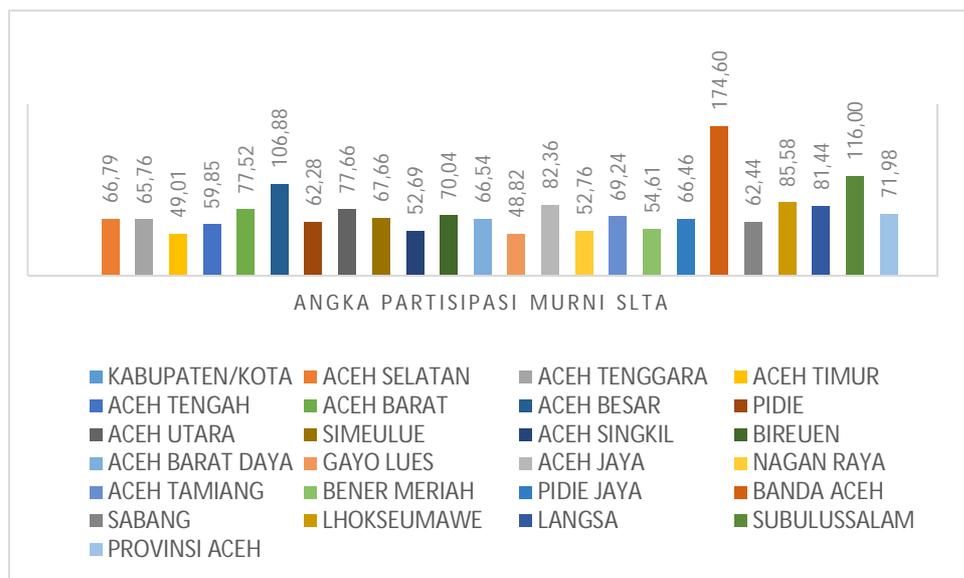
Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	APM SMP/SMPLB		
		2017	2018	2019
11.01	Aceh Selatan	57,82	85,11	81.72
11.02	Aceh Tenggara	61,31	82,55	75.34
11.03	Aceh Timur	43,03	74,14	70.13
11.04	Aceh Tengah	46,65	73,09	64.60
11.05	Aceh Barat	49,50	88,52	81.29
11.06	Aceh Besar	44,13	78,31	77.57
11.07	Pidie	47,73	82,06	80.67
11.08	Aceh Utara	60,54	83,15	81.30
11.09	Simeulue	62,88	77,31	78.92
11.10	Aceh Singkil	58,15	67,70	62.32
11.11	Bireuen	61,20	94,19	91.90
11.12	Aceh Barat Daya	58,44	84,23	77.62
11.13	Gayo Lues	57,79	67,84	71.41
11.14	Aceh Jaya	54,97	81,27	69.10
11.15	Nagan Raya	56,68	69,52	69.82
11.16	Aceh Tamiang	59,44	78,74	77.39
11.17	Bener Meriah	50,86	74,45	65.68
11.18	Pidie Jaya	50,53	84,40	73.53
11.71	Banda Aceh	77,61	113,15	108.77
11.72	Sabang	57,99	72,51	72.76
11.73	Lhokseumawe	61,31	99,23	93.45
11.74	Langsa	57,91	89,35	84.54
11.75	Subulussalam	54,24	85,75	87.32
11	Provinsi Aceh	55,22	82,02	79.21

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2019, diolah.
Dinas Pendidikan Aceh, Tahun 2019 dan Kanwil Kemenag, tahun 2019, diolah.



Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/ sederajat tahun 2017 sampai dengan 2019 di Aceh mengalami fluktuasi dimana APM SMP/ sederajat pada tahun 2017 sebesar 55,22 % pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 sebesar 82,02 %. Namun demikian nilai APM kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 79,21 %. Nilai APM sebesar 79,21 artinya bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun 79 orang bersekolah dibangku SMP/ Sederajat. Adapun Angka Partisipasi Murni SMA/ sederajat dapat dilihat pada gambar 5.19 berikut ini

Gambar 5.19 Angka Partisipasi Murni SMA/ sederajat



**Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2019, diolah.
Dinas Pendidikan Aceh, Tahun 2019 dan Kanwil Kemenag, tahun 2019, diolah.**

Angka Partisipasi Murni SMA/ sederajat di Aceh sebesar 71,98 %. Angka Partisipasi Murni menurut kabupaten/kota yang tertinggi berada di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 174,60 %, disusul Kota Subussalam sebesar 116,0 % dan Kabupaten Aceh Besar sebesar 106,88 %. Adapun Angka Partisipasi Murni terendah berada di Kabupaten Aceh Gayo Lues sebesar 48,82 %. Perkembangan



Angka Partisipasi Murni SMA/ sederajat tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.8 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMA/ sederajat, Tahun 2017 s.d. 2019

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	APM SMA/ sederajat		
		2017	2018	2019
11.01	Aceh Selatan	52,11	67,51	66,79
11.02	Aceh Tenggara	56,85	72,35	65,76
11.03	Aceh Timur	36,52	50,94	49,01
11.04	Aceh Tengah	49,41	67,88	59,85
11.05	Aceh Barat	60,32	83,74	77,52
11.06	Aceh Besar	42,38	76,13	106,88
11.07	Pidie	46,69	62,76	62,28
11.08	Aceh Utara	45,80	65,06	77,66
11.09	Simeulue	64,41	68,98	67,66
11.10	Aceh Singkil	46,00	59,21	52,69
11.11	Bireuen	50,57	75,21	70,04
11.12	Aceh Barat Daya	61,69	67,95	66,54
11.13	Gayo Lues	44,96	52,92	48,82
11.14	Aceh Jaya	50,73	71,20	82,36
11.15	Nagan Raya	47,90	53,83	52,76
11.16	Aceh Tamiang	53,41	67,33	69,24
11.17	Bener Meriah	47,69	63,99	54,61
11.18	Pidie Jaya	44,50	66,96	66,46
11.71	Banda Aceh	113,40	141,29	174,60
11.72	Sabang	53,62	62,37	62,44
11.73	Lhokseumawe	72,88	91,02	85,58
11.74	Langsa	67,85	83,96	81,44
11.75	Subulussalam	60,94	75,61	116,00
11	Provinsi Aceh	52,45	70,61	71,98

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2019, diolah.

Dinas Pendidikan Aceh, Tahun 2019 dan Kanwil Kemenag, tahun 2019, diolah.



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/SMLB tahun 2017 sampai dengan 2019 di Aceh terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 sebesar 52,45 %, mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 70,61 % pada tahun 2018 dan 71,98 % pada tahun 2019. Nilai APM sebesar 71,98 % artinya bahwa dari 100 penduduk usia 15-18 tahun 72 orang bersekolah dibangku SMA/Sederajat.

4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan salah satu pendekatan untuk mengetahui kualitas penduduk secara agregat antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Lama tahun sekolah dapat didekati dengan ijazah tertinggi yang dimiliki setiap penduduk yang ditentukan sebagai berikut :

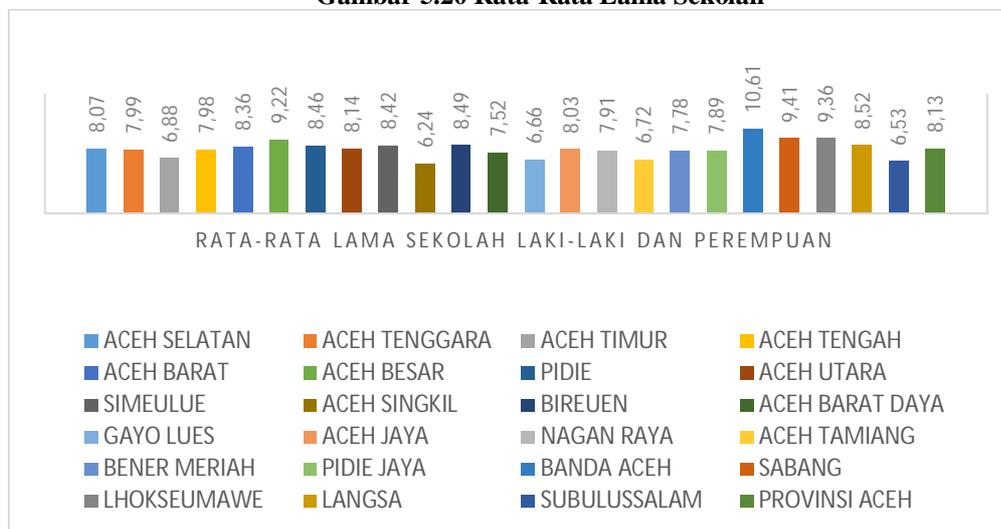
- a. Tidak sekolah/belum tamat SD, lama sekolah 0 tahun;
- b. Tamat SD /Sederajat, lama sekolah 6 tahun;
- c. Tamat SMP, lama sekolah 9 tahun;
- d. Tamat SMA, lama sekolah 12 tahun;
- e. Tamat Diploma I/II, lama sekolah 14 tahun;
- f. Tamat Diploma III/Sarjana Muda, lama sekolah 15 tahun;
- g. Tamat S-I, lama sekolah 16 tahun;
- h. Tamat S-II, lama sekolah 18 tahun;
- i. Tamat S-III, lama sekolah 21 tahun.

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. Gambar 5.25 menjelaskan bahwa rata-rata lama sekolah di Aceh adalah 8 Tahun yaitu di



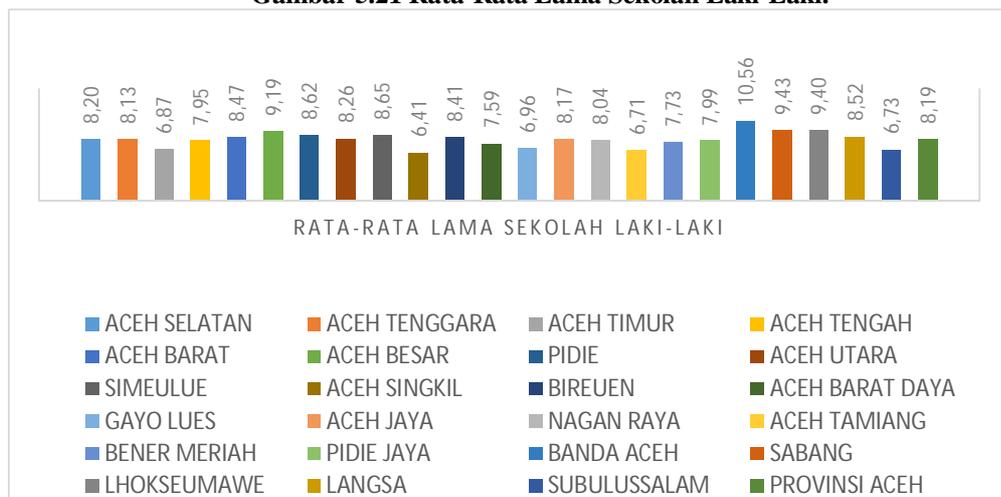
bangku SMP. Rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di Kota Banda Aceh yaitu selama 11 Tahun dan rata-rata terendah terdapat di Kabupaten Aceh Singkil yaitu selama 6 Tahun. Nilai tersebut belum mengalami perubahan dari tahun lalu, di mana Kabupaten Aceh Singkil masih menjadi kabupaten/kota yang memiliki rata-rata lama sekolah terendah.

Gambar 5.20 Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2019, diolah.
Dinas Pendidikan Aceh, Tahun 2019, diolah.

Gambar 5.21 Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki.

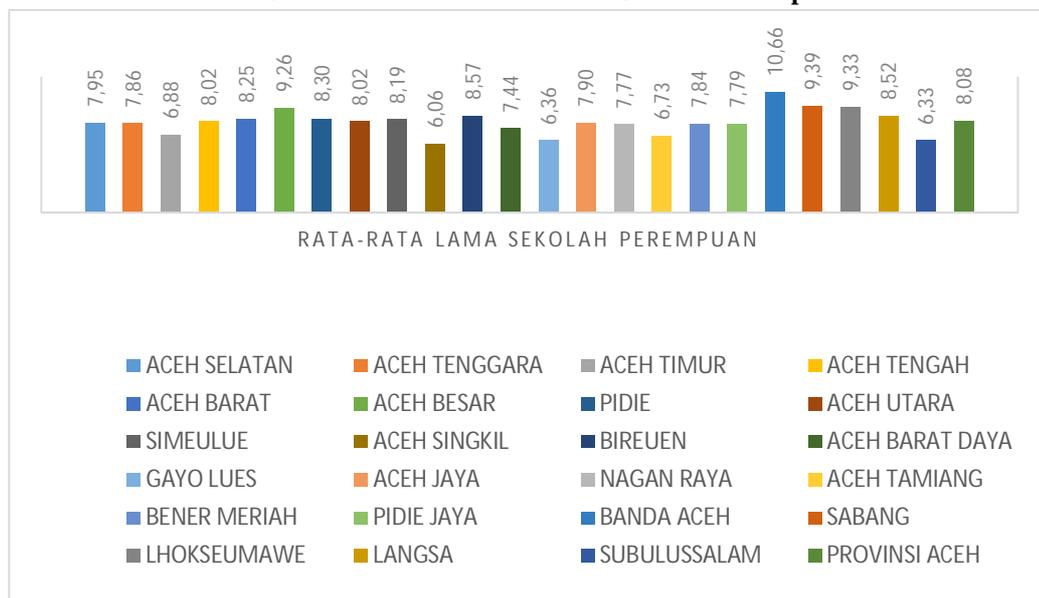


Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2019, diolah.
Dinas Pendidikan Aceh, Tahun 2019, diolah.



Dari gambar di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah laki-laki tertinggi di Aceh terdapat di Kota Banda Aceh, selama 11 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah laki-laki terendah terdapat di Kabupaten Aceh Singkil selama 6 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah laki-laki di Aceh selama 8 tahun yaitu di bangku SMP.

Gambar 5.22 Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan.



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2019, diolah.
Dinas Pendidikan Aceh, Tahun 2019, diolah.

Rata-rata lama sekolah perempuan di Aceh hampir sama dengan rata-rata lama sekolah bagi laki-laki di Aceh yaitu selama 8 tahun. Kota Banda Aceh merupakan daerah yang memiliki lama rata-rata sekolah perempuan tertinggi yaitu sebesar 11 Tahun. Sementara itu di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, dan Gayo Lues yaitu selama 6 tahun merupakan daerah yang memiliki lama rata-rata sekolah perempuan yang terendah dari seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.



C. Ekonomi

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi yang besar dalam *natural resources* maupun *human resources*. Besarnya sumber daya manusia ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang memasuki usia kerja. Jumlah penduduk usia produktif yang terus meningkat ditandai dengan adanya bonus demografi, yang mencapai puncaknya pada tahun 2020-2030. Bonus demografi ini tentunya menjadi peluang bagi Indonesia untuk memajukan kesejahteraan apabila penduduk usia produktif dapat berkontribusi maksimal terhadap pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Ketenagakerjaan juga merupakan bagian yang penting dalam bonus demografi dan kependudukan. Tenaga kerja yang memperoleh pekerjaan dan bekerja secara produktif akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Akibat tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja atau ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia berdampak banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat masuk ke pasar kerja sehingga tingkat pengangguran akan meningkat. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.



Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu.

Struktur Penduduk Aceh Berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, penduduk dibagi menjadi penduduk usia kerja yaitu penduduk yang berumur (15-64) tahun dan penduduk bukan usia kerja yaitu penduduk yang berumur (< 15) tahun dan (> 64) tahun.

Penduduk usia kerja dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang benar - benar mempunyai pekerjaan (dicirikan dengan kode pekerjaan 5,6, sampai dengan 89) dan tidak/belum bekerja kode pekerjaan adalah (1). Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdapat 89 jenis pekerjaan.

Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga dan pensiunan (kode pekerjaan berturut-turut 2,3,4). Konsep kependudukan berbasis SIAK ini penting disepakati sebagai dasar untuk menghitung beberapa indikator ketenagakerjaan yang berbasis data SIAK. Pembahasan mengenai ketenagakerjaan ini menarik karena beberapa alasan, diantaranya.



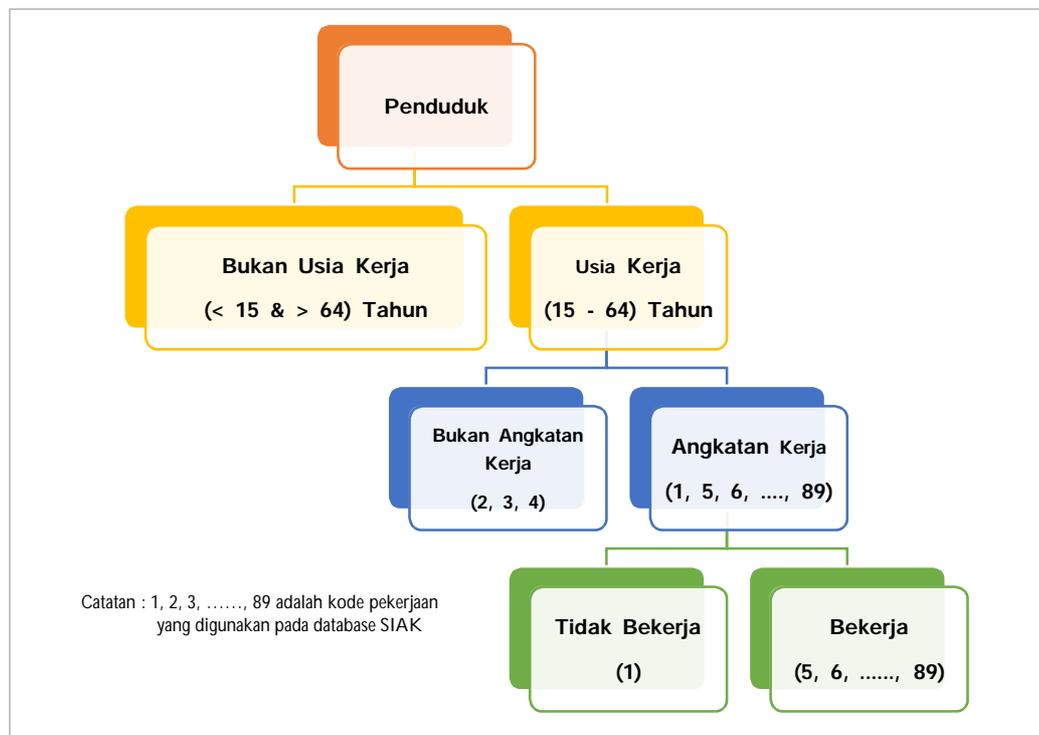
1. Kita dapat melihat berapa besar jumlah penduduk yang bekerja;
2. Kita dapat mengetahui jumlah pengangguran dan;
3. Apabila dilihat dari segi pendidikan maka hal ini akan mencerminkan kualitas tenaga kerja;
4. Dilihat dari statusnya dapat terlihat berapa jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal yang jaminan sosialnya baik dan berapa yang bekerja di sektor informal;
5. Pengetahuan tentang karakteristik dan kualitas tenaga kerja akan berguna sebagai dasar pengembangan kebijakan ketenagakerjaan, terutama pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas SDM yang akan dapat meminimalkan jumlah pengangguran di suatu wilayah. Hal ini penting karena tingginya angka pengangguran akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi masyarakat misalnya meningkatnya kriminalitas.

Terkait dengan hal ini, diperlukan indikator-indikator yang mampu menggambarkan keadaan angkatan kerja dan tenaga kerja untuk selanjutnya dijabarkan sebagai dasar penentuan arah kebijakan ketenagakerjaan. Indikator-indikator ini antara lain tenaga kerja, angka partisipasi angkatan kerja menurut kelompok umur, tingkat pengangguran, angka partisipasi angkatan kerja menurut wilayah, angka partisipasi angkatan kerja menurut kelompok umur dan angka partisipasi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan. Dari besaran indikator-indikator tersebut dapat diketahui keadaan ketenagakerjaan saat ini dan hal apa saja yang memerlukan perbaikan di masa depan.



Indikator ini bermanfaat sebagai wacana bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah dalam pembuatan rencana ketenagakerjaan di wilayahnya. Di samping itu, indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja atau penduduk usia kerja potensial yang dapat memproduksi barang dan jasa. Namun indikator ini hanya menghasilkan jumlah penduduk yang bisa bekerja sehingga kurang tepat untuk digunakan sebagai dasar perencanaan.

Gambar 5.23 Konsep Penduduk Menurut Ketenagakerjaan Berbasis SIAK



1. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang potensial dapat bekerja. Dengan kata lain tenaga kerja adalah penduduk usia 15-64 tahun yang secara potensial dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam



aktivitas tersebut. Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja (*non-labor force*). Yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan mereka yang tidak bekerja tapi siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga dan pensiunan, yang tidak mencari pekerjaan. Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

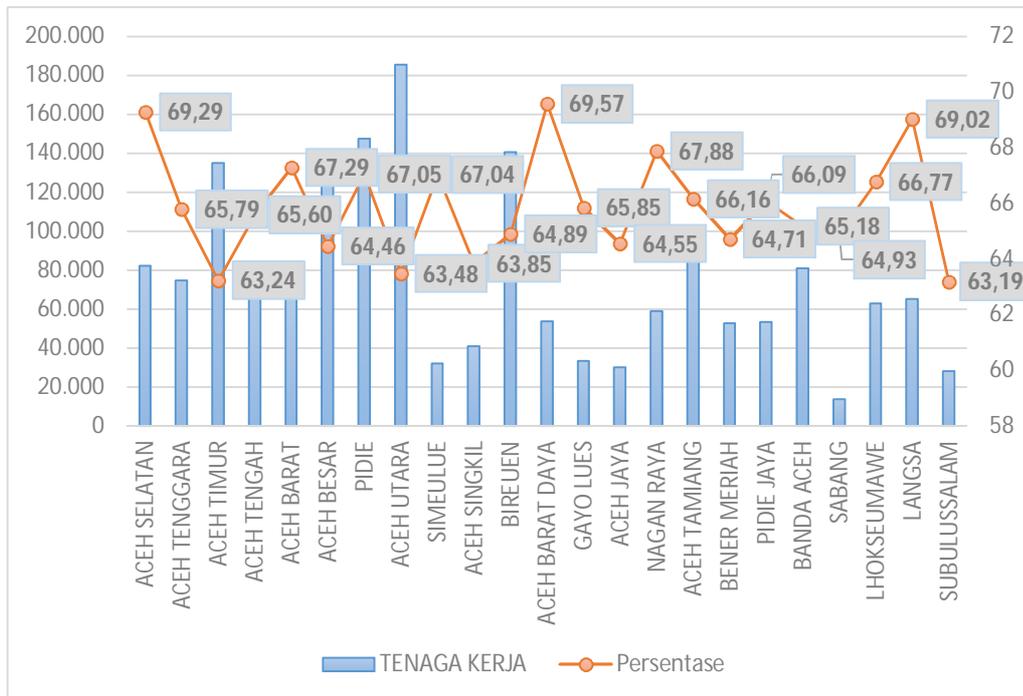
Rumus :

$$\% \text{ Naker} = \frac{\sum P_{\text{ddk}}_{15 \text{ th}+}}{\sum P_{\text{ddk}}} \times 100$$

% Naker = Persentase Tenaga Kerja



Gambar 5.24 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Laki-laki di 23 kab/kota di Aceh

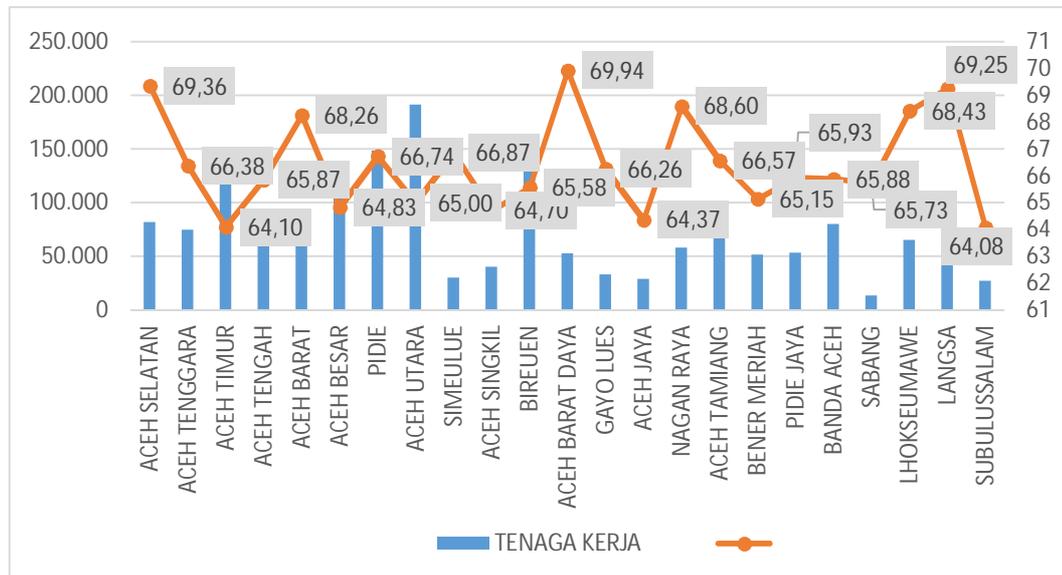


Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019 diolah.

Jumlah tenaga kerja laki-laki di Aceh pada tahun 2019 sebesar 1.736.595 jiwa atau 65,67 % dari total jumlah penduduk laki-laki Aceh pada tahun 2019. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, persentase tenaga kerja laki-laki tertinggi terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 69,57%, diikuti Kabupaten Aceh Selatan sebesar 69,28 %, Kota Langsa sebesar 69,02 %. Namun demikian, jumlah tenaga kerja laki-laki tertinggi terdapat di daerah Kabupaten Aceh Utara dengan total tenaga kerja sebesar 185.618 jiwa. Sementara itu, persentase tenaga kerja laki-laki terendah terdapat di Kota Subussalam sebesar 63,18 % dan jumlah tenaga kerja laki-laki yang terendah adalah Kota Sabang sebesar 13.817 jiwa. Selanjutnya, jumlah tenaga kerja perempuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.25 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Perempuan di 23 kab/kota di Aceh

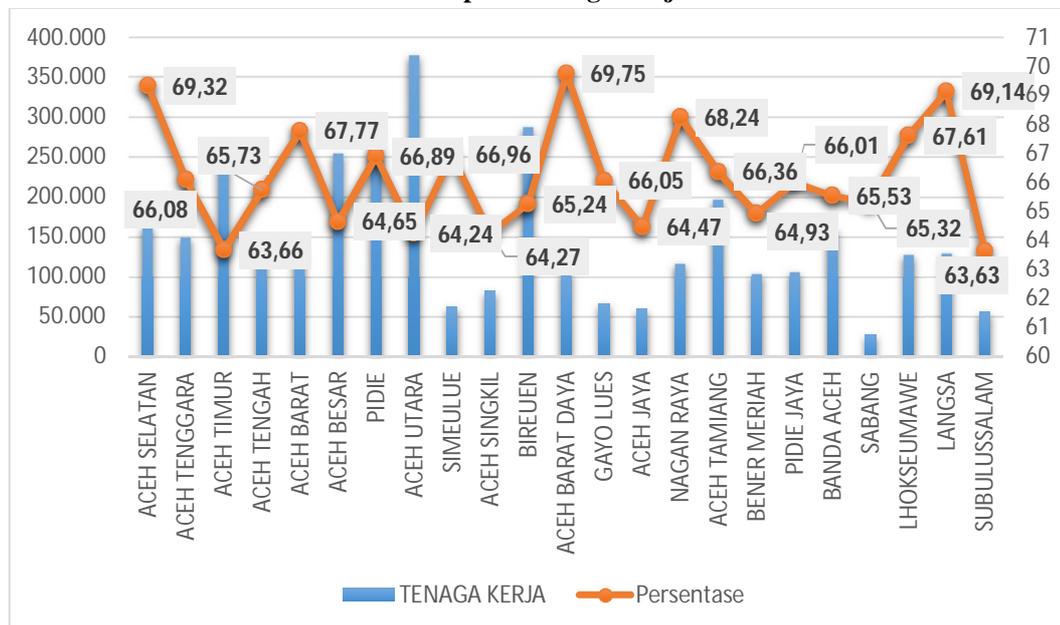


Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019 diolah.

Jumlah tenaga kerja perempuan di Aceh pada tahun 2019 sebesar 1.739.149 jiwa atau 66,25 % dari total jumlah penduduk perempuan Aceh pada tahun 2019. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, persentase tenaga kerja perempuan tertinggi terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 69,93 %, diikuti Kabupaten Aceh Selatan sebesar 69,36 % dan Kota Langsa sebesar 69,25 %. Namun demikian, jumlah tenaga kerja perempuan tertinggi terdapat di Kabupaten Aceh Utara dengan total tenaga kerja perempuan sebesar 191.379 jiwa. Sementara itu, persentase tenaga kerja perempuan terendah terdapat di Kota Subulussalam sebesar 64,08 % dan jumlah tenaga kerja perempuan yang terendah adalah Kota Sabang sebesar 13.744 jiwa. Selanjutnya, jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.31 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja di 23 kab/kota di Aceh



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019 diolah.

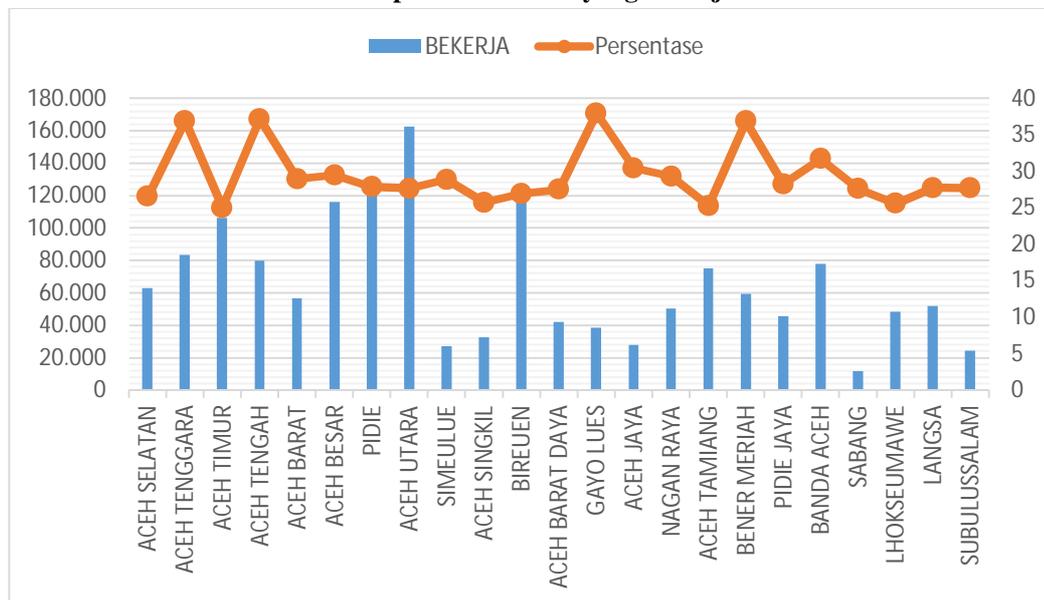
Jumlah tenaga kerja di Aceh pada tahun 2019 sebesar 3.475.744 jiwa atau 65,96 % dari total jumlah penduduk Aceh. Rasio persentase tenaga kerja laki-laki dan perempuan adalah 65,67 : 66,25 %. Artinya proporsi tenaga kerja perempuan lebih besar 0,58 % dibandingkan tenaga kerja laki-laki. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, persentase tenaga kerja tertinggi terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 69,13 %, diikuti Kabupaten Aceh Selatan sebesar 69,32 % dan Kota Langsa sebesar 69,43 %. Namun demikian, jumlah tenaga kerja tertinggi terdapat di Kabupaten Aceh Utara dengan total tenaga kerja sebesar 376.997 jiwa. Sementara itu, persentase tenaga kerja terendah terdapat di Kota Subulussalam sebesar 63,63 % dan jumlah tenaga kerja yang terendah adalah Kota Sabang sebesar 27.561 jiwa.



2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja

Penduduk bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan, baik mereka yang bekerja penuh (*full time*) maupun yang bekerja paruh waktu (*part time*).

Gambar 5.32 Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja di 23 Kab/kota di Aceh



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019 diolah.

Jumlah penduduk Aceh yang bekerja pada tahun 2019 sebesar 1.522.569 jiwa atau 29,89 % dari total jumlah penduduk Aceh. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, persentase penduduk yang bekerja tertinggi terdapat di Kabupaten Gayo Lues yaitu sebesar 37,98 %, diikuti Kabupaten Aceh Tengah sebesar 37,16 % dan Kabupaten Aceh Tenggara sebesar 36,94 %. Namun demikian, jumlah tenaga kerja tertinggi terdapat di Kabupaten Aceh Utara dengan total tenaga kerja sebesar 162.393 jiwa. Sementara itu, persentase tenaga kerja terendah terdapat di



Kabupaten Aceh Timur sebesar 25,04 % dan jumlah tenaga kerja yang terendah adalah Kota Sabang sebesar 11.659 jiwa.

3. Jumlah dan Proporsi Pengangguran

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja) atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angka pengangguran terbuka berguna sebagai acuan bagi pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Rumus:

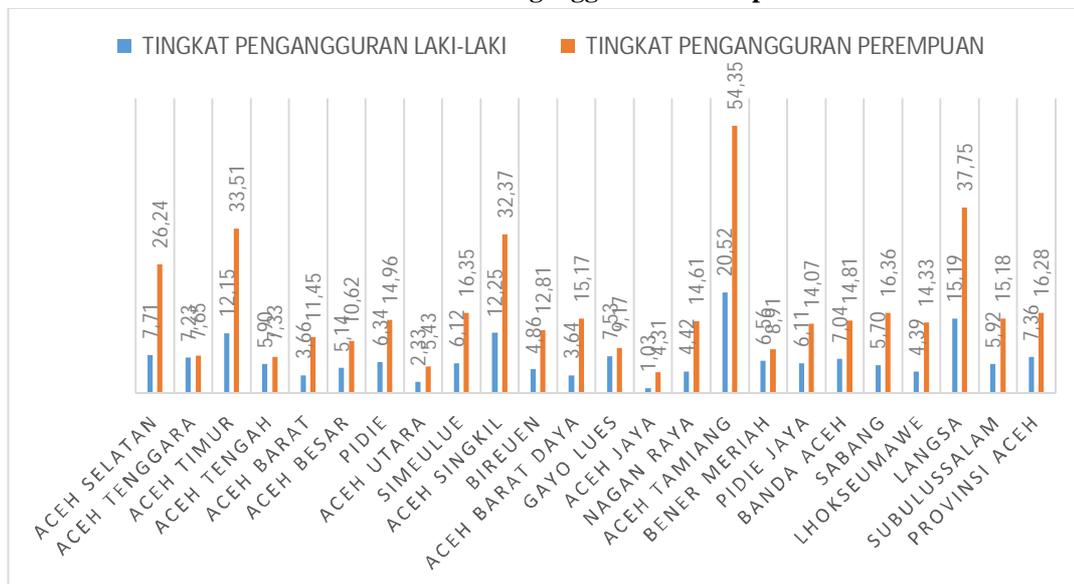
$$\text{Angka Pengangguran} = \frac{\sum \text{Pencari Kerja}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$

a. Angka Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota.

Untuk mengetahui berapa Angka Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota di Aceh dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.28 Persentase Pengangguran di Kabupaten/Kota



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Gambar 5.28 menunjukkan Angka Pengangguran berdasarkan Kabupaten/Kota. Angka pengangguran di Aceh yaitu sebesar 9,81 %. Secara umum, angka pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran laki-laki, dimana persentase perempuan yang menganggur mencapai 16,28 %, lebih 2 kali dari persentase laki-laki yang menganggur yaitu sebesar 7,36 %. Angka pengangguran perempuan tertinggi mencapai 54,35 % terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang. Lebih lanjut angka pengangguran laki-laki tertinggi juga terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu sebesar 20,52 %. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang merupakan Kab/Kota dengan jumlah pengangguran tertinggi di Aceh. Jumlah ini cukup tinggi dan bahkan jauh melebihi angka pengangguran Aceh. Sementara itu, angka pengangguran perempuan terendah terdapat di Kabupaten Aceh Jaya yaitu sebesar 4,31 %. Selanjutnya, angka pengangguran laki-laki terendah juga terdapat di Kabupaten Aceh Jaya yaitu

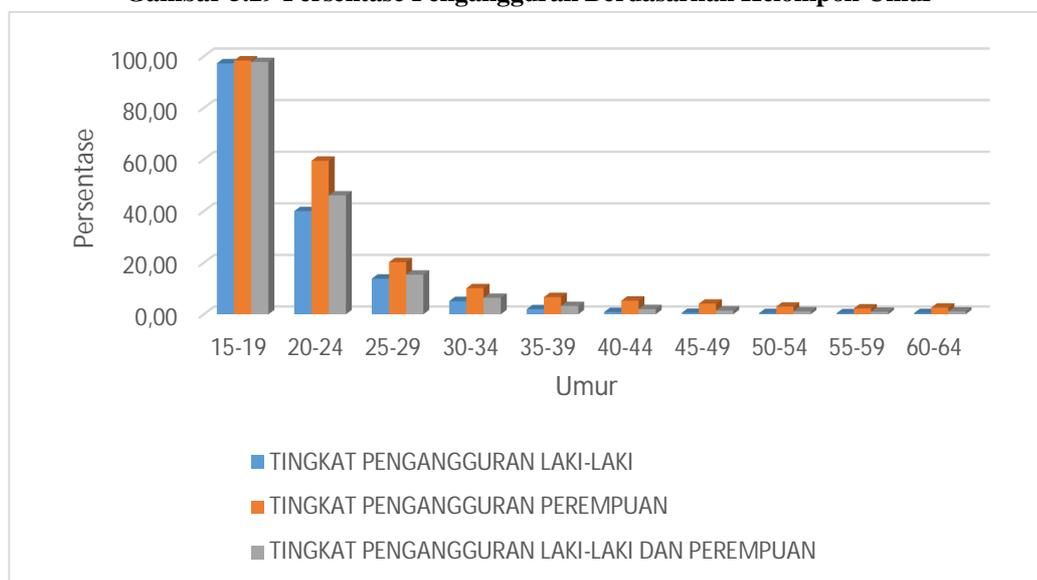


sebesar 1,03 %, yang menunjukkan bahwa sangat sedikit penduduk Aceh Jaya menganggur.

b. Angka Pengangguran Menurut Kelompok Umur

Angka Pengangguran Menurut Kelompok Umur dapat dilihat pada gambar di berikut.

Gambar 5.29 Persentase Pengangguran Berdasarkan Kelompok Umur



Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

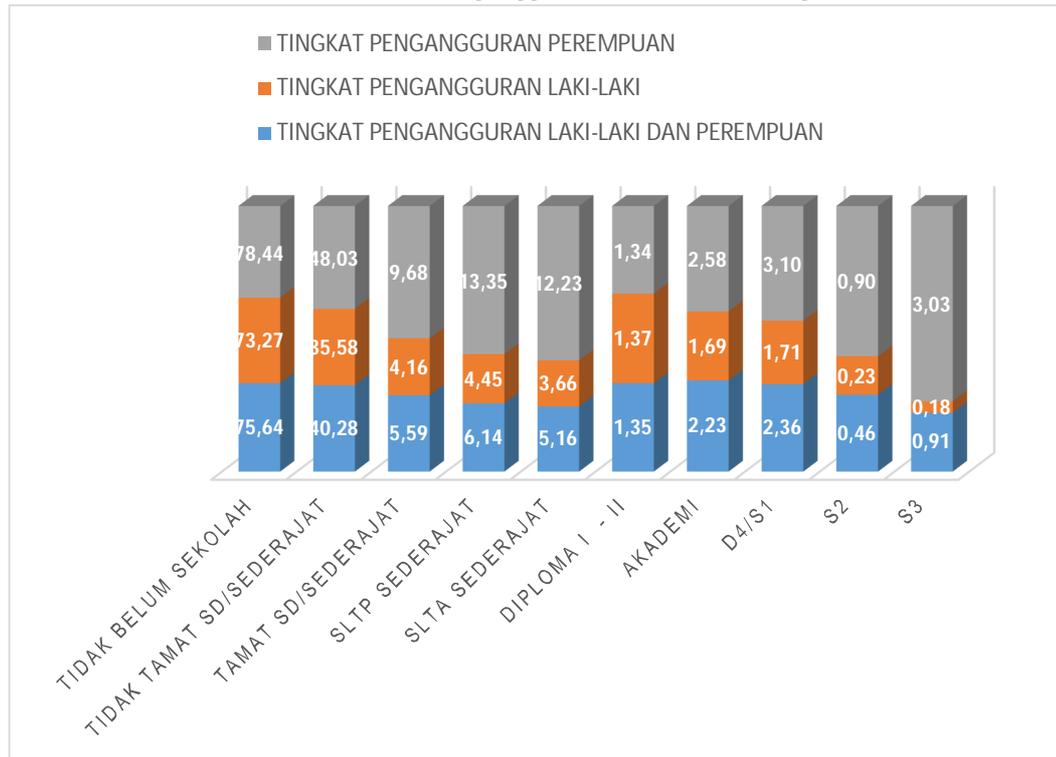
Secara umum, mulai dari tingkat umur (20-24), semakin tinggi kelompok umur suatu penduduk, maka angka pengangguran akan semakin rendah. Angka pengangguran tertinggi terjadi pada kelompok umur (15-19 tahun) baik laki-laki maupun perempuan, yaitu sebesar 97,78 %. Hal ini dikarenakan rata-rata banyak penduduk umur (15-19) tahun yang baru selesai menempuh SMP atau SMA. Selanjutnya, umur (20-24) tahun dan umur (25-29) tahun juga memperoleh angka pengangguran yang tinggi, yaitu sebesar 46,06 % dan 15,34 %. Angka pengangguran laki-laki dan perempuan terendah berada pada kelompok umur (55-59 tahun) yaitu hanya sebesar 0.93 %.



c. Angka Pengangguran Menurut Pendidikan

Selanjutnya untuk Angka Pengangguran Menurut Pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.30 Persentase Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

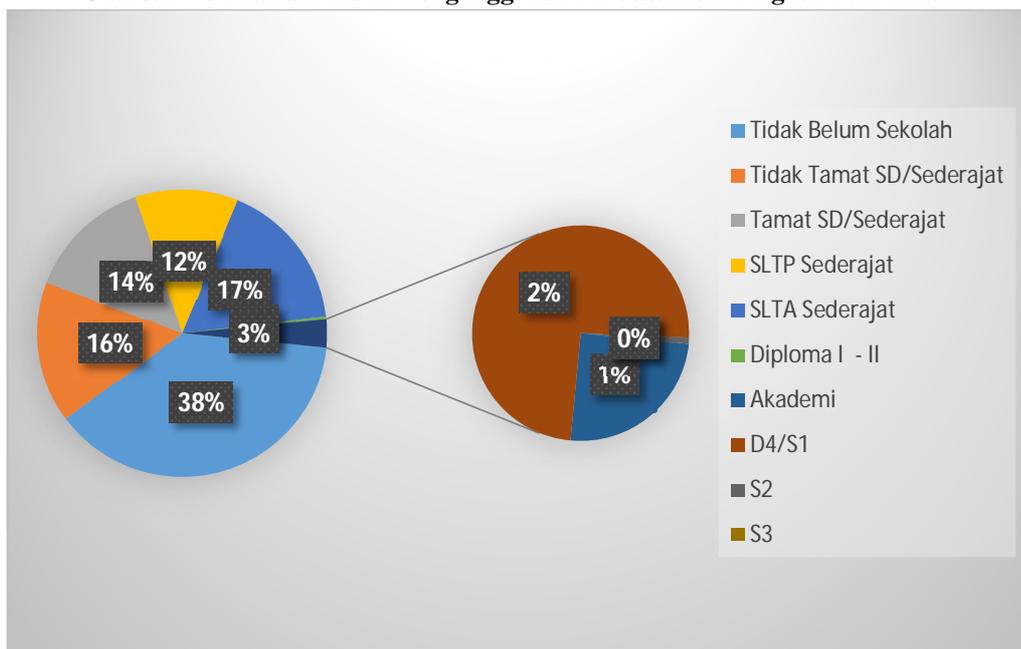
Dari Gambar 5.30 menunjukkan bahwa Angka Pengangguran tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan “Tidak/Belum Sekolah” yaitu sebesar 75,64 %, di mana untuk laki-laki sebesar 78,44 % dan untuk perempuan sebesar 73,27 %. Sementara itu, angka pengangguran terendah rata-rata berada pada jenjang pendidikan “Strata II” yaitu sebesar 0,48 %, di mana perempuan sebesar 0,90 %. Namun demikian, pada laki-laki, angka pengangguran “Strata III” merupakan yang terendah yaitu sebesar 0,18 %.



4. Karakteristik Pengangguran

Karakteristik pengangguran dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, umur, dan status hubungan dalam keluarga. Pendidikan merupakan sarana guna meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada atau dalam kalimat lain, tujuan akhir dari program pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan. Artinya, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi atau bermartabat pula pekerjaan yang mereka dapatkan dan semakin terhindar mereka dari masalah pengangguran.

Gambar 5.31 Karakteristik Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan



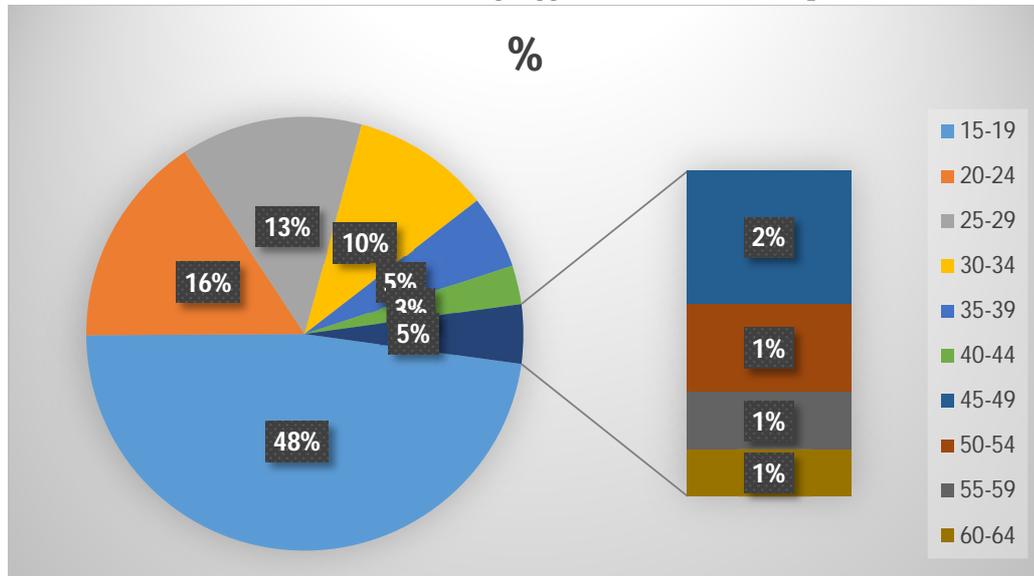
Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Karakteristik pengangguran menurut pendidikan terlihat bahwa sebahagian besar pengangguran di Aceh adalah Tidak/Belum Sekolah sebesar 38 %, kemudian diikuti berpendidikan tamat SMA sebesar 17 % dan tidak Tamat SD/ sederajat sebesar 16 %. Sementara itu, penduduk yang menamatkan pendidikan lanjutan



pasca sarjana S-2 maupun doctoral S-3, hanya sedikit yang menganggur yaitu sebesar 0,03 % dan 0,00 % menganggur.

Gambar 5.32 Karakteristik Pengangguran Menurut Kelompok Umur



Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah

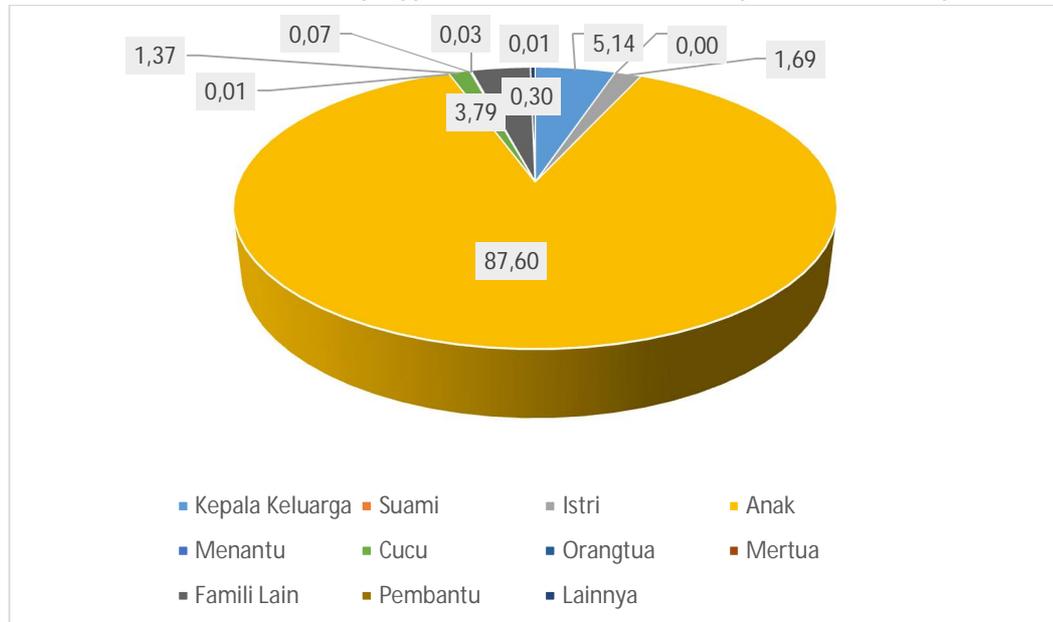
Karakteristik pengangguran menurut kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 5.32 berikut ini. Pada Gambar 5.32 memperlihatkan bahwa Karakteristik Pengangguran Menurut Kelompok Umur yang tertinggi pada kelompok umur (15-19) tahun yaitu sebesar 48 %, kemudian diikuti pada kelompok umur (20-24) tahun sebesar 16 %. Sementara itu, karakteristik pengangguran menurut kelompok umur terendah yaitu kelompok umur (60-64) tahun yaitu sebesar 0,63 %.

Karakteristik pengangguran menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Karakteristik Pengangguran Menurut Status Hubungan dalam Keluarga terlihat bahwa “Anak” adalah yang tertinggi yaitu sebesar sebesar 87,68%. Sementara itu, “menantu” merupakan yang terendah yaitu sebesar 0,01%. Artinya hampir tidak ada “menantu” yang



mengganggu. Sedangkan, Kepala keluarga atau suami yang mengganggu berjumlah sebesar 5,14 %.

Gambar 5.33 Karakteristik Pengangguran Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah

5. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Labor Force Participation Rate) yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara banyaknya angkatan kerja dengan banyaknya tenaga kerja (penduduk berumur 15 tahun ke atas). Penduduk yang di dalamnya termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Analisis angkatan kerja dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk.



Misalnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja cenderung berbeda antar kelompok umur, menurut status perkawinan dan perbedaan tingkat pendidikan.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja (15 - 64) tahun yang mempunyai pekerjaan atau pun yang tidak/belum bekerja. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha tidak/belum terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Angkatan kerja dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

- a. Mereka yang bekerja penuh adalah angkatan kerja yang aktif menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan produksi;
- b. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja;
- c. Pengangguran (*Unemployment*);
 - 1) Pengangguran terbuka (*Open Unemployment*) adalah mereka yang sama sekali tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan (sewaktu-waktu siap bekerja);
 - 2) Setengah menganggur (*under unemployment*) adalah mereka yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikan/keahliannya atau tidak menggunakan sepenuh tenaganya karena kekurangan lapangan perkerjaan, contoh : seorang sarjana bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya.
- d. Pengangguran tersembunyi/tersamar (*Disguise Employment*), artinya suatu pekerjaan dikerjakan oleh pekerja yang berlebihan sehingga mereka tidak bekerja maksimal.



Penghitungan APAK dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam usia kerja. Semakin tinggi APAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu.

Untuk menghitung Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) menggunakan Rumus:

$$APAK = \frac{\sum \text{Angker}}{\sum \text{Pdd}_{15 \text{ th}+}} \times 100 \%$$

$APAK_i$ = Angka Partisipasi Angkatan Kerja menurut kelompok umur i

$\sum \text{Angker}$ = Jumlah Angkatan Kerja (Bekerja+Mencari Pekerjaan)

$\sum \text{Pdd}_{15 \text{ th}+}$ = Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun (usia kerja)

$$APAK_i = \frac{\sum \text{Angker}_i}{\sum \text{Pdd}_i}$$

$APAK_i$ = Angka Partisipasi Angkatan Kerja menurut kelompok umur i

$\sum \text{Angker}_i$ = Jumlah Angkatan Kerja (Bekerja+Mencari Pekerjaan) pada

kelompok umur i

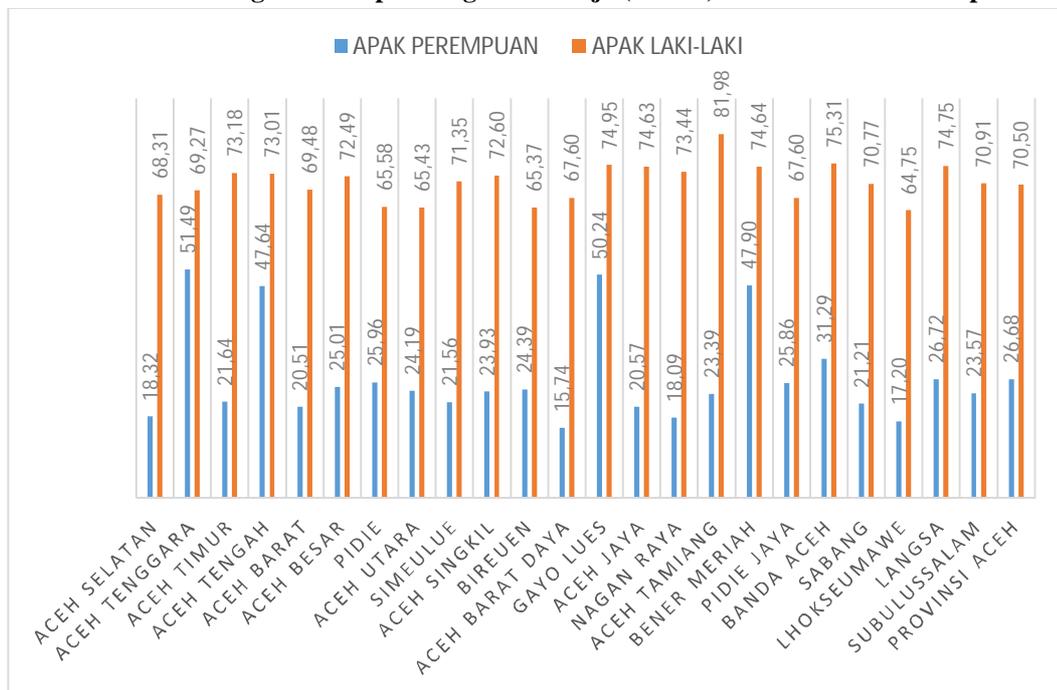
$\sum \text{Pdd}_i$ = Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun (usia kerja) pada kelompok umur i

a. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Berikut ini Angka Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Aceh yang akan disajikan pada Gambar 5.34 dan 5.35.



Gambar 5.343 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Laki-Laki dan Perempuan.

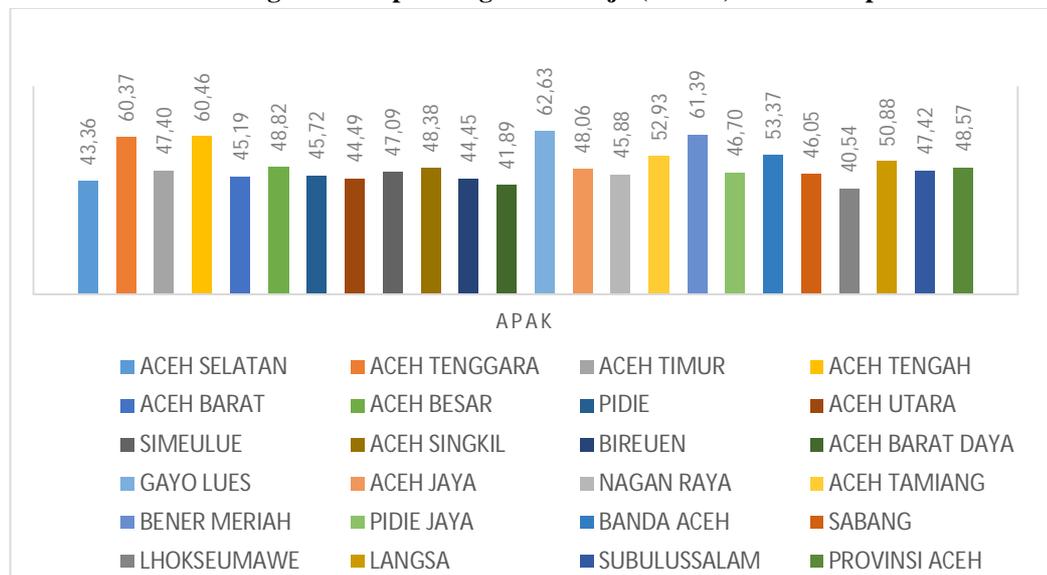


Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Gambar di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) menurut jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan APAK menurut jenis kelamin perempuan yaitu 70,50 : 26,68. Untuk APAK laki-laki menurut kabupaten/kota, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan tingkat APAK tertinggi yaitu sebesar 81,98 % dan APAK terendah terdapat di Kota Lhokseumawe sebesar 64,75 %. Sementara itu, APAK perempuan tertinggi terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu sebesar 51,49 % dan APAK perempuan terendah di Kabupaten Aceh Barat Daya Sebesar 15,74 %. Kecilnya jumlah angkatan kerja perempuan dikarenakan perempuan lebih memilih menjadi ibu rumah tangga (mengurus rumah tangga) selain juga terkait dengan budaya yang menganggap bahwa tempat perempuan adalah di dalam rumah dan laki-laki di luar rumah dalam arti mencari nafkah.



Gambar 5.35 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) di 23 Kabupaten/Kota



Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Berdasarkan gambar 5.35, APAK di Aceh mencapai 48,57 %, artinya 48,57 persen penduduk usia 15-64 tahun terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam kegiatan produktif. APAK yang tertinggi terdapat di Kabupaten Gayo Lues yaitu sebesar 62,63 %, sedangkan yang terendah adalah Kota Lhokseumawe sebesar 40,54 %. Semakin tinggi nilai APAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat atau (berusaha) terlibat dalam kegiatan produktif.

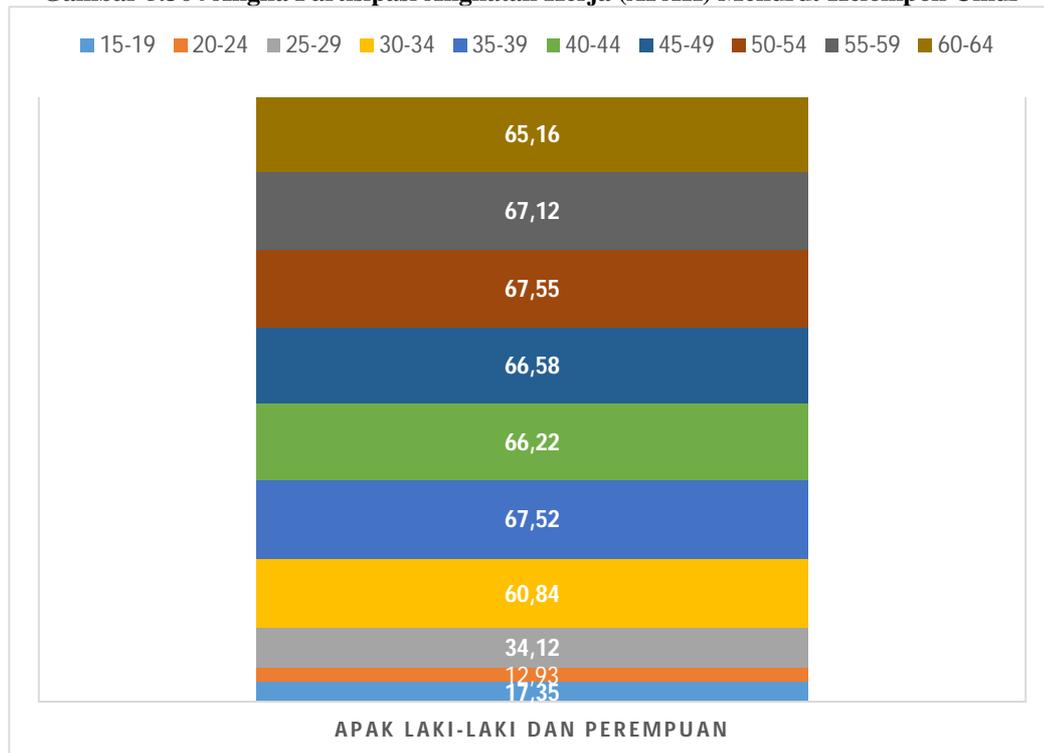
b. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dapat dilihat pada Gambar 5.36. Berdasarkan kelompok umur, terlihat bahwa penduduk yang berusia (20-24) tahun memiliki APAK yang terendah sebesar 12,93 %, sedangkan usia (50-54) dan usia (35-39) tahun memiliki APAK yang tertinggi yaitu sebesar 67,55 % dan 67,52 %. Rendahnya partisipasi angkatan kerja golongan umur (15-19) tahun, disebabkan adanya penundaan penduduk usia kerja ini untuk memasuki



lapangan pekerjaan karena masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S-1, S-2, dan S-3) dan juga kurangnya lapangan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya angkatan kerja berpendidikan tinggi.

Gambar 5.364 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Menurut Kelompok Umur



Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

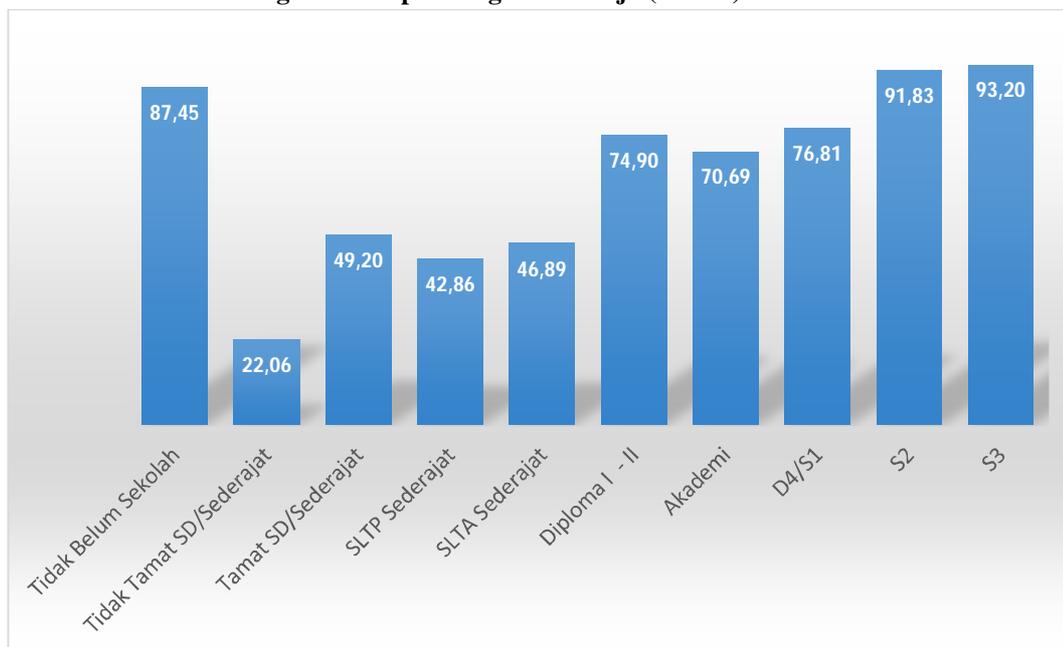
Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Penduduk dan angkatan kerja yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dan penggerak utama pembangunan, namun jumlah angkatan kerja yang besar tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan akan menyebabkan banyaknya pengangguran dan pada akhirnya akan menambah permasalahan sosial lainnya



c. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan

Kualitas sumberdaya manusia khususnya tenaga kerja dapat ditinjau dari tingkat pendidikan formal yang ditamatkan. Jika tenaga kerja mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, maka kualitas sumberdaya manusia tersebut akan semakin tinggi pula, sehingga tingkat pendapatan yang diperoleh juga akan bertambah. Disamping pendidikan formal, pendidikan non formal juga akan menambah atau meningkatkan pendapatannya melalui keahlian atau keterampilannya dalam bidang tertentu. Angka Partisipasi Angkatan Kerja menurut Pendidikan di Aceh dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.37 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Menurut Pendidikan.



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimilikinya, Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Aceh tertinggi adalah Strata-III (S-3) sebesar 93,20 %. Sedangkan partisipasi terendah adalah Tidak Tamat SD/Sederajat sebesar 22,06 %,

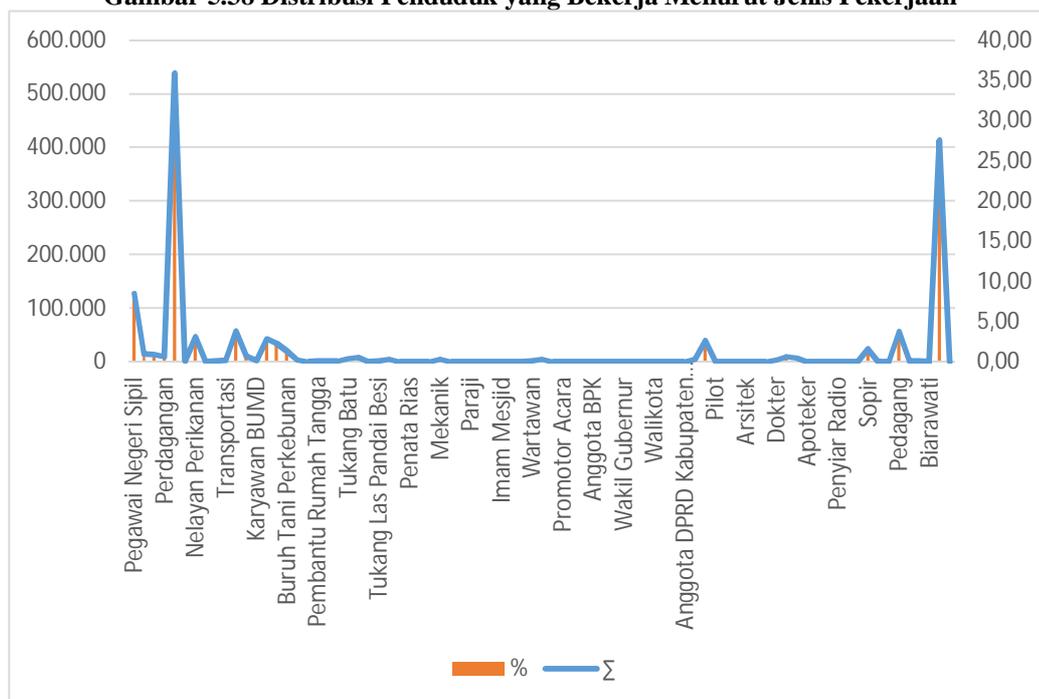


diikuti Tamat SMP sebesar 42,86 % dan Tamat SD sebesar 49,20. Partisipasi Angkatan kerja yang bekerja dengan jenjang pendidikan tidak tamat SD/Sederajat, tamat SD dan tamat SMP persentasenya memang sangat kecil. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang dapat dilakukan sangat terbatas dan kemungkinan besar tidak memiliki keterampilan sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap penghasilan dan tingkat kesejahteraannya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Aceh melalui peningkatan keterampilan dan program pelatihan kerja agar penduduk usia angkatan kerja mampu mandiri secara ekonomi.

6. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan

Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan yaitu jenis pekerjaan yang sedang atau pernah dilakukan oleh orang-orang yang termasuk golongan bekerja. Indikator ini berguna untuk membantu pemerintah daerah dalam memfokuskan kebijakan ketenagakerjaan.

Gambar 5.38 Distribusi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.



Gambar 5.38 menunjukkan bahwa sebahagian besar penduduk Aceh berprofesi sebagai petani dan pekebun yaitu sebanyak 538.989 jiwa atau 35,40 % dari total penduduk diikuti wiraswasta sebesar 27,18 % atau sebesar 413.838 jiwa. Namun demikian, untuk penduduk dengan jenis pekerjaan wiraswasta masih dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan yang benar sekaligus memutakhirkan status elemen data pekerjaan yang sesuai dengan kondisi pekerjaan sebenarnya pada dokumen kependudukan, sebab ada dari penduduk yang bekerja sebagai karyawan honorer/tenaga kontrak di pemerintah namun identitasnya di KTP-el masih tertulis sebagai wiraswasta.

D. Sosial

1. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Pengertian kecacatan adalah adanya disfungsi atau berkurangnya suatu fungsi yang secara objektif dapat diukur /dilihat, karena adanya kehilangan/kelainan dari bagian tubuh seseorang. Penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik. Masing-masing jenis kecacatan tersebut memiliki



karakteristik tersendiri. Demikian juga dengan permasalahan yang dihadapinya, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap berbagai hal dalam kehidupannya. Indikator proporsi penduduk penyandang cacat menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Masing-masing disajikan dalam bentuk tabel tunggal menurut kecamatan.

Angka Penyandang Cacat dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$APC = \frac{\sum PC}{\sum Pddk} \times 100$$

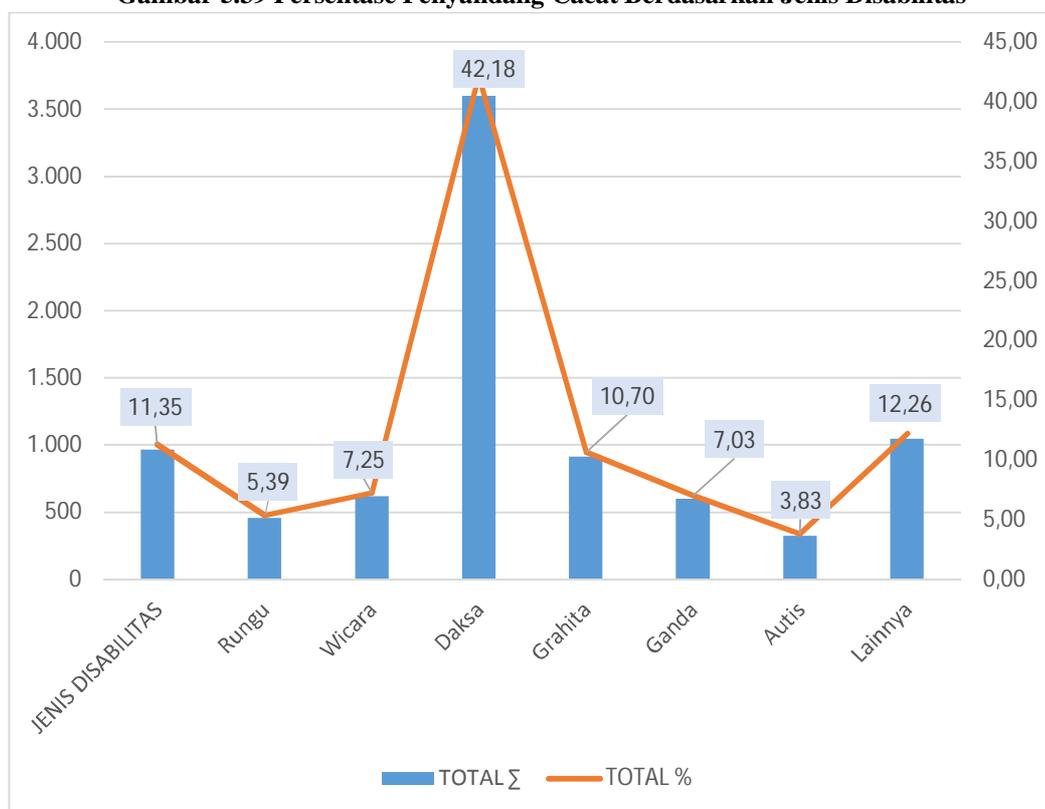
APC = Angka Penyandang Cacat

$\sum PC$ = Jumlah Penyandang Cacat

$\sum Pddk$ = Jumlah Penduduk

Proporsi penyandang cacat di Aceh berdasarkan jenis disabilitas dan kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 5.39 dan 5.40 berikut.

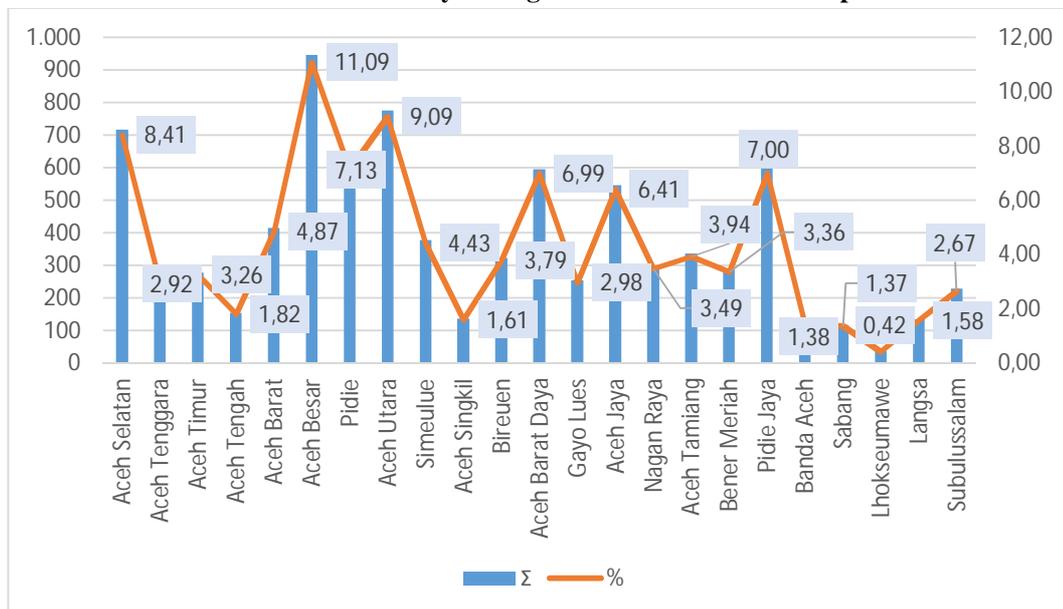
Gambar 5.39 Persentase Penyandang Cacat Berdasarkan Jenis Disabilitas



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah Dinas Sosial Aceh, Tahun 2019, diolah



Gambar 5.40 Persentase Penyandang Cacat Berdasarkan Kabupaten/Kota



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah Dinas Sosial Aceh, Tahun 2019, diolah

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan persentase penyandang cacat tertinggi yaitu cacat fisik pada tahun 2019 sebesar 42,18 % atau 3.518 jiwa dan yang terendah yaitu Autis sebesar 3,83% atau 327 jiwa. Sementara itu, berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah dengan penyandang disabilitas tertinggi yaitu sebesar 11,09 % atau 946 jiwa. Sementara itu, Kota Lhokseumawe merupakan daerah penyandang disabilitas terendah yaitu sebesar 0,42 %. Namun demikian, hal ini tetap menjadi perhatian pemerintah kota untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka. Keadaan penduduk Aceh yang mengalami cacat fisik belum dapat dipastikan penyebab terjadinya, berbagai macam kemungkinan dapat terjadi, misalnya kecelakaan lalu lintas, korban konflik dan bencana alam tsunami, yang merupakan salah satu indikasi yang menyebabkan terjadinya cacat fisik.

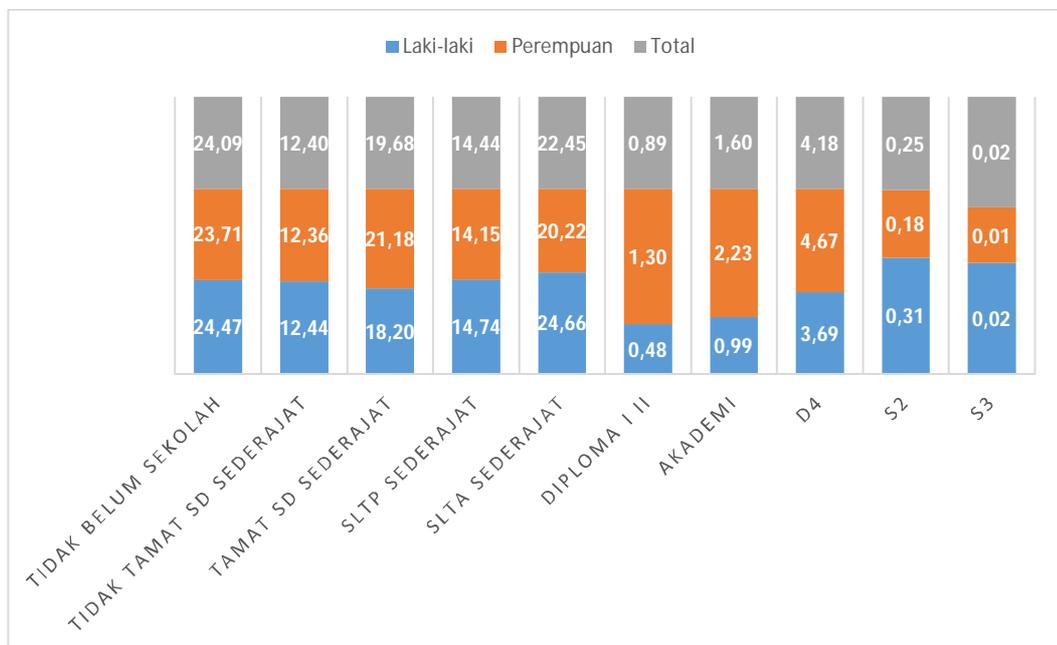


2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan kualitas pendidikan umumnya diukur dengan persentase jumlah penduduk yang berhasil menempuh setiap jenjang pendidikan sekolah, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Semakin banyak proporsi jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan studi sampai ke jenjang SMA dan perguruan tinggi, menjadi indikasi semakin baik kualitas penduduk.

Data pendidikan yang terekam pada database SIAK merupakan data penduduk sesuai pada saat pelaporan masyarakat untuk dicatat dan dicetak pada Kartu Keluarga. Jumlah penduduk menurut pendidikan di Aceh seperti diperlihatkan pada gambar berikut.

Gambar 5.41 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah

Berdasarkan gambar 5.41 persentase tertinggi tingkat pendidikan penduduk Aceh adalah tidak/belum sekolah yaitu sebesar 24,09 % atau berjumlah 1.269.624

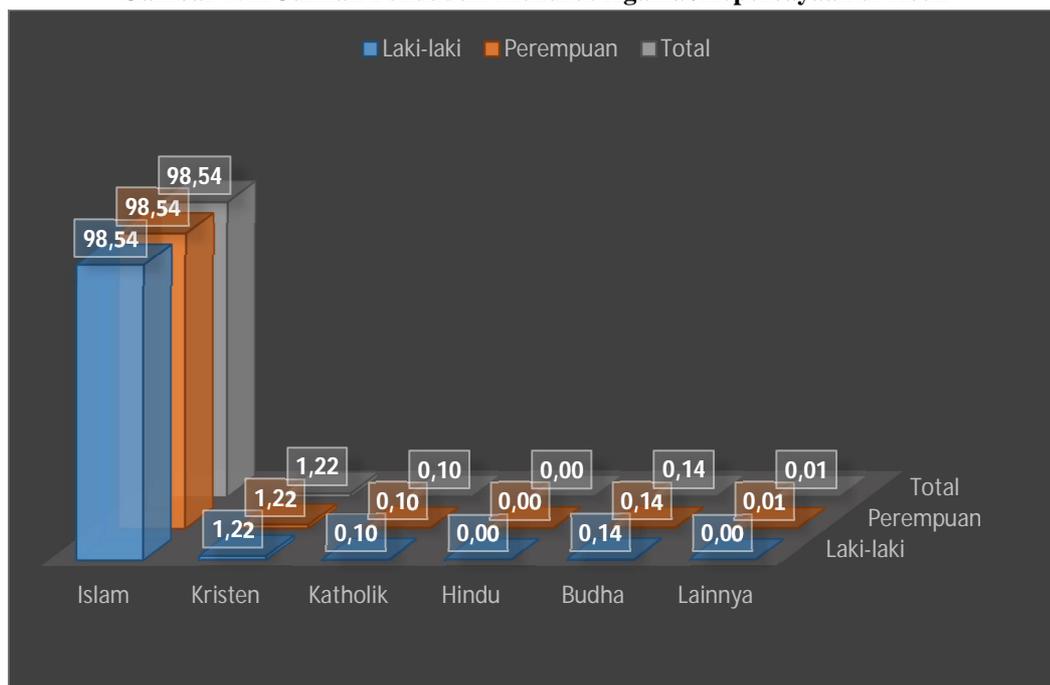


jiwa. Selanjutnya, diikuti dengan penduduk yang Tamat SMA/ sederajat sebesar 22,45% atau 1.183.016 jiwa dan Tamat SD/ sederajat yaitu sebesar 19,68 % atau 1.037.192 jiwa. Adapun pendidikan akhir yang terendah pada pendidikan Strata III dan Strata II sebesar 0,02 % atau 931 jiwa dan 0,25% atau 12.981 jiwa. Data ini merujuk data individu yang terdaftar dalam database kependudukan, sehingga terdapat kemungkinan bahwa pendidikan akhir seseorang sudah sampai pada Strata I/ Diploma IV, Strata II, dan Strata III akan tetapi individu tersebut belum merubah datanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada masing-masing kab/kota.

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Jumlah penduduk menurut agama menggambarkan keadaan penduduk setempat dengan keyakinan yang dianutnya, adapun penduduk Aceh menurut agama tertera pada gambar di bawah berikut.

Gambar 5.42 Jumlah Penduduk Menurut Agama /Kepercayaan di Aceh



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa agama yang dianut mayoritas penduduk di Aceh yaitu agama Islam sebesar 98,54 % atau sebesar 5.192.729 jiwa, diikuti agama Kristen sebesar 1,22 % atau sebesar 64.222 jiwa, Agama Buddha sebesar 0,14 % atau sebesar 7.336 jiwa. Katholik dan Hindu merupakan agama dengan penganut terendah di Aceh, dimana penganut Katholik berjumlah 5.166 jiwa atau 0,10 % dan Agama Hindu dianut oleh 87 jiwa atau 0,00%.

4. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah

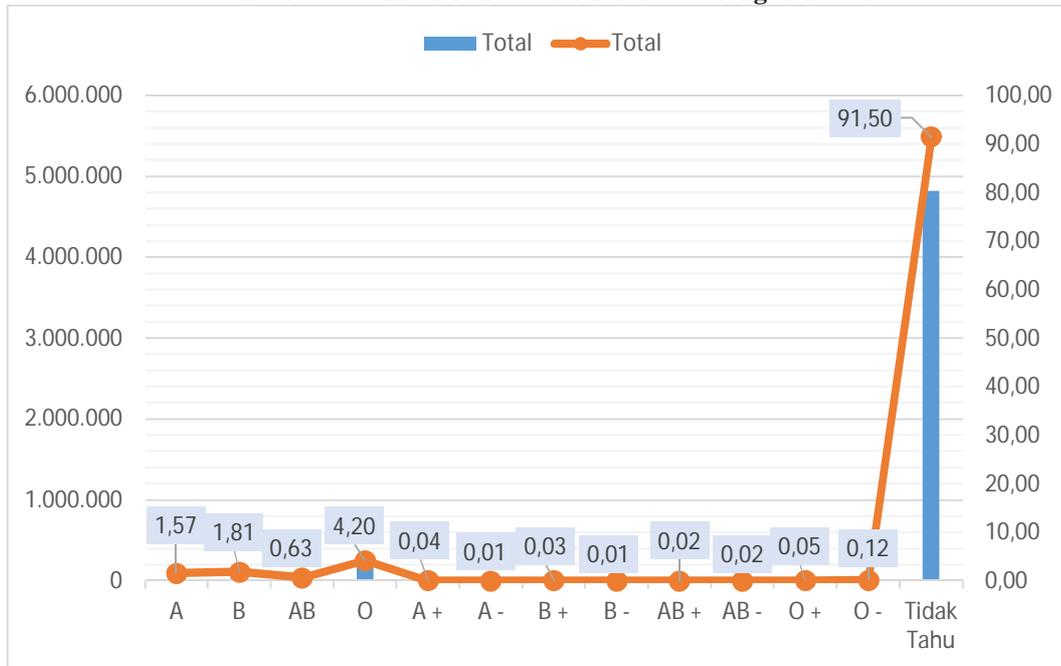
Golongan darah adalah suatu ciri khusus dari suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan sel darah merah. Dimana hal itu artinya golongan darah ditentukan oleh jumlah zat yang kemudian disebut antigen yang terkandung di dalam sel darah merah itu sendiri. Mengetahui golongan darah menjadi hal yang sangat penting di saat seseorang membutuhkan transfusi darah. Selain itu golongan darah juga bermanfaat bagi kesehatan untuk mengetahui resiko penyakit tertentu serta mencegah penyakit tersebut menyerang seseorang. Dengan adanya data golongan darah memudahkan bagi pihak pelayanan kesehatan dalam mencari golongan darah yang sesuai dengan pasien. Jumlah penduduk menurut golongan darah tertera pada Gambar 5.43 berikut.

Dari gambar 5.43 tersebut dapat diketahui bahwa sebesar 91,50 % atau 4.821.960 penduduk Aceh tidak mengetahui golongan darahnya. Sementara itu, dari data yang telah mengetes golongan darah, sebesar 3,86 % penduduk Aceh bergolongan darah 0 dan hanya 0,01 % yang memiliki golongan darah A- dan B-. Sebahagian besar belum pernah melakukan tes golongan darah pada saat mengurus administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sebagian besar lagi belum



melaporkan data golongan darah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada masing-masing kab/kota.

Gambar 5.43 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah

Mengetahui golongan darah menjadi hal yang sangat penting di saat seseorang mengalami kondisi darurat yang membutuhkan penanganan transfusi darah. Beberapa kesulitan yang dialami pada layanan kesehatan khususnya memenuhi stok darah bagi pasien calon operasi yang membutuhkan penanganan transfusi darah adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang golongan darah secara pribadi maupun keluarga. Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mendorong masyarakat yang akan mengurus administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar melampirkan keterangan hasil tes laboratorium golongan darah.



BAB VI

MOBILITAS PENDUDUK

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan perbedaan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Tingkat mobilitas penduduk baik mobilitas permanen maupun non permanen akan tampak nyata pada satuan unit administrasi yang lebih kecil dari Provinsi, sehingga analisis mobilitas akan lebih baik bila dilakukan pada wilayah administrasi setingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

Berkaitan dengan arus migrasi, indikator yang digunakan dalam perhitungannya adalah:

1. Migrasi Masuk (M_1)
2. Migrasi Keluar (M_0)
3. Migrasi Neto (M_a)
4. Migrasi Bruto (M_b)
5. Persentase Migrasi dari pedesaan ke perkotaan.

Ukuran-ukuran indikator tersebut bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah (Kabupaten/Kota) merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya untuk melakukan migrasi. Sebaliknya juga menunjukkan apakah suatu daerah, karena berbagai keterbatasan sumber daya, adanya tekanan atau alasan-alasan tertentu menjadi faktor pendorong



bagi penduduk di wilayahnya untuk berpindah ke daerah lain. Angka migrasi biasanya dihitung menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Indikator yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan tahun 2019 adalah Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar. Adapun indikator Migrasi Masuk dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **Migrasi Masuk (*in-migration*/ M_i)**

Migrasi Masuk adalah angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu Kabupaten/Kota tujuan dalam waktu satu tahun. Migrasi Masuk untuk Aceh dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Perhitungan angka migrasi masuk digunakan rumus sebagai berikut:

$$M_i = \frac{\text{Mig}_{\text{masuk}}}{P} \times K$$

M_i = Angka Migrasi Risen masuk/ Penduduk yang pernah tinggal di daerah lain

$\text{Mig}_{\text{masuk}}$ = Jumlah penduduk yang masuk ke daerah tujuan selama satu tahun/periode

P = Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun yang sama/periode (penduduk daerah tujuan)

K = Konstanta = 1000

Jumlah penduduk yang masuk ke suatu kabupaten/kota selama satu periode (tahun) dan jumlah penduduk daerah tujuan pada awal dan akhir tahun.

a. **Angka Migrasi Masuk (*in-migration*/ M_i)**

Migrasi Masuk adalah angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu Kabupaten/Kota tujuan dalam waktu satu tahun. Migrasi Masuk untuk Aceh dapat dilihat pada tabel di berikut ini.



Tabel. 6.1 Angka Migrasi Masuk Aceh

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota Yang Dituju	Pindah Antar Kabupaten/Kota	Pindah Antar Provinsi	Jumlah Migran Masuk
11.01	Aceh Selatan	1.944	563	2.507
11.02	Aceh Tenggara	663	1.345	2.008
11.03	Aceh Timur	4.209	1.181	5.390
11.04	Aceh Tengah	2.421	915	3.336
11.05	Aceh Barat	2.261	505	2.766
11.06	Aceh Besar	6.217	1.496	7.713
11.07	Pidie	3.438	780	4.218
11.08	Aceh Utara	5.183	1.123	6.306
11.09	Simeulue	708	263	971
11.10	Aceh Singkil	738	1.101	1.839
11.11	Bireuen	3.627	781	4.408
11.12	Aceh Barat Daya	1.362	259	1.621
11.13	Gayo Lues	781	316	1.097
11.14	Aceh Jaya	1.548	167	1.715
11.15	Nagan Raya	1.645	402	2.047
11.16	Aceh Tamiang	1.563	1.867	3.430
11.17	Bener Meriah	3.118	957	4.075
11.18	Pidie Jaya	1.803	291	2.094
11.71	Banda Aceh	6.552	1.777	8.329
11.72	Sabang	997	237	1.234
11.73	Lhokseumawe	2.679	576	3.255
11.74	Langsa	2.534	734	3.268
11.75	Subulussalam	1.069	800	1.869
11	ACEH	57.060	18.436	75.496

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Untuk mencari angka migrasi masuk biasanya digunakan rumus sebagai berikut:



$$M_i = \frac{Mig_{masuk}}{P} \times K$$

M_i = Angka Migrasi Risen Masuk/Penduduk yang pernah tinggal di daerah lain

Mig_{masuk} = Jumlah penduduk yang masuk ke daerah tujuan selama satu tahun/periode

P = Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun yang sama/periode (penduduk daerah tujuan)

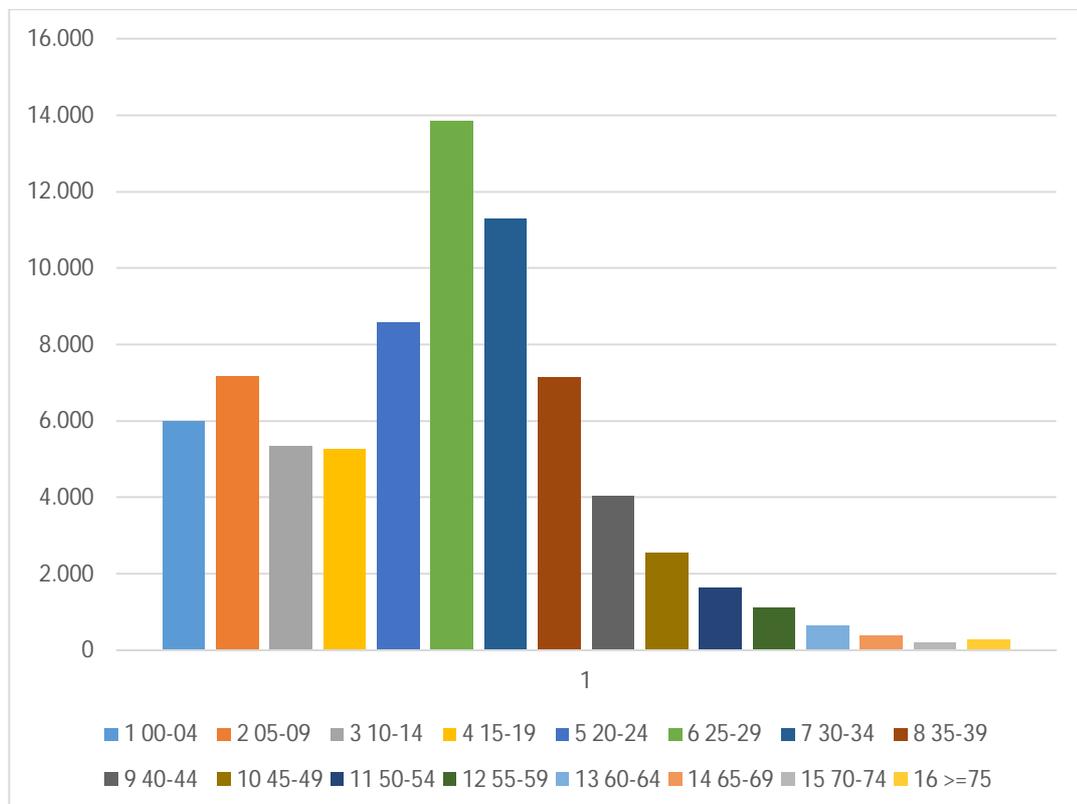
K = Konstanta = 1000

b. Karakteristik Migran Masuk

1) Karakteristik Migran Masuk Menurut Kelompok Umur

Karakteristik Migran Masuk Menurut Kelompok Umur dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 6.1 Karakteristik Migran Masuk Menurut Kelompok Umur



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.



Karakteristik migran masuk menurut kelompok umur tertinggi terdapat pada kelompok umur (25-29) tahun sebesar 13.849 , kemudian pada kelompok umur (30 - 34) tahun sebesar 11.309. Sedangkan kelompok umur (70 - 74) tahun sebagai kelompok umur terendah.

Tingginya kelompok umur (25-29) tahun sebagai migran masuk antar kabupaten/kota disebabkan berbagai macam faktor yaitu lapangan pekerjaan, untuk yang perempuan mengikuti suami, pendidikan dan lain sebagainya.

2) Karakteristik Migran Masuk Menurut Jenis Pekerjaan

Karakteristik migran masuk menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.2 Karakteristik Migran Masuk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Migran Masuk
1	Belum Tidak Bekerja	14.290
2	Mengurus Rumah Tangga	17.278
3	Pelajar Mahasiswa	15.201
4	Pensiunan	213
5	Pegawai Negeri Sipil	1.668
6	Tentara Nasional Indonesia	1.153
7	Kepolisian RI	418
8	Perdagangan	123
9	Petani Pekebun	5.462
10	Peternak	10
11	Nelayan Perikanan	602
12	Industri	5
13	Konstruksi	10
14	Transportasi	26
15	Karyawan Swasta	2.033
16	Karyawan BUMN	293
17	Karyawan BUMD	63
18	Karyawan Honorer	773



No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Migran Masuk
19	Buruh Harian Lepas	1.355
20	Buruh Tani Perkebunan	254
21	Buruh Nelayan Perikanan	55
22	Buruh Peternakan	1
23	Pembantu Rumah Tangga	5
24	Tukang Cukur	10
25	Tukang Listrik	7
26	Tukang Batu	50
27	Tukang Kayu	92
28	Tukang Sol Sepatu	1
29	Tukang Las Pandai Besi	28
30	Tukang Jahit	86
32	Penata Rias	8
34	Penata Rambut	9
35	Mekanik	82
36	Seniman	4
37	Tabib	1
39	Perancang Busana	1
40	Penterjemah	1
41	Imam Mesjid	4
42	Pendeta	4
43	Pastor	2
44	Wartawan	16
45	Ustadz Mubaligh	103
46	Juru Masak	2
59	Wakil Bupati	0
60	Walikota	0
62	Anggota DPRD Provinsi	0
63	Anggota DPRD Kabupaten Kota	2
64	Dosen	179
65	Guru	476
67	Pengacara	16
68	Notaris	1
69	Arsitek	7
71	Konsultan	13



No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Migran Masuk
72	Dokter	253
73	Bidan	226
74	Perawat	191
75	Apoteker	14
76	Psikiater Psikolog	0
78	Penyiar Radio	1
79	Pelaut	13
80	Peneliti	1
81	Sopir	295
82	Pialang	0
84	Pedagang	981
85	Perangkat Desa	3
86	Kepala Desa	1
88	Wiraswasta	11.014
89	Lainnya	7
JUMLAH		75,496

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa jenis pekerjaan tertinggi dalam karakteristik migran masuk yaitu “Mengurus Rumah Tangga”. Ini membuktikan bahwa para istri mengikuti para suaminya yang mendapatkan pindah tugas kerja, atau mencari lapangan pekerjaan yang baru.

Selanjutnya jenis pekerjaan tertinggi kedua adalah “Pelajar/Mahasiswa”, sebagaimana yang diketahui bahwa penduduk di Aceh untuk sebahagian besar terfokus di Kota Banda Aceh untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan demikian pada pembahasan sebelumnya dimana para pelajar juga mengikuti perpindahan kedua orang tuanya.

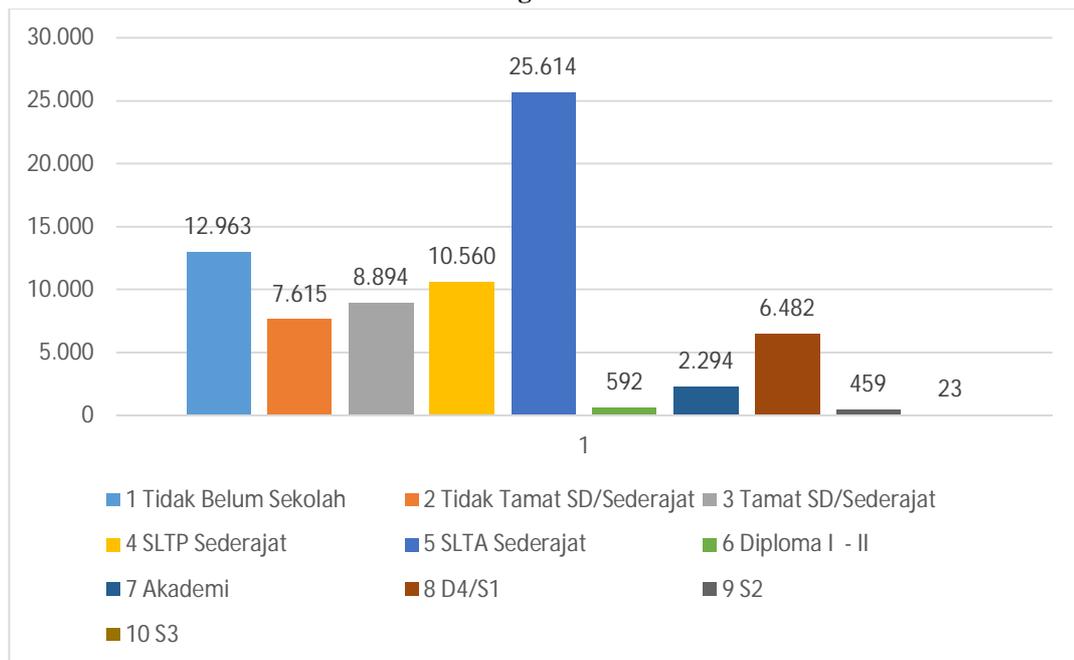


Jenis pekerjaan tertinggi ketiga adalah “Belum/Tidak Bekerja” yang berpindah untuk menemukan pekerjaan dan ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga penduduk yang memiliki jenis pekerjaan ini akan berkurang dengan sendirinya.

3) Karakteristik Migran Masuk Menurut Pendidikan

Selanjutnya karakteristik jenis pekerjaan juga dapat dilihat menurut pendidikan akhir, dimana akan diketahui pendidikan akhir apa yang tertinggi dalam migran masuk, sebagaimana yang tercantum pada gambar berikut ini.

Gambar 6.1 Karakteristik Migran Masuk Menurut Pendidikan



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

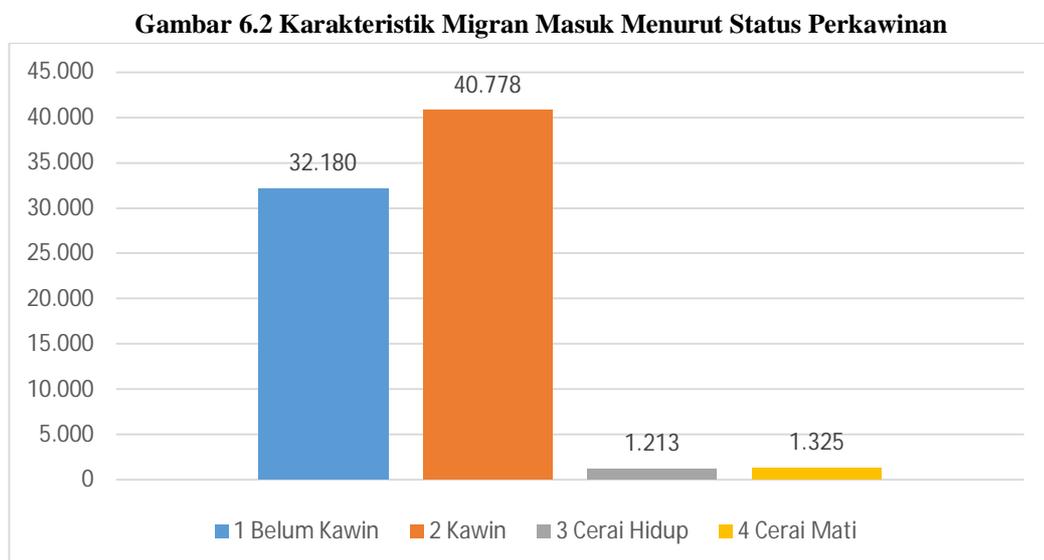
Karakteristik migran masuk menurut pendidikan akhir tergambar pada gambar di atas bahwa pendidikan akhir “SLTA/Sederajat” merupakan pendidikan akhir tertinggi, kemudian “Tidak/Belum Sekolah” dan “SLTP/Sederajat”. Sedangkan, karakteristik migran masuk terendah terdapat pada pendidikan akhir “Strata III”.



Banyak dari mereka yang berpindah ke Kabupaten/Kota lainnya atau merantau untuk menemukan pekerjaan, sedangkan yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, biasanya mereka merantau ke Kota Banda Aceh, dikarenakan di sana terdapat dua kampus favorit masyarakat Aceh.

4) Karakteristik Migran Masuk Menurut Status Perkawinan

Karakteristik Migran Masuk Menurut Status Perkawin dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

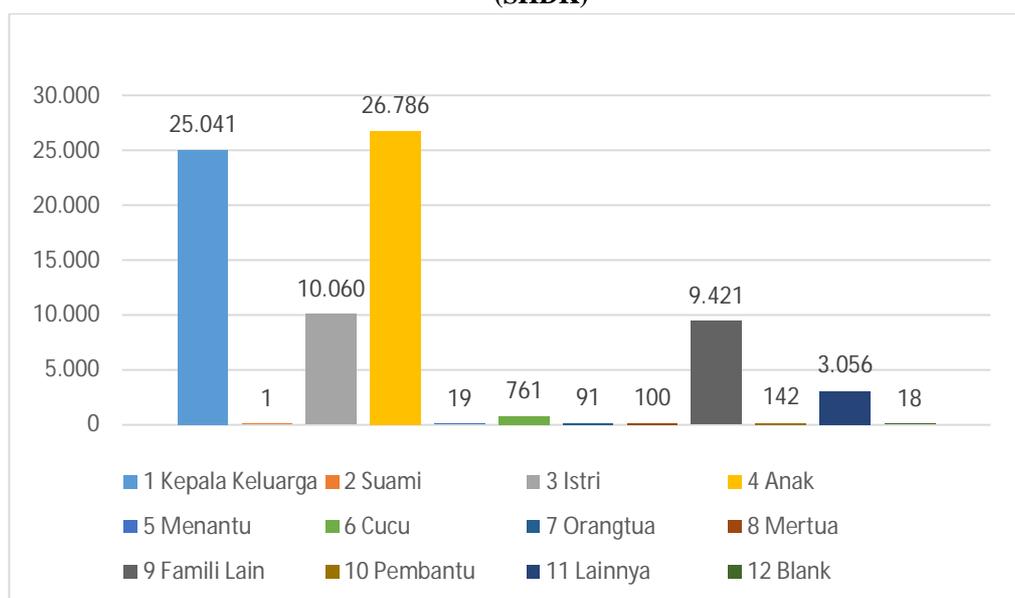
Karakteristik migran masuk menurut status perkawinan di Aceh tahun 2019 terlihat bahwasanya sebahagian besar penduduk Aceh dengan migran masuk tertinggi adalah Status Kawin sebesar 40.778. Kemungkinan adalah faktor mencari pekerjaan, atau pindah karena tugas/pekerjaan dan istri yang mengikuti suami.



5) Karakteristik Migran Masuk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)

Karakteristik migran masuk dapat dilihat menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK), sebagaimana yang tertera pada Gambar 6.4. Jika dilihat pada gambar 6.4, menunjukkan bahwasanya karakteristik migran masuk menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) yang tertinggi terdapat pada “Anak” dan “Kepala Keluarga”. Karakteristik migran masuk “Anak” menunjukkan bahwa alasan berpindah ke kabupaten/kota lainnya kemungkinan disebabkan dua faktor yaitu pekerjaan dan pendidikan. Adapun kepala keluarga, disebabkan dengan berbagai macam faktor di dalamnya diantaranya menemukan wilayah yang baru untuk mendapatkan penghasilan yang lebih atau berpindah tugas dari kantor dan lain sebagainya. Karakteristik migran masuk menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) memiliki berbagai macam manfaat diantaranya dapat menggambarkan keadaan migran masuk pada keluarga di Aceh pada tahun 2019.

Gambar 6.3 Karakteristik Migran Masuk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.



2. Migrasi Keluar (*out-migration*/ M_o)

Migrasi keluar merupakan angka yang menunjukkan banyaknya migran keluar dari suatu Kabupaten/Kota per 1.000 penduduk daerah asal dengan waktu satu tahun.

Rumus :

$$M_o = \frac{Mig_{out}}{P} \times K$$

M_o = Angka Migrasi Risen keluar

Mig_{out} = Jumlah penduduk yang keluar selama satu tahun/periode

P = Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun yang sama/periode

K = Konstanta = 1000

Adapun Jumlah migrasi keluar di Aceh tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.3 Angka Migrasi Keluar Tahun 2019

Kode Kab/Kota	Asal Kabupaten/Kota	Pindah Keluar Kabupaten	Pindah Keluar Provinsi	Jumlah Migran Keluar
11.01	Aceh Selatan	8.354	654	9.008
11.02	Aceh Tenggara	5.329	2.286	7.615
11.03	Aceh Timur	19.004	1.472	20.476
11.04	Aceh Tengah	8.900	735	9.635
11.05	Aceh Barat	8.996	748	9.744
11.06	Aceh Besar	19.459	2.050	21.509
11.07	Pidie	16.545	963	17.508
11.08	Aceh Utara	24.609	1.578	26.187
11.09	Simeulue	3.108	299	3.407
11.10	Aceh Singkil	3.854	1.038	4.892
11.11	Bireuen	16.852	1.078	17.930
11.12	Aceh Barat Daya	6.399	356	6.755



Kode Kab/Kota	Asal Kabupaten/Kota	Pindah Keluar Kabupaten	Pindah Keluar Provinsi	Jumlah Migran Keluar
11.13	Gayo Lues	3.224	375	3.599
11.14	Aceh Jaya	5.481	207	5.688
11.15	Nagan Raya	6.408	557	6.965
11.16	Aceh Tamiang	10.193	2.811	13.004
11.17	Bener Meriah	8.283	602	8.885
11.18	Pidie Jaya	6.919	273	7.192
11.71	Banda Aceh	19.751	2.444	22.195
11.72	Sabang	2.481	268	2.749
11.73	Lhokseumawe	11.439	1.144	12.583
11.74	Langsa	9.756	1.158	10.914
11.75	Subulussalam	3.701	839	4.540
11	ACEH	229.045	23.935	252.980

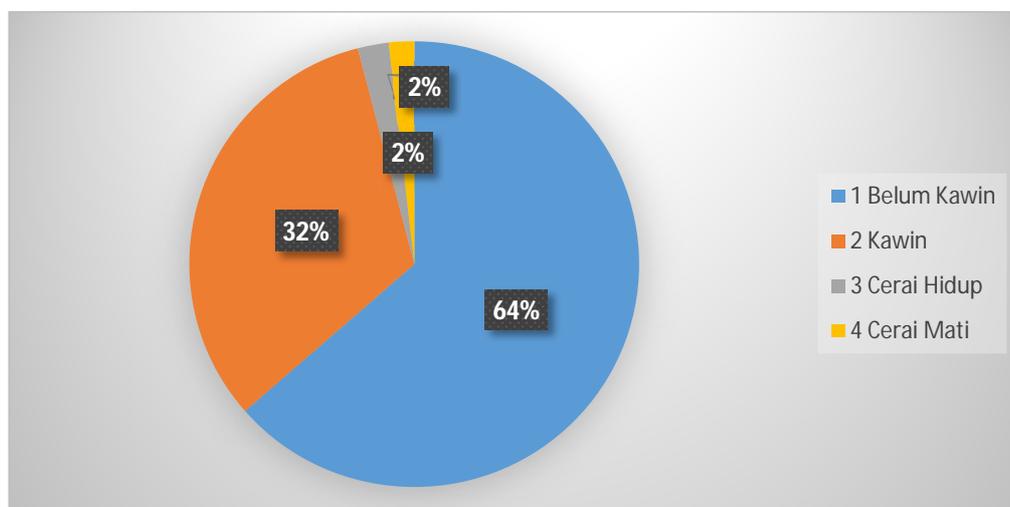
Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

a. Karakteristik Migran Keluar

1) Karakteristik Migran Keluar Menurut Status Perkawinan

Karakteristik migran keluar menurut status perkawinan di Aceh tahun 2019 dapat dilihat dari gambar berikut ini.

Gambar 6.5 Karakteristik Migran Keluar Menurut Status Perkawinan



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.



Karakteristik migran keluar menurut status perkawinan di Aceh tahun 2019 tertinggi terdapat pada status perkawinan yaitu “Belum Kawin”, yaitu sebesar 63% kemudian status “Kawin” sebesar 33%. Tingginya status perkawinan “Belum Kawin” disebabkan beberapa faktor di antaranya pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya.

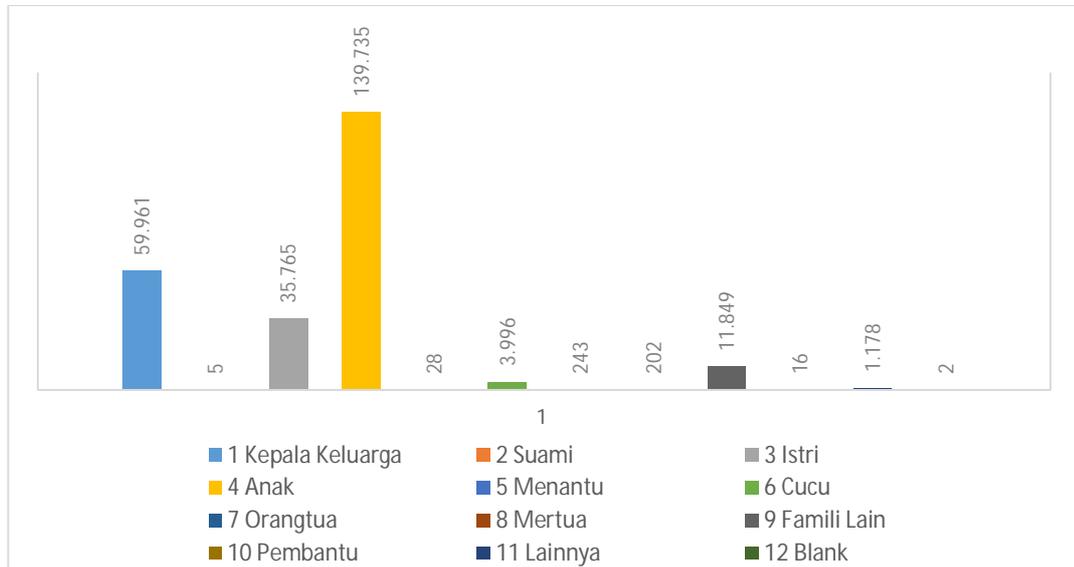
Karakteristik migran keluar menurut status perkawinan memiliki berbagai macam manfaat di dalamnya, yaitu menggambarkan keadaan penduduk dengan status perkawinan yang berpindah atau keluar dari tempat asalnya. Sebagaimana pada gambar di atas menunjukkan bahwasanya penduduk dengan Status Belum Kawin mendominasi. Ini memungkinkan beberapa faktor diantaranya, banyak dari mereka yang Belum Kawin berpindah untuk menemukan tempat yang baik dan atau terdapat kemungkinan lainnya, dimana masyarakat tidak merubah Status Kawinnya di Kartu Tanda Penduduknya dengan tidak melapor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

2) Karakteristik Migran Keluar Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK).

Karakteristik Migran Keluar Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga di Aceh tahun 2019 dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Gambar 6.6 Karakteristik Migran Keluar Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

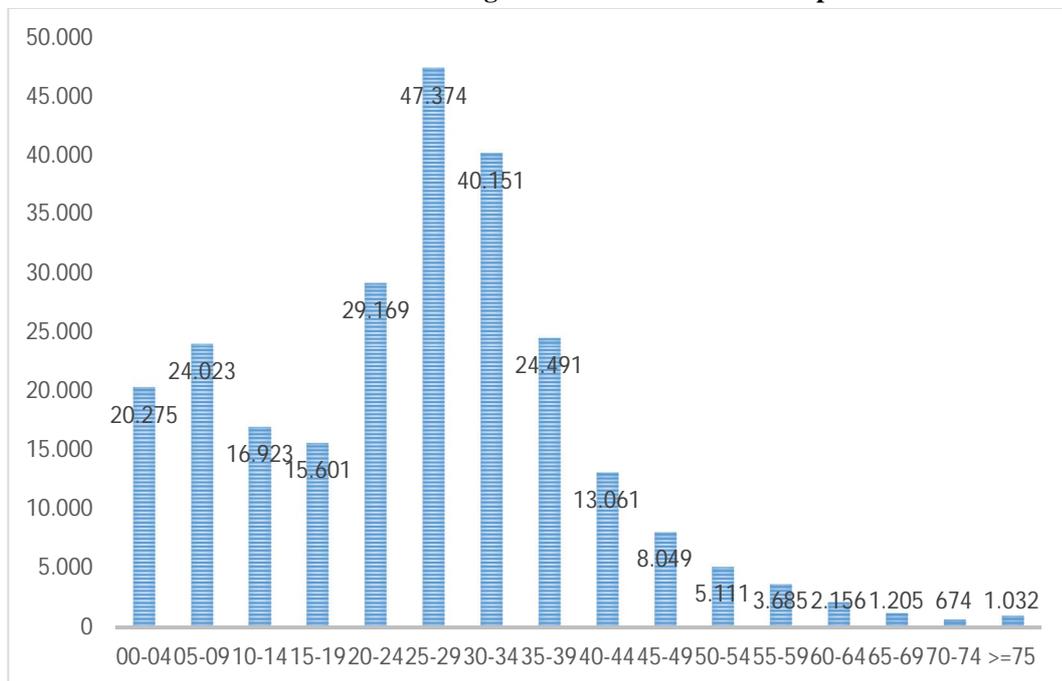
Berdasarkan gambar di atas, Karakteristik Migran Keluar Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) di Aceh Tahun 2019 yang tertinggi adalah “Anak”. Keadaan ini menunjukkan bahwasanya migrasi keluar seorang anak disebabkan faktor pendidikan atau pekerjaan sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

3) Karakteristik Migran Keluar Menurut Kelompok Umur

Karakteristik Migran Keluar Menurut Kelompok Umur di Aceh tahun 2019 dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Gambar 6.7 Karakteristik Migran Keluar Menurut Kelompok Umur



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Berdasarkan gambar di atas, bahwa Karakteristik Migran Keluar Menurut Kelompok Umur yang tertinggi adalah kelompok umur (25-29) tahun, kemudian disusul adalah kelompok umur (30- 34) tahun. Tingginya kelompok umur (20 - 24) tahun menunjukkan bahwasanya di umur tersebut adalah masa dalam pencarian pekerjaan setelah menamatkan pendidikan “Strata I”, atau melanjutkan pendidikan selanjutnya yaitu “Strata II”.



BAB VII

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bab ini mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada tahun 2019, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 tahun 2010. Penyajiannya ditampilkan melalui grafik dan tabel yang mencakup tentang:

- A. Kepemilikan Kartu Keluarga
- B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- C. Kepemilikan Akta, meliputi:
 - a. Akta Kelahiran
 - b. Akta Perkawinan
 - c. Akta Perceraian

Kepemilikan Dokumen Kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian merupakan hal yang wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain.

Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari - hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan administrasi penduduk



berdasarkan hak legalnya serta memperkuat database penduduk yang dinamis dan mutakhir serta pelayanan publik. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013), antara lain dimanfaatkan untuk:

1. Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
2. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
3. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
4. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecatatan dan lain sebagainya. Kartu Keluarga merupakan salah satu dari

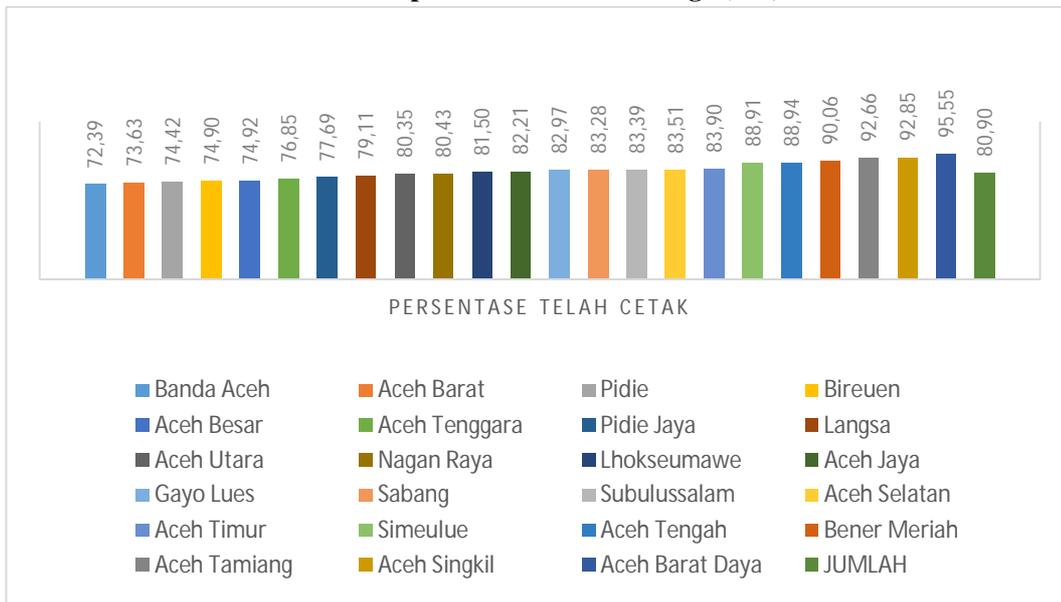


beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sesuai peraturan perundang-undangan. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga berguna untuk mengetahui jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga. Persentase kepemilikan KK dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\%KK = \frac{\sum Pddk_{\text{memiliki KK}}}{\sum \text{Kepala Keluarga}} \times 100\%$$

%KK= persentase kepemilikan Kartu Keluarga

Gambar 7.1. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Provinsi Aceh



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Gambar 7.1 menunjukkan persentase kepemilikan dokumen Kartu Keluarga di Aceh. Secara umum, rata-rata persentase kepemilikan dokumen di Aceh telah mencapai 80,90%. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga tertinggi berada di



Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 95,55 % diikuti Kabupaten Aceh Singkil sebesar 92,85 % dan Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 92,66 %. Persentase ini menunjukkan bahwa hanya sedikit penduduk yaitu di bawah 5 % yang tidak memiliki dokumen KK dan nilai ini melebihi rata-rata di Aceh. Sementara itu, kepemilikan kartu keluarga terendah yaitu di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 72,39% diikuti Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Pidie sebesar 73,63 % dan 74,42%. Selanjutnya perkembangan kepemilikan dokumen KK di Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1 Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga Tahun 2017 s.d. 2019

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Persentase Cetak Kartu Keluarga (%)		
		2017	2018	2019
11.01	Aceh Selatan	84,22	86,00	83,51
11.02	Aceh Tenggara	91,35	86,73	76,85
11.03	Aceh Timur	92,04	90,50	83,90
11.04	Aceh Tengah	93,54	93,58	88,94
11.05	Aceh Barat	86,05	80,12	73,63
11.06	Aceh Besar	89,44	82,02	74,92
11.07	Pidie	84,61	85,68	74,42
11.08	Aceh Utara	90,01	89,08	80,35
11.09	Simeulue	92,50	92,83	88,91
11.10	Aceh Singkil	94,05	96,43	92,85
11.11	Bireuen	89,90	83,52	74,90
11.12	Aceh Barat Daya	91,01	93,52	95,55
11.13	Gayo Lues	95,11	90,75	82,97
11.14	Aceh Jaya	96,06	90,61	82,21
11.15	Nagan Raya	86,69	92,50	80,43
11.16	Aceh Tamiang	94,54	93,23	92,66
11.17	Bener Meriah	84,80	85,89	90,06
11.18	Pidie Jaya	86,14	85,17	77,69
11.71	Banda Aceh	90,23	87,82	72,39
11.72	Sabang	81,54	76,65	83,28



Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Persentase Cetak Kartu Keluarga (%)		
		2017	2018	2019
11.73	Lhokseumawe	67,50	73,19	81,50
11.74	Langsa	87,77	90,52	79,11
11.75	Subulussalam	97,52	94,83	83,39
11	Provinsi Aceh	88,78	87,43	80,90

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Perkembangan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 Kepemilikan KK mencapai 88,78 %, namun turun pada 2 tahun berikutnya yaitu sebesar 87,43 % dan meningkat kembali menjadi 80,90 % di tahun 2019.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP-el wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP-el.

Penduduk yang memiliki KTP-el dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan, mengurus pajak kendaraan bermotor dan sebagainya.

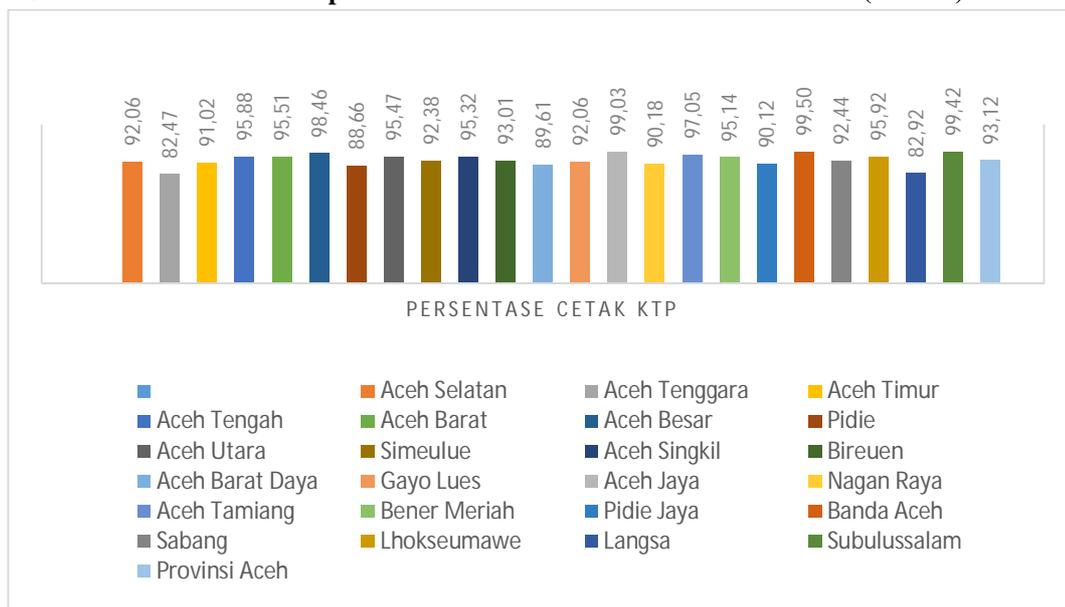


Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\%KTP = \frac{\sum Pddk_{\text{memiliki KTP}}}{\sum Pddk_{\text{Wajib KTP}}} \times 100\%$$

% KTP = persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Gambar 7.2 Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Aceh



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Gambar 7.2 menggambarkan persentase kepemilikan dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Aceh. Secara umum, rata-rata persentase kepemilikan dokumen di Aceh telah mencapai 93,12 %. Persentase kepemilikan KTP-el tertinggi berada di Kota Banda Aceh sebesar 99,50 % diikuti Kota Subussalam sebesar 99,42 % dan Kabupaten Aceh Jaya sebesar 99,03 %. Nilai ini jauh melebihi rata-rata di Aceh. Sementara itu, kepemilikan KTP-el terendah berturut-turut berada di Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Langsa dan Kabupaten Pidie yaitu sebesar 82,47 %, 82,92 % dan 88,66 % berturut-turut Selanjutnya,



perkembangan kepemilikan dokumen KTP-el di Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut.

**Tabel 7.2 Perkembangan Persentase Kepemilikan KTP Elektronik
Tahun 2017 sampai dengan 2019**

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) (%)		
		2017	2018	2019
11.01	Aceh Selatan	90,59	93,50	92,06
11.02	Aceh Tenggara	80,07	84,23	82,47
11.03	Aceh Timur	85,21	89,98	91,02
11.04	Aceh Tengah	89,39	95,38	95,88
11.05	Aceh Barat	88,80	94,21	95,51
11.06	Aceh Besar	94,52	100,01	98,46
11.07	Pidie	84,85	87,67	88,66
11.08	Aceh Utara	84,21	89,15	95,47
11.09	Simeulue	89,79	91,34	92,38
11.10	Aceh Singkil	83,13	94,20	95,32
11.11	Bireuen	88,53	93,80	93,01
11.12	Aceh Barat Daya	87,31	91,88	89,61
11.13	Gayo Lues	87,95	90,96	92,06
11.14	Aceh Jaya	96,75	99,41	99,03
11.15	Nagan Raya	84,57	88,31	90,18
11.16	Aceh Tamiang	93,37	99,06	97,05
11.17	Bener Meriah	90,95	94,21	95,14
11.18	Pidie Jaya	88,37	90,53	90,12
11.71	Banda Aceh	93,81	98,03	99,50
11.72	Sabang	91,71	92,01	92,44
11.73	Lhokseumawe	88,92	94,34	95,92
11.74	Langsa	80,07	83,72	82,92
11.75	Subulussalam	90,58	99,50	99,42
11	Provinsi Aceh	87,90	92,46	93,12

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Perkembangan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017,



kepemilikan KTP sebesar 87,90 % mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai 93,12 %. Hal ini menunjukkan bahwa 93,12 % penduduk Aceh telah memiliki KTP dan memiliki kesadaran akan pentingnya kepemilikan KTP. Sementara itu, hanya 6,88 % penduduk yang tidak memiliki KTP.

C. Kepemilikan AKTA

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian. Data mengenai akta kematian belum dapat diperoleh sehingga belum disajikan dalam profil ini.

1. Kepemilikan Akta Kelahiran

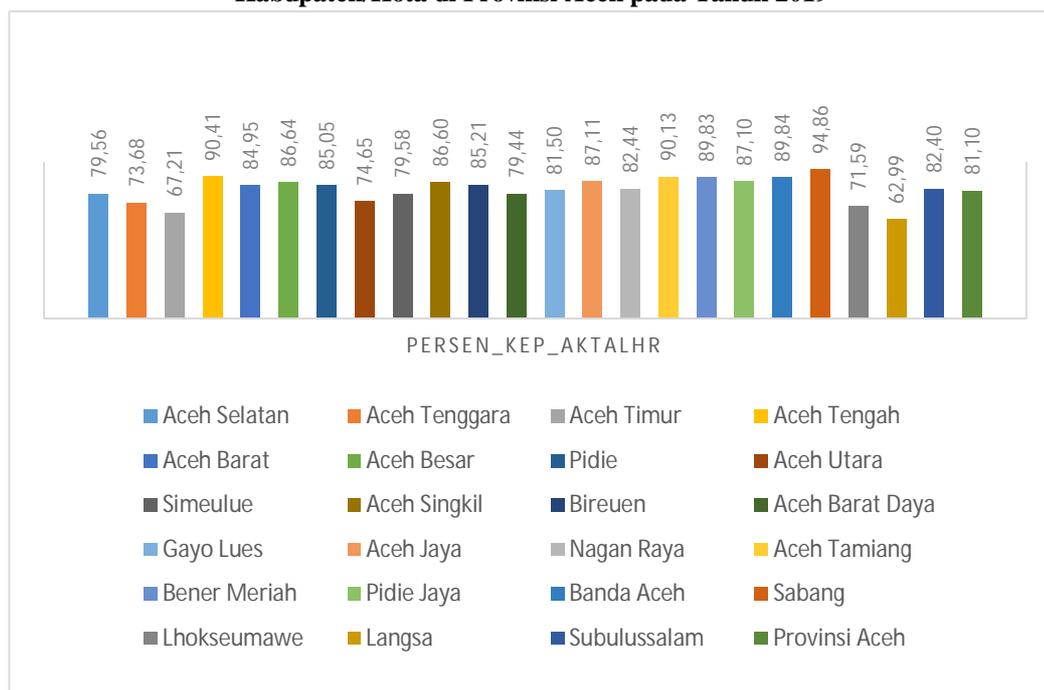
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menjamin setiap anak untuk dicatatkan kelahirannya. Akta kelahiran merupakan pengakuan nagara terhadap penduduknya yang baru lahir. oleh sebab itu bagi setiap penduduk yang baru lahir harus dilaporkan untuk di data dalam database kependudukan dan diberikan haknya berupa akta kelahiran. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh setiap penduduk karena digunakan pada saat mengurus sekolah atau mengurus berbagai dokumen seperti paspor serta untuk berbagai keperluan lainnya.



a) Kepemilikan Akta Kelahiran Umur 0 s.d. 18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota

Gambaran mengenai kepemilikan akta kelahiran menurut kabupaten/kota di Aceh dapat dilihat dari gambar berikut ini.

Gambar 7.3. Persentase Kepemilikan Akta Lahir Umur 0-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada Tahun 2019



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Gambar 7.3. menunjukkan persentase kepemilikan Akta Lahir 0-18 Tahun menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Secara umum, rata-rata persentase kepemilikan akta lahir di Provinsi Aceh mencapai 81,10 %. Persentase kepemilikan akta lahir tertinggi berada di Kota Sabang yaitu sebesar 94,86 %, diikuti Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tamiang sebesar 90,41% dan 90,13%. Sementara itu, persentase kepemilikan akta lahir terendah berada di Kota Langsa yaitu sebesar 62,99 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Kota Langsa yang belum memiliki akta lahir. Selanjutnya perkembangan kepemilikan akta lahir di



Provinsi Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel 7.3. berikut.

Tabel 7.3. Perkembangan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Tahun 2017 s.d. 2019

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota (%)		
		2017	2018	2019
11.01	Aceh Selatan	59,49	74,27	79,56
11.02	Aceh Tenggara	55,25	67,78	73,68
11.03	Aceh Timur	50,85	58,66	67,21
11.04	Aceh Tengah	80,01	88,35	90,41
11.05	Aceh Barat	74,71	80,07	84,95
11.06	Aceh Besar	78,06	82,48	86,64
11.07	Pidie	77,12	81,19	85,05
11.08	Aceh Utara	50,66	70,42	74,65
11.09	Simeulue	55,49	67,27	79,58
11.10	Aceh Singkil	80,27	83,83	86,60
11.11	Bireuen	59,68	83,60	85,21
11.12	Aceh Barat Daya	64,53	69,91	79,44
11.13	Gayo Lues	76,37	78,68	81,50
11.14	Aceh Jaya	63,19	77,06	87,11
11.15	Nagan Raya	77,34	80,87	82,44
11.16	Aceh Tamiang	79,22	86,50	90,13
11.17	Bener Meriah	80,02	84,27	89,83
11.18	Pidie Jaya	75,76	81,33	87,10
11.71	Banda Aceh	74,18	84,55	89,84
11.72	Sabang	61,59	76,63	94,86
11.73	Lhokseumawe	56,00	63,15	71,59
11.74	Langsa	38,72	44,46	62,99
11.75	Subulussalam	75,45	77,33	82,40
11	Provinsi Aceh	65,65	75,58	81,10

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Tabel 7.3 dapat diketahui bahwa Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun menurut kabupaten/kota di Aceh dari tahun 2017 sampai dengan 2019

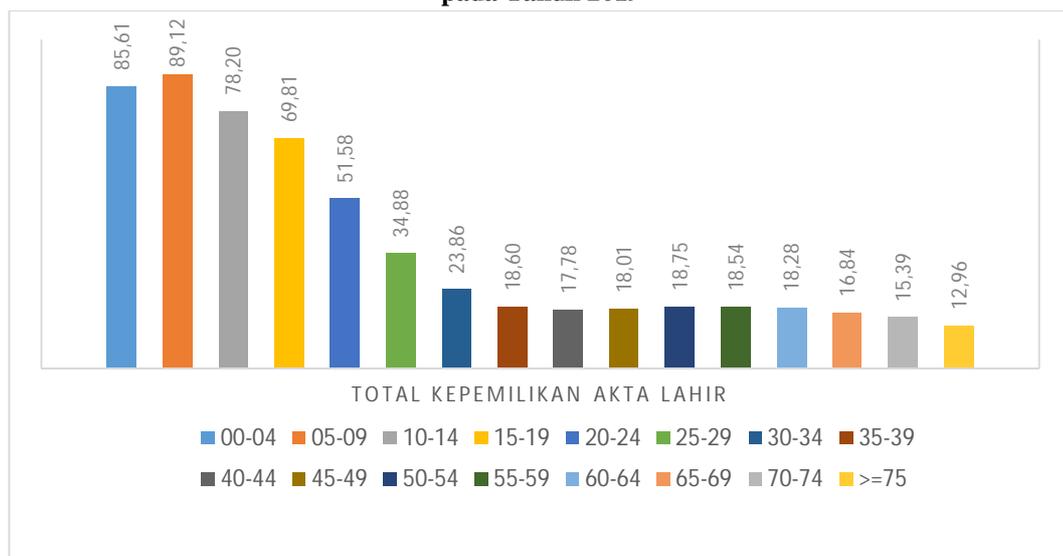


mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2018 kepemilikan akta kelahiran sebesar 75,58% dan di tahun 2019 yaitu sebesar 81,10%. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kepentingan akta kelahiran. Namun demikian, masih perlu dilakukan upaya dengan mengadakan sosialisasi atau mendatangi masyarakat agar dapat dibuat akta kelahiran.

b) Kepemilikan Akta Kelahiran Menurut Kelompok Umur

Gambaran mengenai kepemilikan akta kelahiran menurut umur di Aceh dapat dilihat dari gambar berikut ini.

Gambar 7.4. Persentase Kepemilikan Akta Lahir Menurut Umur di Provinsi Aceh pada Tahun 2019



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Gambar 7.4. menunjukkan persentase kepemilikan akta lahir menurut umur di Provinsi Aceh pada tahun 2019. Persentase penduduk yang memiliki akta lahir tertinggi terdapat pada Penduduk yang berumur (5-9) tahun yaitu sebesar 89,12 %, diikuti penduduk berumur (0-4) dan (10-14) tahun sebesar 85,61 % dan 78,20 %. Hal ini dikarenakan penduduk yang ingin melanjutkan sekolah, telah diwajibkan

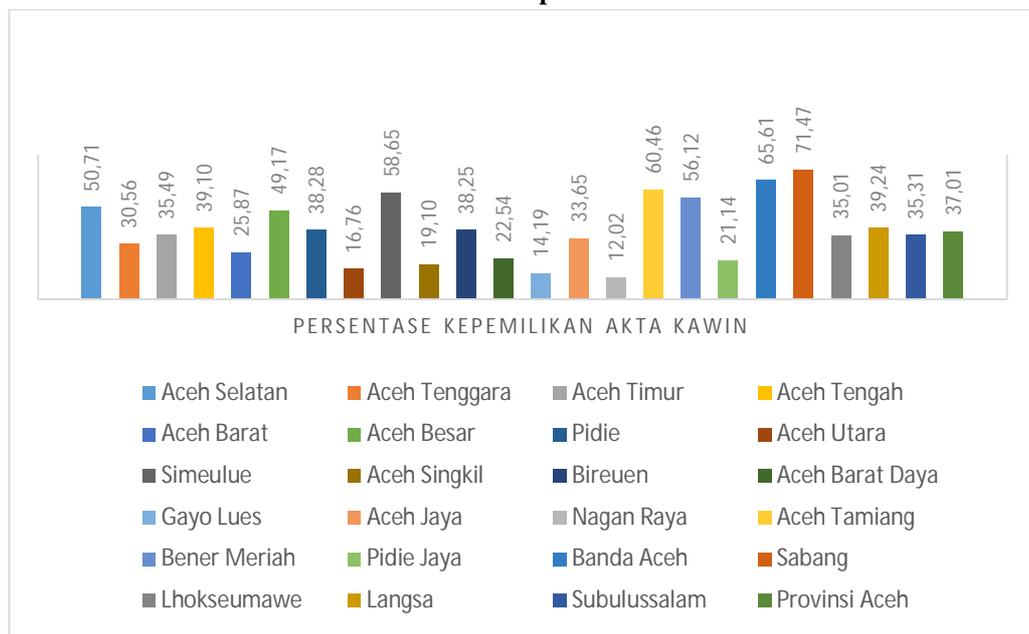


untuk memiliki akta lahir sehingga hampir semua jumlah penduduk umur (5-9) tahun telah memiliki akta lahir. Sementara itu, terlihat bahwa kepemilikan akta lahir terendah terdapat pada penduduk berumur (≥ 75 tahun) yaitu hanya sebesar 12,96 %. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi umur penduduk, maka semakin rendah persentase kepemilikan akta kelahiran.

2. Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta kawin merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara Laki-laki dan Perempuan dalam bentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.

Gambar 7.5. Persentase Kepemilikan Akta Kawin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada Tahun 2019



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Gambar 7.5. menunjukkan persentase kepemilikan Akta kawin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Secara umum, rata-rata persentase kepemilikan



akta kawin di Provinsi Aceh baru mencapai 37,01 %. Persentase kepemilikan akta kawin tertinggi berada di Kabupaten Sabang yaitu sebesar 71,47 %, diikuti Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 65,61 % dan 60,46 %. Sementara itu, persentase kepemilikan akta kawin terendah berada di Kabupaten Nagan Raya yaitu sebesar 12,02 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 88,00% penduduk Kabupaten Nagan Raya yang belum memiliki akta kawin. Hal ini disebabkan masih banyak penduduk yang belum melaporkan kepemilikan akta kawin. Perkembangan kepemilikan akta kawin di Provinsi Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel 7.4. berikut.

**Tabel 7.4. Perkembangan Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan
Tahun 2017 s.d. 2019**

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Menurut Kabupaten/Kota (%)		
		2017	2018	2019
11.01	Aceh Selatan	36,09	40,49	50,71
11.02	Aceh Tenggara	18,49	21,76	30,56
11.03	Aceh Timur	26,15	28,97	35,49
11.04	Aceh Tengah	20,25	25,86	39,10
11.05	Aceh Barat	11,49	15,50	25,87
11.06	Aceh Besar	38,95	42,20	49,17
11.07	Pidie	24,49	29,01	38,28
11.08	Aceh Utara	0,53	2,68	16,76
11.09	Simeulue	31,97	34,16	58,65
11.10	Aceh Singkil	10,37	13,53	19,10
11.11	Bireuen	23,72	27,71	38,25
11.12	Aceh Barat Daya	5,45	8,88	22,54
11.13	Gayo Lues	6,88	7,23	14,19
11.14	Aceh Jaya	23,14	26,69	33,65
11.15	Nagan Raya	1,11	2,00	12,02
11.16	Aceh Tamiang	49,58	56,97	60,46
11.17	Bener Meriah	40,33	44,94	56,12



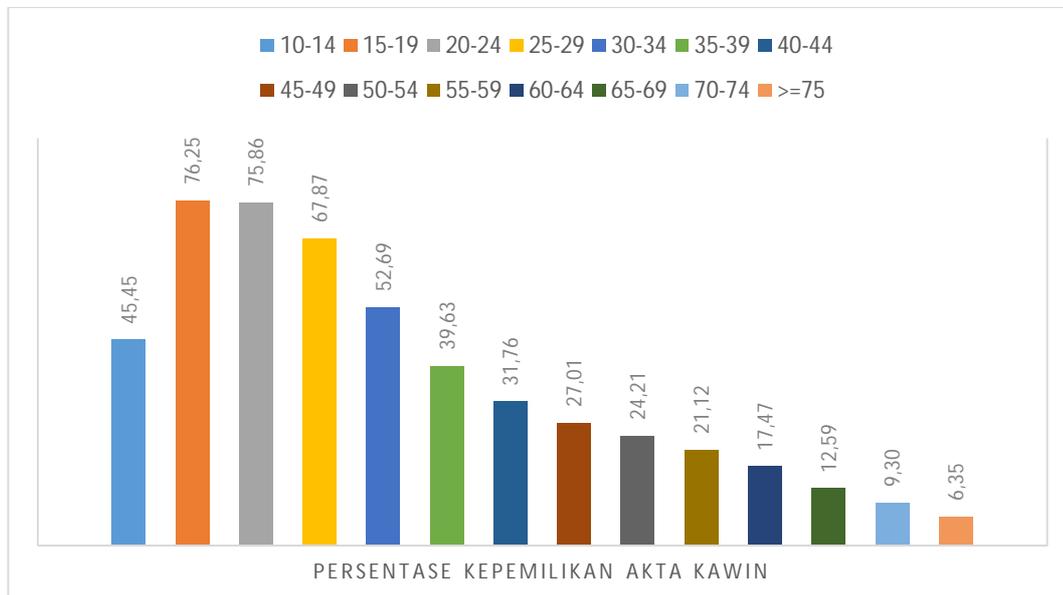
Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Menurut Kabupaten/Kota (%)		
		2017	2018	2019
11.18	Pidie Jaya	2,75	6,65	21,14
11.71	Banda Aceh	32,42	44,68	65,61
11.72	Sabang	28,50	43,39	71,47
11.73	Lhokseumawe	19,72	21,31	35,01
11.74	Langsa	24,88	29,13	39,24
11.75	Subulussalam	28,16	30,24	35,31
11	Provinsi Aceh	22,26	26,33	37,01

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Perkembangan persentase kepemilikan Akta Perkawinan Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dan diikuti juga di seluruh kabupaten/kota di Aceh, namun berdasarkan capaiannya, persentase kepemilikan akta perkawinan masih sangat rendah. Persentase penduduk yang memiliki akta kawin di Tahun 2019 hanya mencapai 37,01 %. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan disebabkan pasangan yang telah menikah belum mencatatkan status perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan Kanwil Kemenag, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar masyarakat yang beragama Islam, dapat terdata kepemilikan dokumen akta nikah. Selanjutnya dapat dilihat kepemilikan Akta Perkawinan menurut Kelompok Umur sebagaimana yang tercantum pada gambar di berikut ini.



Gambar 7.6. Persentase Kepemilikan Akta Kawin Menurut Umur di Provinsi Aceh pada Tahun 2019



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Gambar 7.6 menunjukkan persentase kepemilikan akta kawin menurut umur di Provinsi Aceh pada tahun 2019. Persentase penduduk yang memiliki akta lahir tertinggi terdapat pada Penduduk yang berumur (15-19) tahun yaitu sebesar 76,25 %, diikuti penduduk berumur (20-24) dan (25-29) tahun sebesar 75,86 % dan 67,87 %. Sementara itu, terlihat bahwa kepemilikan akta lahir terendah terdapat pada penduduk berumur (≥ 75 tahun) yaitu hanya sebesar 6,35 %. Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan semakin tinggi umur penduduk, maka semakin rendah persentase kepemilikan akte kawin.

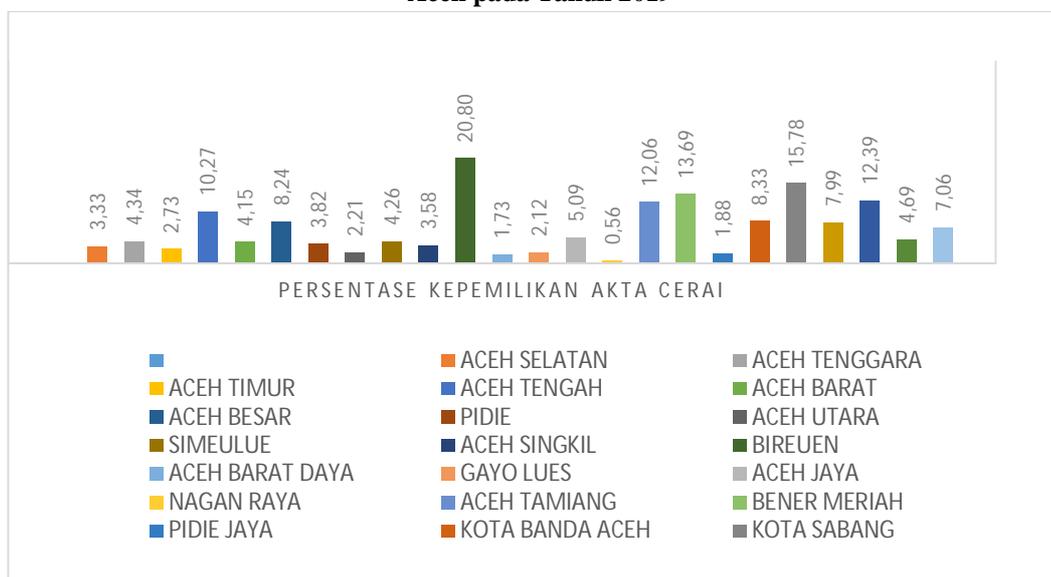
3. Kepemilikan Akta Perceraian

Akta perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Akta perceraian adalah suatu bukti autentik tentang putusnya suatu ikatan perkawinan. Apabila Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka perceraian harus melalui Pengadilan



Negeri, yang telah menjadi kekuatan hukum yang pasti, baru dicatitkan/didaftarkan dalam daftar perceraian yang berjalan dan telah diperuntukan untuk itu. Bagi Pemerintah, dengan pencatatan Perceraian diperoleh statistik peristiwa yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan keluarga dan penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

Gambar 7.7. Persentase Kepemilikan Akta Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada Tahun 2019



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Gambar 7.7 menunjukkan persentase kepemilikan Akta cerai menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Secara umum, rata-rata persentase kepemilikan akta kawin di Provinsi Aceh hanya sebesar 7,06 %. Persentase kepemilikan akta cerai tertinggi berada di Kabupaten Bireuen yaitu sebesar 20,80 %, diikuti Kota Sabang dan Kabupaten Bener Meriah sebesar 13,69 % dan 12,39 %. Sementara itu, persentase kepemilikan akta kawin terendah berada di Kabupaten Nagan Raya yaitu sebesar 0,56 %, diikuti Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Utara sebesar



1,88 % dan 2,21 %. Selanjutnya perkembangan kepemilikan akta cerai di Provinsi Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel 7.5. berikut.

Tabel 7.5. Perkembangan Kepemilikan Akta Perceraian Tahun 2017 s.d. 2019.

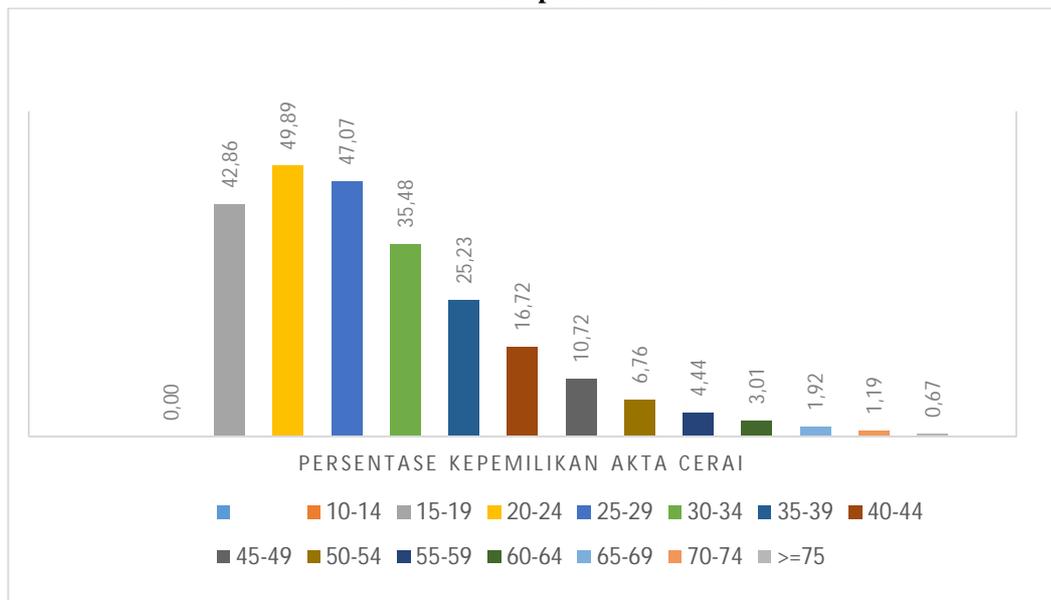
Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akta Perceraian Menurut Kabupaten/Kota			
		Jumlah (2017)	Persentase Kepemilikan (2018)	Jumlah (2019)	Persentase Kepemilikan (2019)
11.02	Aceh Tenggara	213	2,58	475	4,34
11.03	Aceh Timur	223	1,44	602	2,73
11.04	Aceh Tengah	544	7,1	964	10,27
11.05	Aceh Barat	151	2,74	413	4,15
11.06	Aceh Besar	1.050	6,87	1.669	8,24
11.07	Pidie	533	2,69	1.049	3,82
11.08	Aceh Utara	31	0,57	711	2,21
11.09	Simeulue	127	3,07	215	4,26
11.10	Aceh Singkil	63	2,40	165	3,58
11.11	Bireuen	2.317	15,21	6.056	20,80
11.12	Aceh Barat Daya	29	0,51	160	1,73
11.13	Gayo Lues	38	1,30	93	2,12
11.14	Aceh Jaya	193	4,51	272	5,09
11.15	Nagan Raya	3	0,19	42	0,56
11.16	Aceh Tamiang	1.283	10,74	1.930	12,06
11.17	Bener Meriah	519	10,40	958	13,69
11.18	Pidie Jaya	39	0,72	199	1,88
11.71	Banda Aceh	320	5,04	882	8,33
11.72	Sabang	303	13,24	384	15,78
11.73	Lhokseumawe	377	4,69	725	7,99
11.74	Langsa	830	977	1.352	12,39
11.75	Subulussalam	81	3,58	151	4,69
11	Provinsi Aceh	9.555	5,04	19.991	7,06

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.



Perkembangan Jumlah kepemilikan Akta Perceraian di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dan diikuti juga di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan Akta Perceraian sangat dibutuhkan bagi mereka yang berstatus cerai hidup atau cerai mati. Namun berdasarkan capaiannya, persentase kepemilikan akta peceraian masih sangat rendah. Persentase penduduk yang memiliki akta cerai di Tahun 2019 hanya sebesar 7,06 %, persentase ini mengalami penignkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,04 %. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian pemerintah Aceh dalam merencanakan suatu program kegiatan seperti penyuluhan akan pentingnya akta perceraian.

Gambar 7.8. Persentase Kepemilikan Akta Cerai Menurut Umur di Provinsi Aceh pada Tahun 2019



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.



Gambar 7.8. menunjukkan persentase kepemilikan akta cerai menurut umur di Provinsi Aceh pada tahun 2019. Persentase penduduk yang memiliki akta cerai tertinggi terdapat pada Penduduk yang berumur (20-24) tahun yaitu sebesar 49,89 %, diikuti penduduk berumur (25-29) dan (30-34) tahun sebesar 47,07 % dan 42,86 %. Sementara itu, terlihat bahwa kepemilikan akta lahir terendah terdapat pada penduduk berumur (≥ 75 tahun) yaitu hanya sebesar 0,67 %. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif pada umumnya telah memiliki kesadaran untuk melaporkan akta cerai di Disdukcapil. Walau demikian, jumlah ini masih jauh dari total keseluruhan.



BAB VIII

KESIMPULAN

Penduduk merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam aspek pembangunan. Penduduk bukan hanya sebagai obyek dari pembangunan tapi sekaligus sebagai subjek dari pembangunan, artinya penduduk berperan penting dalam kesuksesan semua aspek pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan pengembangan sistem administrasi kependudukan yang terorganisir dari pusat hingga ke daerah. Administrasi kependudukan dimaksud menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Semakin lengkap dan akuratnya data kependudukan yang tersedia, maka semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan

Profil Perkembangan Kependudukan Aceh Tahun 2020 merupakan gambaran perkembangan kependudukan pada tahun 2019 yang disajikan secara berkala setiap tahunnya serta untuk mengetahui capaian atas pelaksanaan administrasi kependudukan di Aceh sesuai amanat Permendagri No 65 Tahun 2010. Data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini merupakan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik yang diproses melalui *data base* kependudukan serta data dari instansi terkait lainnya, seperti Bappeda Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Mahkamah Syar'iah Aceh, Dinas Sosial dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.



Profil Perkembangan Kependudukan Aceh Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam mendukung perencanaan pembangunan di Aceh. Data dan informasi yang disajikan dalam Buku Profil Perkembangan Kependudukan Aceh ini seperti : data kuantitas penduduk, data kualitas penduduk, data migrasi, dan data kepemilikan dokumen.

Secara umum, jumlah penduduk Aceh pada tahun 2019 tercatat mencapai 5.269.809 jiwa di mana laki-laki berjumlah 2.644.534 jiwa dan perempuan berjumlah 2.625.275 jiwa. Capaian kepemilikan akta, baik kawin, cerai, kelahiran, dan kematian di Provinsi Aceh masih rendah. Upaya sosialisasi kepada masyarakat masih diperlukan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kepemilikan akta. Upaya yang perlu ditekankan diantaranya :

1. Mencatatkan peristiwa kelahiran.
2. Mendaftarkan dan mencatatkan kejadian vital seperti: perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak.
3. Mencatatkan perubahan status kependudukan lainnya seperti: perubahan alamat ataupun perubahan nama, jenjang pendidikan, pekerjaan, gol darah dan lainnya.